



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

BOROKO, MARET 2025



KANTOR BUPATI
BOLAANG MONGONDOW UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jenderal Soedirman No. 01 Boroko Kecamatan Kaidipang Kode Pos 95765

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
No. 700/066/ITDAKAB/III/2025

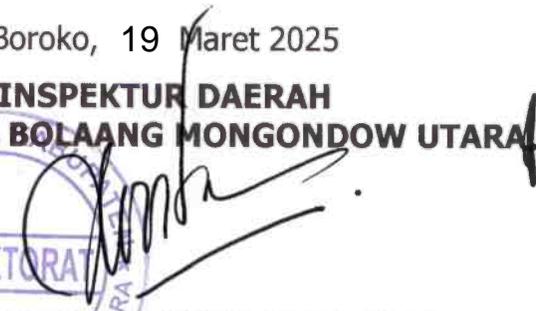
Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini.

Boroko, 19 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



SULHA MOKODOMPIS, S.Pd., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680403 199103 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi No. 01 Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kode Pos 95765

PERNYATAAN REVIU ATAS PELAPORAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Pelaporan Kinerja menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Reviu bertujuan untuk memastikan bahwa informasi telah menyajikan data kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam pelaporan kinerja ini.

Boroko, 24 Maret 2025
INSPEKTUR

SULHA MOKODOMPIS. S.Pd. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680304 199103 2 018



LAPORAN
PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Daerah dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimasa yang akan datang menuju Bolaang Mongondow Utara yang *Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing*.



Boroko, 19 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

SIRAJUDIN LASENA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan	5
d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	9
e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada Di setiap Perangkat Daerah	12
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	18
g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	35
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	42
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	42



b. Visi dan Misi Kepala Daerah	52
c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	56
d. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	60
e. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	68
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	85
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	97
2.1. Capaian Kinerja Makro	97
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	112
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	112
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	127
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	131
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	132
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	133
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	135
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	136
2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	172
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	193
3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	194
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	195
3.3. Permasalahan dan Kendala	201



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

3.4. Saran dan Tindaklanjut	201
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	202
4.1. Urusan Pendidikan	202
4.2. Urusan Kesehatan	210
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	217
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	222
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..	227
4.6. Urusan Sosial	232
4.7. Program dan Kegiatan	242
BAB V PENUTUP	249



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	6
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024	7
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2020-2024	8
Tabel 1.6	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	9
Tabel 1.7	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Berdasarkan Dasar Pembentukan	9
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024	12
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2024	14
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Berdasarkan Golongan	17
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.....	19
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.....	20



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tabel 1.14	Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024	20
Tabel 1.15	Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 1.16	Rincian Belanja Transfer Tahun Anggraan 2024	23
Tabel 1.17	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	24
Tabel 1.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan	35
Tabel 1.19	Matriks Kegiatan Berdasarkan RKPD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024	69
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro	97
Tabel 2.2	Indikator Pembentukan IPM.....	99
Tabel 2.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2024	102
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020-2024	105
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 202-2024	108
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	132
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	133
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian Kinerja	135
Tabel 2.9	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	136
Tabel 2.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	137
Tabel 2.11	Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1	139
Tabel 2.12	Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2	147
Tabel 2.13	Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4	159
Tabel 2.15	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	172
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang	



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

	Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024	197
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	202
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024..	203
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024	203
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan	204
Tabel 4.5	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	204
Tabel 4.6	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pendidikan	207
Tabel 4.7	Permasalahan dan Solusi	210
Tabel 4.8	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	211
Tabel 4.9	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024..	212
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024	213
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan	213
Tabel 4.12	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	214
Tabel 4.13	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Kesehatan	214
Tabel 4.14	Permasalahan dan Solusi	215
Tabel 4.15	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	217
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	218
Tabel 4.17	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	218
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	219
Tabel 4.19	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	219
Tabel 4.20	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	220
Tabel 4.21	Permasalahan dan Solusi	221



Tabel 4.22	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 ...	223
Tabel 4.23	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	223
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	224
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat	225
Tabel 4.26	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	225
Tabel 4.27	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	225
Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi	226
Tabel 4.29	Target Pencapaian SPM Bidang Trantib Tahun 2024	228
Tabel 4.30	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantib Tahun 2024.....	230
Tabel 4.31	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Trantib Tahun 2024	232
Tabel 4.32	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Trantib	232
Tabel 4.33	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	233
Tabel 4.34	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan TRantib	236
Tabel 4.35	Permasalahan dan Solusi	236
Tabel 4.36	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	238
Tabel 4.37	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024	238
Tabel 4.38	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024	239
Tabel 4.39	Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial	239
Tabel 4.40	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	239
Tabel 4.41	Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Sosial	240
Tabel 4.42	Permasalahan dan Solusi	241
Tabel 4.43	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan	



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

	Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024	243
Tabel 4.44	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024	245
Tabel 4.45	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	245
Tabel 4.46	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	246
Tabel 4.47	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantib Tahun 2024.....	246
Tabel 4.48	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024.....	248



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024	98
Grafik 2.2	Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2020-2024	100
Grafik 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024	105
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	106
Grafik 2.6	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	111
Grafik 2.7	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024	144
Grafik 2.8	Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ...	145



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diilhami dari kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka upaya pemekaran wilayah di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi suatu hal yang wajar dan rasional untuk dilaksanakan. Dilatar belakangi oleh semangat perubahan dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, maka pada tanggal 30 Desember 1999 bertempat di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang. Pertemuan tersebut membedah tentang peluang pemekaran daerah setelah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara lain :

1. Membentuk daerah otonom baru yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu : Kecamatan Kaidipang, Bolangitang dan Bintauna.
2. Penyebutan nama daerah otonom baru yaitu BINADOW, yang merupakan akronim dari “ Bi = Bolangitang , Na = Bintauna, Dow = Kaidipang “.
3. Membentuk komite untuk mengorganisir, merencanakan bentuk perjuangan rakyat sampai terbentuknya daerah otonom baru BINADOW.

1.1.1. Penjelasan Umum

Pada tanggal 15 Februari tahun 2000 di Lapangan Boroko Kecamatan Kaidipang dilaksanakan apel akbar masyarakat Binadow untuk melakukan deklarasi pembentukan Kabupaten Binadow. Di tengah keanekaragaman pendapat masyarakat Bolaang Mongondow tentang Pemekaran Daerah, komite terus berjuang, kerja semakin terfokus, hal ini disebabkan karena begitu derasnya aspirasi masyarakat Binadow dalam membentuk daerah baru sebagai sebuah peluang untuk keluar dari lilitan pamarjinalan keterbelakangan dan kemiskinan.



Tiga tahun sejak deklarasi maka pada tanggal 15 Februari 2003 diperingati detik-detik deklarasi Kabupaten Binadow ke-3 dilapangan Inomasa Bintauna. Seiring dengan kebutuhan percepatan dan pemekaran daerah maka, masyarakat Binadow beraspirasi untuk melakukan pemekaran kecamatan diantaranya Kecamatan Sangkub sebagai hasil pemekaran Kecamatan Sang Tombolang, Kecamatan Bolangitang Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Bolangitang dan Kecamatan Pinogaluman sebagai hasil pemekaran dari Kaidipang. Calon Kabupaten Binadow yang sebelumnya terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan menjadi 6 (Enam) Kecamatan yaitu Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub.

Pada bulan Nopember 2003 Bupati Bolaang Mongondow membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Surat Keputusan Nomor 343 tahun 2003. Menyikapi aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam membentuk daerah otonom baru di Propinsi Sulawesi Utara, maka pemerintah pusat melalui Komisi 2 DPR-RI, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2004 melakukan observasi di wilayah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian pada tanggal 20 Oktober 2004 Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) melakukan kunjungan yang sama untuk melakukan observasi di wilayah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tanggal 6 Desember 2006 di Ruang Paripurna DPR-RI ketukan palu pimpinan sidang jatuh menandakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara syah menjadi sebuah daerah otonom baru. Setelah pengesahan di DPR-RI kemudian di keluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan disahkan Undang-undang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka tanggal 23 Mei 2007 ditetapkan



sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

b. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak pada posisi range $0^{\circ}30' 1^{\circ}0'$ LU dan $123^{\circ} 01' 26,4''$ BT - $124^{\circ} 01' 30,2''$ BT dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Laut Sulawesi
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 185.686 ha ($1.856,86 \text{ km}^2$) \pm 12,3% dari luas Sulawesi Utara. Terbagi atas 6 Kecamatan, 106 Desa dan 1 Kelurahan.

Perbatasan wilayah administratif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;



- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0°-30' 1°-0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12.30 persen dari luas Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir pantai Utara kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan Bitung disebelah timur dan Provinsi Gorontalo disebelah Barat. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi disebelah utara, sebelah timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah selatan dengan Provinsi Gorontalo dan sebelah barat dengan Provinsi Gorontalo. Secara administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 6 (enam) Kecamatan.

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana adalah 1.856,86 km² (12,13% dari luas Provinsi Sulawesi Utara) dan terbagi atas 6 Kecamatan. Kecamatan Sangkub merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 567,85 km² (30,58%), sedangkan Kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kaidipang yaitu 85,09 km² (5%). Persentase luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Km ²)	% TERHADAP LUAS KAB
1	Sangkub	Sangkub I	16	567,85	30,58 %
2	Bintauna	Kel. Bintauna	16	348,94	18,79 %
3	Bolangitang Timur	Bohabak	20	445,64	23,99 %
4	Bolangitang Barat	Bolangitang	18	293,75	15,81 %
5	Kaidipang	Boroko	15	85,09	4,58 %



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

6	Pinogaluman	Buko	22	115,59	6,22 %
	Jumlah		107	1.856,86	100,00

Sumber Data : Bagian Pemerintahan SETDA

Adapun kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar sampai berombak (25,03 persen), berombak sampai berbukit (40,22 persen) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di kecamatan Sangkub rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 m dpl dan desa Pangkusa hingga 50 m dpl. Di kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di desa Mome dan Huntuk s/d 8 m dpl. Di kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokodidek berbukit \pm 60 m dpl dan desa Biontong \pm 18 m dpl. Wilayah berbukit juga terdapat di desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang \pm 15 m dpl, dan desa-desa Komus satu dan Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman \pm 25 m dpl diatas permukaan laut. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: iklim, bahan induk, topografi, organisme, dan waktu. Diantara lima faktor tersebut, bahan induk dan topografi tampaknya berpengaruh lebih dominan, sehingga dijumpai sifat-sifat tanah yang bervariasi

Sebagai daerah yang terletak pada lintasan garis Katulistiwa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki suhu 20^o C - 32^o C dan mengenal dua musim, sebagaimana umumnya wilayah tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan yang selalu basah dan banyak hujan.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga akhir tahun 2024 berjumlah 88.002 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terbagi menurut jenis kelamin Laki-laki 45.175 jiwa dan Perempuan 42.827 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tersebar di 6 Kecamatan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RATIO
1.	Sangkub	5708	5398	11.106	1,057
2.	Bintauna	7822	7412	15.234	1,055
3.	Bolangitang Timur	8393	7851	16.244	1,069
4.	Bolangitang Barat	8733	8188	16.921	1,067
5.	Kaidipang	8136	7774	15.910	1,047
6.	Pinogaluman	6383	6204	12.587	1,029
	JUMLAH	45.175	42.827	88.002	1,055

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Struktur usia, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda terbanyak berada pada golongan usia produktif yaitu antara 25 tahun sampai dengan 59 tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	2790	2574	5364
5-9	3830	3423	7253
10-14	3839	3520	7359
15-19	3997	3872	7869
20-24	4338	4112	8450
25-29	3766	3510	7276
30-34	3510	3324	6834
35-39	2796	2722	5518
40-44	3227	3022	6249
45-49	3075	2984	6059
50-54	2899	2742	5641
55-59	2419	2210	4629
60-64	1787	1751	3538
65-69	1299	1241	2540
70-74	835	911	1746
>74	768	909	1677
Jumlah	45.175	42.827	88.002

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Jumlah penduduk menurut pendidikan akan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang



ditamatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024 yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Kondisi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024 paling banyak adalah tamatan SD/Sederajat dengan jumlah penduduk sebesar 23.216 jiwa atau sebesar 26,38% dari total penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penduduk yang belum/tidak bersekolah dan tamatan SLTA/Sederajat adalah proporsi penduduk terbesar selanjutnya dengan persentase sebesar 19,89% dan 19,84% dari total penduduk. Sementara itu proporsi penduduk menurut jenis pendidikan paling rendah adalah Strata III dengan persentase sebesar 0,005%.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	9206	8306	17.512
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	5527	4739	10.266
3.	Tamat SD/Sederajat	12.280	10.936	23.216
4.	SLTP/Sederajat	7136	7132	14.268
5.	SLTA/Sederajat	8942	8526	17.468
6.	Diploma I/II	114	257	371
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	222	560	782
8.	Diploma IV/Strata I	1683	2328	4011
9.	Strata II	62	41	103
10.	Strata III	3	2	5
	Jumlah	45.175	42.827	88.002

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



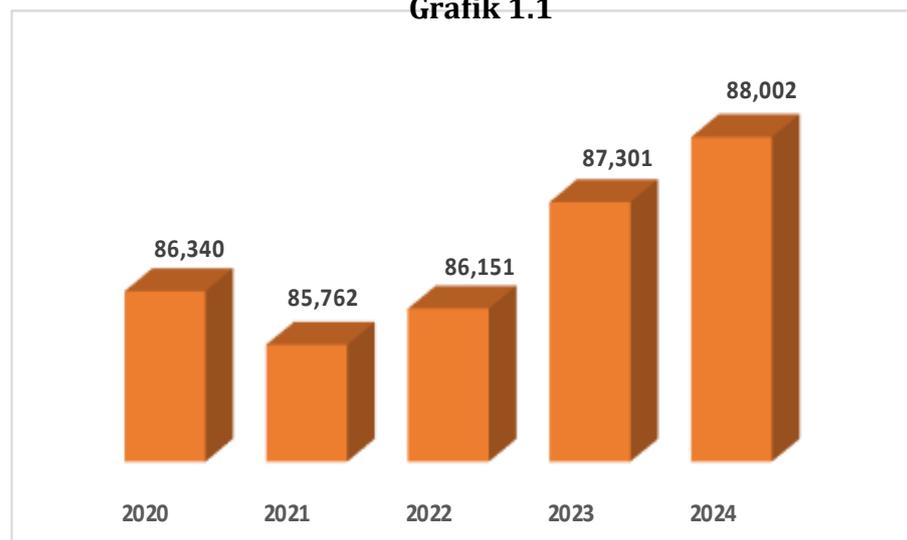
Tabel 1.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2020-2024

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sangkub	11.220	11.094	11.046	11.107	11.106
2.	Bintauna	15.059	14.969	14.981	15.207	15.234
3.	Bolangitang Timur	15.798	15.843	15.884	16.149	16.244
4.	Bolangitang Barat	16.642	16.546	16.564	16.700	16.921
5.	Kaidipang	15.341	15.207	15.494	15.730	15.910
6.	Pinogaluman	12.280	12.013	12.182	12.408	12.587
	JUMLAH	86.340	85.762	86.151	87.301	88.002

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,88% hal ini dikarenakan penyesuaian data dengan satu data Kementrian Dalam Negeri, pada grafik dibawah ini dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan.

Grafik 1.1



Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 kecamatan, 106 desa dan 1 Kelurahan. Pembagian wilayahnya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun
1.	Kecamatan Sangkub	-	16	49
2.	Kecamatan Bintauna	1	15	53
3.	Kecamatan Bolangitang Timur	-	20	88
4.	Kecamatan Bolangitang Barat	-	18	61
5.	Kecamatan Kaidipang	-	15	44
6.	Kecamatan Pinogaluman	-	22	60
	Jumlah	1	106	355

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan urusan pemerintahan dengan menetapkan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022.

Tabel 1.7 Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja berdasarkan Dasar Hukum Pembentukan

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perda No. 3 Tahun 2023
2	Sekretariat DPRD	Perda No. 3 Tahun 2023
3	Inspektorat Daerah	Perda No. 3 Tahun 2023
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Perda No. 3 Tahun 2023
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perda No. 3 Tahun 2023



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perda No. 3 Tahun 2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 8 Tahun 2010
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda No. 3 Tahun 2023
9	Dinas Kesehatan	Perda No. 3 Tahun 2023
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda No. 3 Tahun 2023
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Perda No. 3 Tahun 2023
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda No. 3 Tahun 2023
13	Dinas Sosial Daerah	Perda No. 3 Tahun 2023
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perda No. 3 Tahun 2023
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda No. 3 Tahun 2023
16	Dinas Ketahanan Pangan	Perda No. 3 Tahun 2023
17	Dinas Lingkungan Hidup	Perda No. 3 Tahun 2023
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 3 Tahun 2023
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda No. 3 Tahun 2023
20	Dinas Perhubungan	Perda No. 3 Tahun 2023
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Perda No. 3 Tahun 2023
22	Dinas Perdagangan	Perda No. 3 Tahun 2023
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No. 3 Tahun 2023
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perda No. 3 Tahun 2023
25	Dinas Perpustakaan Daerah	Perda No. 3 Tahun 2023
26	Dinas Perikanan	Perda No. 3 Tahun 2023
27	Dinas Pariwisata	Perda No. 3 Tahun 2023
28	Dinas Pertanian	Perda No. 3 Tahun 2023
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Perbup No. 19 Tahun 2008
30	Kantor Camat Sangkub	Perda No. 5 Tahun 2016
31	Kantor Camat Bintauna	Perda No. 5 Tahun 2016
32	Kantor Camat Bolangitang Timur	Perda No. 5 Tahun 2016
33	Kantor Camat Bolangitang Barat	Perda No. 5 Tahun 2016
34	Kantor Camat Kaidipang	Perda No. 5 Tahun 2016
35	Kantor Camat Pinogaluman	Perda No. 5 Tahun 2016
36	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Perbup No. 23 Tahun 2021
37	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	Perbup No. 18 Tahun 2023
38	Theurapetyc Feeding Center (TFC)	Perbup No. 40 Tahun 2017
39	Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Perbup No. 40 Tahun 2017
40	SKB Kecamatan Bintauna	Perbup No. 45 Tahun 2017
41	SKB Kecamatan Bolangitang Barat	Perbup No. 45 Tahun 2017
42	SKB Kecamatan Kaidipang	Perbup No. 45 Tahun 2017
43	SKB Kecamatan Pinogaluman	Perbup No. 45 Tahun 2017
44	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup No. 46 Tahun 2020
45	UPTD Persampahan	Perbup No. 42 Tahun 2017
46	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengolahan Air Limbah	Perbup No. 44 Tahun 2017
47	UPTD Puskesmas	Perbup No. 25 Tahun 2019

Sumber : Bagian Organisasi SETDA



Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, beberapa diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga Perangkat Daerah yang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian). Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Perdagangan (urusan wajib koperasi dan UKM ; urusan pilihan perdagangan ; urusan pilihan perindustrian);
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (urusan wajib tenaga kerja ; urusan pilihan transmigrasi);

Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebanyak 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (urusan pendidikan ; urusan kebudayaan);
2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (urusan perumahan, kawasan pemukiman ; urusan pertanahan);
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (urusan PP dan KB ; urusan PP dan PA);
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (urusan kearsipan ; urusan perpustakaan);

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Kesehatan (urusan kesehatan);
2. Rumah Sakit Umum Daerah (urusan kesehatan);
3. Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna (urusan kesehatan);
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (urusan pekerjaan umum);
5. Dinas Sosial Daerah (urusan sosial);



6. Satuan Polisi Pamong Praja (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
 7. Dinas Ketahanan Pangan (urusan pangan);
 8. Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup);
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemberdayaan masyarakat desa);
 11. Dinas Perhubungan (urusan perhubungan);
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal);
 13. Dinas Pemuda dan Olahraga (urusan kepemudaan dan olahraga);
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
- e. **Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 2880 orang. Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Sekretariat Daerah	98	62	36
2.	Sekretariat DPRD	18	12	6
3.	Inspektorat Daerah	44	17	27
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	24	13	11
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	39	17	22
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	40	15	25



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	
			L	P
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	16	8
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36	13	23
9.	Dinas Kesehatan	47	11	36
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51	24	27
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	20	12	8
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	18	13	5
13.	Dinas Sosial Daerah	24	10	14
14.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	9	11	20
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29	6	23
16.	Dinas Ketahanan Pangan	16	6	6
17.	Dinas Lingkungan Hidup	18	10	8
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	11	10
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	14	5
20.	Dinas Perhubungan	15	11	4
21.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	18	13	5
22.	Dinas Perdagangan	28	12	16
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	7	13
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	14	7	7
25.	Dinas Perpustakaan Daerah	13	4	9
26.	Dinas Perikanan	20	8	12
27.	Dinas Pariwisata	20	7	13
28.	Dinas Pertanian	134	79	55
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	6	2
30.	Kantor Camat Sangkub	23	12	11
31.	Kantor Camat Bintauna	24	14	10
32.	Kantor Camat Bolangitang Timur	19	11	8
33.	Kantor Camat Bolangitang Barat	13	6	7
34.	Kantor Camat Kaidipang	8	4	4
35.	Kantor Camat Pinogaluman	19	9	10
36.	Kelurahan Bintauna	11	8	3
37.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	186	39	147
38.	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	27	4	23
39.	UPTD Theurapetyc Feeding Center (TFC)	11	3	8
40.	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	10	2	8
41.	UPTD Puskesmas Se- Kab. Bolaang Mongondow Utara	454	66	388
42.	SKB Kecamatan Bintauna	6	1	5
43.	SKB Kecamatan Bolangitang	5	3	2
44.	SKB Kecamatan Kaidipang	4	2	2
45.	SKB Kecamatan Pinogaluman	3	2	1
46.	Sekolah Se- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1180	291	889
Jumlah		2880	924	1956

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan SDM

Pegawai pada kelompok Pejabat Struktural dan Fungsional, persentase terbesar terdapat pada Pejabat Fungsional dengan persentase sebesar 75,55% atau sebanyak 2.176 pegawai (Pegawai ASN termasuk Guru, dan Tenaga Kesehatan), sedangkan Pegawai pejabat struktural dengan jumlah



pegawai 244 atau sebesar 8,47 % dari total pegawai ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	17	32	49	98
2.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	5	8	18
3.	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	4	38	2	44
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6	10	8	24
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	15	0	24	39
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian	5	12	23	40
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	10	8	24
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pendidikan - Kebudayaan	9	7	20	36
9.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	7	18	23	48
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	12	30	51
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	- Perumahan Rakyat - Pertanahan	5	8	7	20
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9	2	7	18
13.	Dinas Sosial Daerah	Sosial	5	5	13	24
14.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	- Tenaga Kerja - Transmigrasi	4	7	9	20
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	12	10	29
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	4	5	7	16
17.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	5	7	6	18
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	8	6	21
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan	6	4	9	19



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Desa				
20.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	10	1	4	15
21.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	- Komunikasi dan Informatika - Statistik - Persandian	5	5	8	18
22.	Dinas Perdagangan	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan - Perindustrian	7	11	10	28
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	5	8	7	20
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	4	5	5	14
25.	Dinas Perpustakaan Daerah	- Perpustakaan - Kearsipan	5	4	4	13
26.	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	4	6	10	20
27.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	5	5	10	20
28.	Dinas Pertanian	Pertanian	6	105	23	134
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	4	0	4	8
30.	Kantor Kecamatan Sangkub	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	6	0	17	23
31.	Kantor Kecamatan Bintauna	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	7	0	17	24
32.	Kantor Kecamatan Bolangitang Timur	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	6	0	13	19
33.	Kantor Kecamatan Bolangitang Barat	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	6	7	0	13
34.	Kantor Kecamatan Kaidipang	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	5	0	3	8
35.	Kantor Kecamatan Pinogaluman	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	7	0	12	19
36.	Kantor Kelurahan Bintauna	Fungsi Penunjang Urusan Kewilayahan	5	0	6	11
37.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kesehatan	4	180	2	186
38.	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	Kesehatan	4	23	0	27
39.	UPTD Theurapetyc Feeding Center (TFC)	Kesehatan	2	9	0	11
40.	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	2	6	2	10
41.	UPTD Puskesmas	Kesehatan	0	428	6	434
42.	SKB Kecamatan Bintauna	Pendidikan	0	2	4	6
43.	SKB Kecamatan Bolangitang	Pendidikan	0	0	5	5
44.	SKB Kecamatan Kaidipang	Pendidikan	0	0	4	4
45.	SKB Kecamatan Pinogaluman	Pendidikan	0	0	3	3
46.	Sekolah Se- Kabupaten	Pendidikan	0	1175	5	1180



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Bolaang Mongondow Utara					
	Jumlah		244	2176	460	2880

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM

Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan berjumlah total 1.817 pegawai atau 63,09% dari jumlah seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan rincian Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 1180 pegawai atau 40,97 % dan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 637 pegawai atau 22,12 %.

Tingkat Pendidikan dan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai, maka pencapaian terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan mampu untuk dicapai. Jumlah ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 2880 pegawai atau 93,85 % memiliki tingkat pendidikan tinggi (pegawai dengan pendidikan tinggi ke atas) sedangkan 6,14 % atau 177 pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/Dasar kebawah.

Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

No	SKPD	PENDIDIKAN										Jumlah ASN
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	
1.	Sekretariat Daerah	-	-	7	-	-	11	3	63	12	2	98
2.	Sekretariat DPRD	-	-	1	-	-	3	-	13	1	-	18
3.	Inspektorat Daerah	-	-	3	-	-	-	-	37	4	-	44
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	-	-	1	3	18	2	-	25
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	1	-	-	13	1	21	3	-	39
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-	6	1	29	4	-	40
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1	-	1	1	-	21	-	-	25
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	2	-	2	1	-	21	10	-	36
9.	Dinas Kesehatan	-	-	1	-	-	8	1	32	6	-	48
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	3	-	-	5	-	40	3	-	51
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	1	-	2	15	2	-	20
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	3	-	1	2	-	10	2	-	18
13.	Dinas Sosial Daerah	-	-	2	-	-	2	-	18	2	-	24
14.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	2	-	-	-	-	17	1	-	20
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	-	-	3	5	19	1	-	29
16.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	1	-	13	2	-	16
17.	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	2	-	10	3	2	18
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	3	-	-	-	-	16	2	-	21
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	2	-	-	1	1	13	1	-	19
20.	Dinas Perhubungan	-	-	2	-	-	2	-	10	1	-	15



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	SKPD	PENDIDIKAN									Jumlah ASN	
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2		S3
21.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	1	-	-	3	-	13	-	1	18
22.	Dinas Perdagangan	-	-	4	-	-	2	-	17	5	-	28
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	1	-	-	1	1	13	4	-	20
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	1	-	-	-	-	11	2	-	14
25.	Dinas Perpustakaan Daerah	-	-	1	-	1	1	-	8	2	-	13
26.	Dinas Perikanan	-	-	1	-	-	3	-	15	1	-	20
27.	Dinas Pariwisata	-	-	2	-	-	1	2	13	2	-	20
28.	Dinas Pertanian	-	-	13	-	-	2	11	104	2	1	133
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-	8
30.	Kantor Camat Sangkub	-	1	6	-	-	-	-	16	-	-	23
31.	Kantor Camat Bintauna	-	-	6	-	-	2	-	12	4	-	24
32.	Kantor Camat Bolangitang Timur	-	-	5	1	-	3	-	10	-	-	19
33.	Kantor Camat Bolangitang Barat	-	-	3	-	1	1	-	8	-	-	13
34.	Kantor Camat Kaidipang	-	-	3	-	-	1	-	4	-	-	8
35.	Kantor Camat Pinogaluman	-	-	4	-	-	-	-	14	1	-	19
36.	Kelurahan Bintauna	1	-	3	-	-	1	-	5	1	-	11
37.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	-	-	-	-	-	89	8	81	8	-	186
38.	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	-	-	-	-	-	7	1	16	3	-	27
39.	UPTD Theurapetyc Feeding Center (TFC)	-	-	1	-	-	7	-	3	-	-	11
40.	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	10
41.	UPTD Puskesmas Se- Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	6	-	-	222	33	162	11	-	434
42.	SKB Kecamatan Bintauna	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	6
43.	SKB Kecamatan Bolangitang	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	5
44.	SKB Kecamatan Kaidipang	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4
45.	SKB Kecamatan Pinogaluman	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3
46.	Sekolah Se- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	-	1	75	1	45	4	1	1035	18	-	1180
	Jumlah	1	4	172	3	53	419	77	2017	128	6	2880

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan SDM

Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Golongan dengan persentase terbesar terdapat pada pegawai Golongan III dan IX sebesar 74,96 %, diikuti Golongan II, V dan VII sebesar 13,09 % kemudian Golongan IV dan X sebesar 11,91 % dan Golongan I sebesar 0,03%.

Tabel 1.11 Jumlah Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

No	Perangkat Daerah	Golongan							
		PNS					PPPK		
		I	II	III	IV	V	VII	IX	X
1.	Sekretariat Daerah	-	7	66	17	-	2	6	-
2.	Sekretariat DPRD	-	2	12	3	-	1	-	-
3.	Inspektorat Daerah	-	-	37	6	-	-	1	-
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	1	19	1	-	-	3	-
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	10	28	1	-	-	-	-
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	3	27	4	-	1	5	-
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	16	3	-	-	4	-
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1	27	7	-	-	1	-
9.	Dinas Kesehatan	-	-	32	12	-	-	4	-
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	3	40	2	-	-	6	-
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	15	3	-	-	2	-
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	4	8	4	-	-	2	-



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	Golongan							
		PNS				PPPK			
		I	II	III	IV	V	VII	IX	X
13.	Dinas Sosial Daerah	-	3	17	4	-	-	-	-
14.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	2	12	3	-	-	3	-
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	25	2	-	-	2	-
16.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	12	4	-	-	-	-
17.	Dinas Lingkungan Hidup	-	1	11	4	-	-	2	-
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3	12	3	-	-	3	-
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	2	15	2	-	-	-	-
20.	Dinas Perhubungan	-	1	9	4	1	-	-	-
21.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	2	12	3	-	-	1	-
22.	Dinas Perdagangan	-	2	21	3	1	-	1	-
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2	13	2	-	-	3	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	1	8	5	-	-	-	-
25.	Dinas Perpustakaan Daerah	-	1	8	3	-	-	1	-
26.	Dinas Perikanan	-	-	14	4	-	-	2	-
27.	Dinas Pariwisata	-	1	14	4	-	-	1	-
28.	Dinas Pertanian	-	11	104	7	-	1	11	-
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1	6	1	-	-	-	-
30.	Kantor Camat Sangkub	-	6	16	1	-	-	-	-
31.	Kantor Camat Bintauna	-	5	17	2	-	-	-	-
32.	Kantor Camat Bolangitang Timur	-	5	12	2	-	-	-	-
33.	Kantor Camat Bolangitang Barat	-	4	8	1	-	-	-	-
34.	Kantor Camat Kaidipang	-	3	5	-	-	-	-	-
35.	Kantor Camat Pinogaluman	-	4	14	1	-	-	-	-
36.	Kantor Kelurahan Bintauna	1	2	7	1	-	-	-	-
37.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	-	37	86	6	-	31	25	1
38.	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	-	2	21	4	-	-	-	-
39.	UPTD Theurapetyc Feeding Center (TFC)	-	4	7	-	-	-	-	-
40.	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	-	3	7	-	-	-	-	-
41.	UPTD Puskesmas Se- Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	95	254	12	-	29	43	1
42.	SKB Kecamatan Bintauna	-	2	4	-	-	-	-	-
43.	SKB Kecamatan Bolangitang	-	1	3	1	-	-	-	-
44.	SKB Kecamatan Kaidipang	-	1	3	-	-	-	-	-
45.	SKB Kecamatan Pinogaluman	-	2	1	-	-	-	-	-
46.	Sekolah Guru Se- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	-	69	560	189	-	-	362	-
Jumlah		1	310	1665	341	2	65	494	2

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.647.230.677.253,- hingga akhir tahun realisasi anggaran sebesar Rp. 631,270,936,420.37 atau 97,53 %.



Pada tabel 1.11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target Pendapatan Daerah telah tercapai, bahkan terdapat capaian Pendapatan Daerah melebihi dari nilai yang telah ditetapkan.

Tabel 1.12 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.465.091.599,00	11.996.437.571,94	51,12
	Pajak Daerah	6.020.000.000,00	6.812.307.449,00	113,16
	Retribusi Daerah	14.675.091.599,00	1.302.269.593,00	8,87
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	960.030.536,00	120
	Lain-lain PAD yang Sah	1.970.000.000,00	2.921.829.993,94	148,32
II.	PENDAPATAN TRANSFER	618.189.879.534,00	604.204.176.374,00	97,74
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	592.886.434.000,00	585.897.829.040,00	98,82
	Dana Perimbangan	488.457.355.000,00	481.468.750.040,00	98,57
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.296.364.000,00	15.190.104.000,00	123,53
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	390.165.719.000,00	388.482.366.694,00	99,57
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.831.961.000,00	33.863.868.520,00	97,22
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.163.311.000,00	43.932.410.826,00	85,87
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	104.429.079.000,00	104.429.079.000,00	100
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0
	Dana Desa	79.257.020.000,00	79.257.020.000,00	100
	Insentif Fiskal	25.172.059.000,00	25.172.059.000,00	100
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35
	Pendapatan Bagi Hasil	25.303.445.534,00	18.306.347.334,00	72,35
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.575.706.120,00	15.070.322.474,43	270,29
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	5.575.706.120,00	15.070.322.474,43	270,29
	TOTAL PENDAPATAN	647.230.677.253,00	631.270.936.420,37	97,53

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)

2) Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 682.209.615.880,- dengan realisasi sebesar Rp. 644.087.484.705,- atau 94,41%. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Daerah terlihat pa tabel berikut:



Tabel 1.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	460.316.078.962,00	93,79
Belanja Modal	69.897.492.461,00	63.593.945.435,00	90,98
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	120,027,868,308.00	99,62
Total Belanja	682.209.615.880,94	644.087.484.705,00	94,41

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Belanja Daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 dapat direalisasi sebesar 94,41 %.

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional Pemerintah Daerah. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan dianggarkan pada semua Perangkat Daerah. Belanja Operasi diklasifikasikan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pencapaian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 490.820.470.119,94 dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 460.316.078.962,- atau 93,79%.

Tabel 1.14 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI	490.820.470.119,94	460.316.078.962,00	93,79
1 Belanja Pegawai	258.781.833.472,44	250.105.297.072,00	96,65
2 Belanja Barang dan Jasa	192.462.797.875,50	171.692.615.100,00	89,21
3 Belanja Subsidi	70.000.000,00	40.000.000,00	57,14
4 Belanja Hibah	35.474.665.520,00	34.642.611.320,00	97,65



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja Bantuan Sosial	4.031.173.252,00	3.835.555.470,00	95,15

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 258.781.833.472,44,- realisasi sebesar Rp. 250.105.297.072,- atau 96,65%.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, bea siswa pendidikan, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 192.462.797.875,50 realisasi sebesar Rp. 171.692.615.100,- atau 89,21%.

Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Anggaran Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp. 35.474.665.520,00,- realisasi sebesar Rp. 34.642.611.320,- atau 97,65%.

Belanja bantuan Sosial adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 4,031,173,252,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,835,555,470,- atau 95,15%.

Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 69,897,492,461,- dan terealisasikan sebesar Rp. 63,593,945,435,- atau 90,98%.

Tabel 1.15 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA MODAL	69.897.492.461,00	63,593,945,435.00	90,98



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.142.775.551,00	10.561.192.320,00	94,78
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.921.687.003,00	21.444.550.538,00	93,56
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.504.317.023,00	29.514.039.337,00	88,09
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.703.712.884,00	1.550.853.740,00	91,03
5	Belanja Modal Aset Lainnya	625.000.000,00	523.309.500,00	83,73

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi belanja tak terduga tahun 2024 sebesar Rp. 1,000,000,000,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 149,592,000,- atau 14,96.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 120,491,653,300,- dan realisasi sebesar Rp. 120,027,868,308,- atau 99,62%, dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah; b) Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah.

Tabel 1.16 Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BELANJA TRANSFER	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	538.425.000,00	472.661.424,00	87,79
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	450.000.000,00	51.978.584,00	11,55
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)



3) Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 34.978.938.627,94

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 34.978.938.627,94 dan realisasi sebesar Rp. 34.978.938.627,94 atau 100 %.

4) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.17 Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	336.950.602.208,00	310.665.536.515,00	92,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	147.600.598.054,00	135.986.003.644,00	92,13
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	147.600.598.054,00	135.986.003.644,00	92,13
Belanja Daerah	147.600.598.054,00	135.986.003.644,00	92,13
Belanja Operasi	129.280.742.407,00	118.859.828.560,00	91,94
Belanja Pegawai	104.837.685.654,00	98.442.168.775,00	93,89
Belanja Barang dan Jasa	22.018.126.753,00	18.064.225.785,00	82,04
Belanja Hibah	2.424.930.000,00	2.353.434.000,00	97,05
Belanja Modal	18.319.855.647,00	17.126.175.084,00	93,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.572.329.219,00	2.548.451.319,00	99,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.933.529.028,00	13.835.143.365,00	92,64



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	813.997.400,00	742.580.400,00	91,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	122.342.395.793,00	113.425.060.444,00	92,71
DINAS KESEHATAN	83.997.729.643,00	78.489.711.943,00	93,44
Belanja Daerah	83.997.729.643,00	78.489.711.943,00	93,44
Belanja Operasi	78.993.023.476,00	73.575.624.083,00	93,14
Belanja Pegawai	52.263.830.660,00	51.923.002.378,00	99,35
Belanja Barang dan Jasa	26.679.192.816,00	21.628.010.905,00	81,07
Belanja Hibah	50.000.000,00	24.610.800,00	49,22
Belanja Modal	5.004.706.167,00	4.914.087.860,00	98,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.178.845.435,00	4.095.290.000,00	98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.860.732,00	818.797.860,00	99,14
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	17.164.882.510,00	17.007.651.526,00	99,08
Belanja Daerah	17.164.882.510,00	17.007.651.526,00	99,08
Belanja Operasi	16.802.587.570,00	16.656.167.833,00	99,13
Belanja Barang dan Jasa	16.802.587.570,00	16.656.167.833,00	99,13
Belanja Modal	362.294.940,00	351.483.693,00	97,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.794.940,00	201.494.585,00	95,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.500.000,00	149.989.108,00	99
RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA	1.461.894.629,00	1.435.950.809,00	98,23
Belanja Daerah	1.461.894.629,00	1,435,950,809,00	98,23
Belanja Operasi	1.288.436.829,00	1.262.660.809,00	98
Belanja Barang dan Jasa	1.288.436.829,00	1.262.660.809,00	98
Belanja Modal	173.457.800,00	173.290.000,00	99,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.457.800,00	173.290.000,00	99,90
PUSKESMAS	18.847.378.345,00	15.662.580.722,00	83,10
Belanja Daerah	18.847.378.345,00	15.662.580.722,00	83,10
Belanja Operasi	18.390.073.562,00	15.280.683.743,00	83,10
Belanja Barang dan Jasa	18.390.073.562,00	15.280.683.743,00	83,10
Belanja Modal	457.304.783,00	381.896.979,00	83,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.304.783,00	381.896.979,00	83,51
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	484.798.298,00	462.806.522,00	95,46
Belanja Daerah	484.798.298,00	462.806.522,00	95,46
Belanja Operasi	484.798.298,00	462.806.522,00	95,46
Belanja Barang dan Jasa	484.798.298,00	462.806.522,00	95,46
THERAPEUTIC FEEDING CENTRE	385.712.368,00	366.358.922,00	94,98
Belanja Daerah	385.712.368,00	366.358.922,00	94,98
Belanja Operasi	385.712.368,00	366.358.922,00	94,98
Belanja Barang dan Jasa	385.712.368,00	366.358.922,00	94,98
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	48.812.853.861,00	44.318.983.018,00	90,79



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.812.853.861,00	44.318.983.018,00	90,79
Belanja Daerah	48.812.853.861,00	44.318.983.018,00	90,79
Belanja Operasi	10.576.451.811,00	10.250.579.583,00	96,92
Belanja Pegawai	4.207.342.743,00	4.178.871.865,00	99,32
Belanja Barang dan Jasa	6.369.109.068,00	6.071.707.718,00	95,33
Belanja Modal	38.236.402.050,00	34.068.403.435,00	89,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.200.000,00	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.138.114.691,00	4.935.037.892,00	96,05
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.616.371.375,00	28.863.270.003,00	88,49
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	390.715.984,00	270.095.540,00	69,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.123.527.887,00	6.022.203.034,00	98,35
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.123.527.887,00	6.022.203.034,00	98,35
Belanja Daerah	6.123.527.887,00	6.022.203.034,00	98,35
Belanja Operasi	5.345.683.193,00	5.276.232.634,00	98,70
Belanja Pegawai	1.920.622.021,00	1.899.853.420,00	98,92
Belanja Barang dan Jasa	1.020.061.172,00	979.102.564,00	95,98
Belanja Bantuan Sosial	2.405.000.000,00	2.397.276.650,00	99,68
Belanja Modal	777.844.694,00	745.970.400,00	95,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.845.194,00	49.150.000,00	83,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	437.000.000,00	415.724.000,00	95,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	281.999.500,00	281.096.400,00	99,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.540.357.538,00	6.609.712.756,00	87,66
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.817.110.122,00	3.588.385.190,00	94,01
Belanja Daerah	3.817.110.122,00	3.588.385.190,00	94,01
Belanja Operasi	3.803.357.222,00	3.574.735.190,00	93,99
Belanja Pegawai	1.796.854.062,00	1.748.699.070,00	97,32
Belanja Barang dan Jasa	2.006.503.160,00	1.826.036.120,00	91,01
Belanja Modal	13.752.900,00	13.650.000,00	99,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.752.900,00	13.650.000,00	99,25
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.723.247.416,00	3.021.327.566,00	81,15
Belanja Daerah	3.723.247.416,00	3.021.327.566,00	81,15
Belanja Operasi	3.417.487.416,00	2.774.186.566,00	81,18
Belanja Pegawai	2.223.991.982,00	2.204.259.096,00	99,11
Belanja Barang dan Jasa	1.193.495.434,00	569.927.470,00	47,75



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Modal	305.760.000,00	247.141.000,00	80,83
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.760.000,00	99.400.000,00	63,82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	147.741.000,00	98,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.530.869.075,00	4.303.573.619,00	94,98
DINAS SOSIAL DAERAH	4.530.869.075,00	4.303.573.619,00	94,98
Belanja Daerah	4.530.869.075,00	4.303.573.619,00	94,98
Belanja Operasi	4.482.507.675,00	4.256.561.619,00	94,96
Belanja Pegawai	2.376.186.311,00	2.351.820.028,00	98,97
Belanja Barang dan Jasa	1.205.148.112,00	1.096.462.771,00	90,98
Belanja Bantuan Sosial	901.173.252,00	808.278.820,00	89,69
Belanja Modal	48.361.400,00	47.012.000,00	97,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.611.400,00	28.315.000,00	95,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.750.000,00	18.697.000,00	99,72
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.420.183.272,00	47.160.863.959,00	93,54
URUSAN PEMERINTAHANN BIDANG TENAGA KERJA	3.296.730.280,00	3.171.462.600,00	96,20
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	3.296.730.280,00	3.171.462.600,00	96,20
Belanja Daerah	3.296.730.280,00	3.171.462.600,00	96,20
Belanja Operasi	3.296.730.280,00	3.171.462.600,00	96,20
Belanja Pegawai	1.830.719.242,00	1.791.143.535,00	97,84
Belanja Barang dan Jasa	1.441.011.038,00	1.355.319.065,00	94,05
Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.565.398.470,00	1.443.887.535,00	92,24
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.565.398.470,00	1.443.887.535,00	92,24
Belanja Daerah	1.565.398.470,00	1.443.887.535,00	92,24
Belanja Operasi	1.445.065.470,00	1.323.697.535,00	91,60
Belanja Barang dan Jasa	1.045.065.470,00	923.697.535,00	88,39
Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	100
Belanja Modal	120.333.000,00	120.190.000,00	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.333.000,00	120.190.000,00	99,88
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.535.412.022,00	2.401.101,585,00	94,70
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.535.412.022,00	2.401.101,585,00	94,70
Belanja Daerah	2.535.412.022,00	2.401.101,585,00	94,70
Belanja Operasi	2.535.412.022,00	2.401.101,585,00	94,70
Belanja Pegawai	1.635.535.582,00	1.618.019.051,00	98,93
Belanja Barang dan Jasa	899.876.440,00	783.082.534,00	87,02



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	49.461.850,00	48.903.000,00	98,87
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	49.461.850,00	48.903.000,00	98,87
Belanja Daerah	49.461.850,00	48.903.000,00	98,87
Belanja Operasi	49.461.850,00	48.903.000,00	98,87
Belanja Barang dan Jasa	49.461.850,00	48.903.000,00	98,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.358.578.860,00	5.176.835.731,00	96,61
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.358.578.860,00	5.176.835.731,00	96,61
Belanja Daerah	5.358.578.860,00	5.176.835.731,00	96,61
Belanja Operasi	5.330.978.860,00	5.176.835.731,00	97,11
Belanja Pegawai	1.875.158.422,00	1.838.441.933,00	98,04
Belanja Barang dan Jasa	3.455.820.438,00	3.338.393.798,00	96,60
Belanja Modal	27.600.000,00	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000,00	0,00	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL	3.689.721.527,00	3.625.362.932,00	98,26
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL	3.689.721.527,00	3.625.362.932,00	98,26
Belanja Daerah	3.689.721.527,00	3.625.362.932,00	98,26
Belanja Operasi	3.160.002.965,00	3.098.162.932,00	98,04
Belanja Pegawai	2.051.978.030,00	2.031.444.977,00	99
Belanja Barang dan Jasa	1.108.024.935,00	1.066.717.955,00	96,27
Belanja Modal	529.718.562,00	527.200.000,00	99,52
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.718.562,00	527.200.000,00	99,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.687.018.120,00	3.533.562.294,00	99,84
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.687.018.120,00	3.533.562.294,00	99,84
Belanja Daerah	3.687.018.120,00	3.533.562.294,00	99,84
Belanja Operasi	3.687.018.120,00	3.533.562.294,00	99,84
Belanja Pegawai	1.996.332.280,00	1.976.695.089,00	99,02
Belanja Barang dan Jasa	865.424.140,00	791.864.205,00	91,50
Belanja Hibah	825.261.700,00	765.003.000,00	92,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.512.242.111,00	6.831.478.753,00	90,94
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.512.242.111,00	6.831.478.753,00	90,94
Belanja Daerah	7.512.242.111,00	6.831.478.753,00	90,94
Belanja Operasi	6.739.329.111,00	6.071.527.390,00	90,09
Belanja Pegawai	2.783.982.913,00	2.744.259.745,00	98,57



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Barang dan Jasa	3.955.346.198,00	3.327.267.645,00	84,12
Belanja Modal	772.913.000,00	759.951.363,00	98,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.913.000,00	630.133.500,00	98,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	129.817.863,00	99,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.540.643.012,00	2.353.864.335,00	92,65
DINAS PERHUBUNGAN	2.540.643.012,00	2.353.864.335,00	92,65
Belanja Daerah	2.540.643.012,00	2.353.864.335,00	92,65
Belanja Operasi	2.540.643.012,00	2.353.864.335,00	92,65
Belanja Pegawai	1.559.422.178,00	1.538.044.569,00	98,63
Belanja Barang dan Jasa	981.220.834,00	815.819.766,00	83,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.002.788.873,00	3.772.522.717,00	94,25
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	4.002.788.873,00	3.772.522.717,00	94,25
Belanja Daerah	4.002.788.873,00	3.772.522.717,00	94,25
Belanja Operasi	3.956.509.273,00	3.772.522.717,00	95,35
Belanja Pegawai	1.863.628.471,00	1.809.413.151,00	97,09
Belanja Barang dan Jasa	1.992.880.802,00	1.913.109.566,00	96
Belanja Hibah	100.000.000,00	50.000.000,00	50
Belanja Modal	46.279.600,00	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.279.600,00	0,00	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.953.817.571,00	2.918.851.394,00	98,82
DINAS PERDAGANGAN	2.953.817.571,00	2.918.851.394,00	98,82
Belanja Daerah	2.953.817.571,00	2.918.851.394,00	98,82
Belanja Operasi	2.953.817.571,00	2.918.851.394,00	98,82
Belanja Pegawai	2.609.692.586,00	2.577.314.589,00	98,76
Belanja Barang dan Jasa	249.124.985,00	246.536.805,00	98,96
Belanja Bantuan Sosial	95.000.000,00	95.000.000,00	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.120.383.850,00	2.997.177.108,00	96,05
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.120.383.850,00	2.997.177.108,00	96,05
Belanja Daerah	3.120.383.850,00	2.997.177.108,00	96,05
Belanja Operasi	2.934.589.200,00	2.827.699.108,00	96,36
Belanja Pegawai	2.048.752.735,00	1.996.561.848,00	97,45
Belanja Barang dan Jasa	885.836.465,00	831.137.260,00	93,83
Belanja Modal	185.794.650,00	169.478.000,00	91,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.053.300,00	98.738.000,00	85,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.741.350,00	70.740.000,00	99,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.704.078.205,00	4.890.798.621,00	85,74



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.704.078.205,00	4.890.798.621,00	85,74
Belanja Daerah	5.704.078.205,00	4.890.798.621,00	85,74
Belanja Operasi	5.704.078.205,00	4.890.798.621,00	85,74
Belanja Pegawai	1.464.064.469,00	1.444.033.933,00	98,63
Belanja Barang dan Jasa	2.840.013.736,00	2.646.764.688,00	93,20
Belanja Hibah	1.400.000.000,00	800.000.000,00	57,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	11.200.000,00	0,00	0
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	11.200.000,00	0,00	0
Belanja Daerah	11.200.000,00	0,00	0
Belanja Operasi	11.200.000,00	0,00	0
Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	0,00	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	78.000,00	0,00	0
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	78.000,00	0,00	0
Belanja Daerah	78.000,00	0,00	0
Belanja Operasi	78.000,00	0,00	0
Belanja Barang dan Jasa	78.000,00	0,00	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	81,94
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	81,94
Belanja Daerah	1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	81,94
Belanja Operasi	1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	81,94
Belanja Barang dan Jasa	1.640.980.630,00	1.344.616.516,00	81,94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	825.968.360,00	794.551.264,00	96,20
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	825.968.360,00	794.551.264,00	96,20
Belanja Daerah	825.968.360,00	794.551.264,00	96,20
Belanja Operasi	372,409,770,00	349,152,014,00	93,75
Belanja Barang dan Jasa	372,409,770,00	349,152,014,00	93,75
Belanja Modal	453.558.590,00	445.399.250,00	98,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	394.558.590,00	386.799.250,00	98,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.000.000,00	58.600.000,00	99,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.925.681.531,00	1.855.887.574,00	96,38
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	1.925.681.531,00	1.855.887.574,00	96,38
Belanja Daerah	1.925.681.531,00	1.855.887.574,00	96,38
Belanja Operasi	1.921.685.939,00	1.855.887.574,00	96,38
Belanja Pegawai	1.448.111.241,00	1.416.618.484,00	97,83
Belanja Barang dan Jasa	473.574.698,00	439.269.090,00	92,76
Belanja Modal	3.995.592,00	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.995.592,00	0,00	0



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.482.223.530,00	29.407.457.853,00	93,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.966.987.001,00	3.420.036.308,00	86,21
DINAS PERIKANAN	3.966.987.001,00	3.420.036.308,00	86,21
Belanja Daerah	3.966.987.001,00	3.420.036.308,00	86,21
Belanja Operasi	3.966.987.001,00	3.420.036.308,00	86,21
Belanja Pegawai	1.917.901.806,00	1.872.474.034,00	97,63
Belanja Barang dan Jasa	2.049.085.195,00	1.547.562.274,00	75,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.333.363.157,00	3.127.447.301,00	93,82
DINAS PARIWISATA	3.333.363.157,00	3.127.447.301,00	93,82
Belanja Daerah	3.333.363.157,00	3.127.447.301,00	93,82
Belanja Operasi	3.325.363.157,00	3.119.447.301,00	93,81
Belanja Pegawai	1.883.700.787,00	1.860.058.843,00	98,74
Belanja Barang dan Jasa	1.441.662.370,00	1.259.388.458,00	87,36
Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.285.627.844,00	21.347.204.098,00	95,79
DINAS PERTANIAN	22.285.627.844,00	21.347.204.098,00	95,79
Belanja Daerah	22.285.627.844,00	21.347.204.098,00	95,79
Belanja Operasi	21.498.171.776,00	20.564.119.361,00	95,66
Belanja Pegawai	10.826.684.305,00	10.769.802.322,00	99,47
Belanja Barang dan Jasa	10.671.487.471,00	9.794.317.039,00	91,78
Belanja Modal	787.456.068,00	783.084.737,00	99,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.420.068,00	403.239.187,00	98,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.036.000,00	379.845.550,00	99,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.789.104.428,00	1.412.035.946,00	78,92
DINAS PERDAGANGAN	1.789.104.428,00	1.412.035.946,00	78,92
Belanja Daerah	1.789.104.428,00	1.412.035.946,00	78,92
Belanja Operasi	992.006.844,00	957.044.763,00	96,48
Belanja Barang dan Jasa	992.006.844,00	957.044.763,00	96,48
Belanja Modal	797.097.584,00	454.991.183,00	57,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.070.000,00	37.351.000,00	26,11
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	654.027.584,00	417.640.183,00	63,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	56.917.800,00	55.480.000,00	97,47
DINAS PERDAGANGAN	56.917.800,00	55.480.000,00	97,47
Belanja Daerah	56.917.800,00	55.480.000,00	97,47
Belanja Operasi	56.917.800,00	55.480.000,00	97,47
Belanja Barang dan Jasa	16.917.800,00	15.480.000,00	91,50
Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	100



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.223.300,00	45.254.200,00	90,11
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	50.223.300,00	45.254.200,00	90,11
Belanja Daerah	50.223.300,00	45.254.200,00	90,11
Belanja Operasi	50.223.300,00	45.254.200,00	90,11
Belanja Barang dan Jasa	50.223.300,00	45.254.200,00	90,11
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	63.011.827.608,00	60.652.722.384,00	96,26
SEKRETARIAT DAERAH	37.066.419.706,00	35.640.708.439,00	96,15
Belanja Daerah	37.066.419.706,00	35.640.708.439,00	96,15
Belanja Operasi	35.676.368.446,00	34.320.083.539,00	96,20
Belanja Pegawai	10.706.694.680,00	10.538.818.930,00	98,43
Belanja Barang dan Jasa	22.519.673.766,00	21.481.264.609,00	95,39
Belanja Subsidi	70.000.000,00	40.000.000,00	57,14
Belanja Hibah	1.790.000.000,00	1.765.000.000,00	98,60
Belanja Bantuan Sosial	590.000.000,00	495.000.000,00	83,90
Belanja Modal	1.390.051.260,00	1.320.624.900,00	95,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.403.900,00	649.646.500,00	95,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	556.647.360,00	521.183.900,00	93,63
Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.794.500,00	99,86
SEKRETARIAT DPRD	25.945.407.902,00	25.012.013.945,00	96,40
Belanja Daerah	25.945.407.902,00	25.012.013.945,00	96,40
Belanja Operasi	25.870.979.402,00	25.012.013.945,00	96,40
Belanja Pegawai	9.805.948.564,00	9.370.931.581,00	95,56
Belanja Barang dan Jasa	16.065.030.838,00	15.641.082.364,00	97,36
Belanja Modal	74.428.500,00	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.428.500,00	0,00	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	151.229.194.637,00	147.386.927.194,00	97,46
PERENCANAAN	5.281.842.537,00	4.813.183.347,00	91,13
SEKRETARIAT DAERAH	169.500.000,00	168.835.000,00	99,61
Belanja Daerah	169.500.000,00	168.835.000,00	99,61
Belanja Operasi	169.500.000,00	168.835.000,00	99,61
Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	168.835.000,00	99,61
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.112.342.537,00	4.644.348.347,00	90,85
Belanja Daerah	5.112.342.537,00	4.644.348.347,00	90,85
Belanja Operasi	4.840.690.787,00	4.477.098.347,00	92,49
Belanja Pegawai	2.306.618.239,00	2.280.276.048,00	98,86
Belanja Barang dan Jasa	2.534.072.548,00	2.196.822.299,00	86,69
Belanja Modal	271.651.750,00	167.250.000,00	61,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.651.750,00	68.460.000,00	95,55



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	98.790.000,00	49,40
KEUANGAN	138.564.130.932,00	135.890.944.013,00	98,07
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	138.564.130.932,00	135.890.944.013,00	98,07
Belanja Daerah	138.564.130.932,00	135.890.944.013,00	98,07
Belanja Operasi	16.691.582.022,00	15.333.531.705,00	91,86
Belanja Pegawai	10.324.555.185,00	9.917.225.476,00	96,05
Belanja Barang dan Jasa	6.367.026.836,00	5.416.306.229,00	85,07
Belanja Modal	380.895.610,00	379.952.000,00	99,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.895.610,00	50.198.000,00	98,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	129.954.000,00	99,96
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	149.592.000,00	14,96
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	120.027.868.308,00	99,62
Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00	524.640.008,00	53,08
Belanja Bantuan Keuangan	119.503.228.300,00	119.503.228.300,00	100
KEPEGAWAIAN	5.202.684.568,00	4.634.714.042,00	89,08
BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN DAN SDM	5.202.684.568,00	4.634.714.042,00	89,08
Belanja Daerah	5.202.684.568,00	4.634.714.042,00	89,08
Belanja Operasi	5.202.684.568,00	4.634.714.042,00	89,08
Belanja Pegawai	2.672.746.740,00	2.643.113.911,00	98,89
Belanja Barang dan Jasa	2.529.937.828,00	1.991.600.131,00	78,72
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	260.779.050,00	226.873.432,00	86,99
BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN DAN SDM	260.779.050,00	226.873.432,00	86,99
Belanja Daerah	260.779.050,00	226.873.432,00	86,99
Belanja Operasi	260.779.050,00	226.873.432,00	86,99
Belanja Barang dan Jasa	260.779.050,00	226.873.432,00	86,99
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.919.757.550,00	1.821.212.360,00	94,87
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.919.757.550,00	1.821.212.360,00	94,87
Belanja Daerah	1.919.757.550,00	1.821.212.360,00	94,87
Belanja Operasi	1.844.757.550,00	1.746.287.360,00	94,66
Belanja Barang dan Jasa	1.844.757.550,00	1.746.287.360,00	94,66
Belanja Modal	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.351.095.265,00	5.195.986.580,00	97,10
INSPEKTORAT DAERAH	5.351.095.265,00	5.195.986.580,00	97,10
Belanja Daerah	5.351.095.265,00	5.195.986.580,00	97,10
Belanja Operasi	5.277.911.665,00	5.122.977.580,00	97,06



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Pegawai	3.731.296.155,00	3.695.254.483,00	99,03
Belanja Barang dan Jasa	1.546.615.510,00	1.427.723.097,00	92,31
Belanja Modal	73.183.600,00	73.009.000,00	99,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.183.600,00	73.009.000,00	99,76
UNSUR KEWILAYAHAN	13.221.829.651,00	13.007.707.255,00	98,38
KECAMATAN	13.221.829.651,00	13.007.707.255,00	98,38
KECAMATAN SANGKUB	2.376.220.655,00	2.352.753.252,00	99,01
Belanja Daerah	2.376.220.655,00	2.352.753.252,00	99,01
Belanja Operasi	2.363.370.655,00	2.340.553.252,00	99,03
Belanja Pegawai	2.063.478.917,00	2.045.630.472,00	99,14
Belanja Barang dan Jasa	299.891.738,00	294.922.780,00	98,34
Belanja Modal	12.850.000,00	12.200.000,00	94,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.850.000,00	12.200.000,00	94,94
KECAMATAN BINTAUNA	3.770.470.110,00	3.714.608.909,00	98,52
Belanja Daerah	3.770.470.110,00	3.714.608.909,00	98,52
Belanja Operasi	3.586.525.396,00	3.531.769.758,00	98,47
Belanja Pegawai	3.028.951.349,00	2.999.043.934,00	99,01
Belanja Barang dan Jasa	557.574.047,00	532.725.824,00	95,54
Belanja Modal	183.944.714,00	182.839.151,00	99,40
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.768.000,00	20.450.000,00	98,47
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	163.176.714,00	162.389.151,00	99,52
KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR	2.120.612.463,00	2.062.933.921,00	97,28
Belanja Daerah	2.120.612.463,00	2.062.933.921,00	97,28
Belanja Operasi	2.120.612.463,00	2.062.933.921,00	97,28
Belanja Pegawai	1.847.894.110,00	1.814.139.281,00	98,17
Belanja Barang dan Jasa	272.718.353,00	248.794.640,00	91,23
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT	1.597.530.807,00	1.571.518.028,00	98,37
Belanja Daerah	1.597.530.807,00	1.571.518.028,00	98,37
Belanja Operasi	1.597.530.807,00	1.571.518.028,00	98,37
Belanja Pegawai	1.288.430.477,00	1.271.326.928,00	98,67
Belanja Barang dan Jasa	309.100.330,00	300.191.100,00	97,12
KECAMATAN K Aidipang	1.173.669.852,00	1.148.064.968,00	97,82
Belanja Daerah	1.173.669.852,00	1.148.064.968,00	97,82
Belanja Operasi	1.173.669.852,00	1.148.064.968,00	97,82
Belanja Pegawai	876.019.634,00	852.141.518,00	97,27
Belanja Barang dan Jasa	297.650.218,00	295.923.450,00	99,42
KECAMATAN PINOGALUMAN	2.183.325.764,00	2.157.828.177,00	98,83
Belanja Daerah	2.183.325.764,00	2.157.828.177,00	98,83
Belanja Operasi	2.183.325.764,00	2.157.828.177,00	98,83



Uraian Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
Belanja Pegawai	1.878.147.472,00	1.853.438.185,00	98,68
Belanja Barang dan Jasa	305.178.292,00	304.389.992,00	99,74
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.542.659.709,00	21.206.002.065,00	69,43
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.542.659.709,00	21.206.002.065,00	69,43
Belanja Daerah	30.542.659.709,00	21.206.002.065,00	69,43
Belanja Operasi	30.539.659.709,00	21.203.002.065,00	69,43
Belanja Pegawai	828.873.469,00	790.955.590,00	95,43
Belanja Barang dan Jasa	1.251.312.420,00	1.208.564.955,00	96,58
Belanja Hibah	28.459.473.820,00	19.203.481.520,00	67,48
Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Jumlah	682.209.615.880,00	643.939.285.805,00	94,39

g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106.916.249.564,00	99.968.031.247,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	40.532.255.790,00	26.547.859.874,00
		Program Pengembangan Kurikulum	152.092.700,00	0,00
2	Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.754.182.075,00	57.877.497.315,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.171.752.388,00	45.857.715.861,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.454.235.100,00	6.789.359.928,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	26.457.400,00	4.000.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	132.290.600,00	78.775.800,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.544.187.782,00	5.391.020.268,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.653.659.460,00	4.295.317.157,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.952.640.992,00	1.772.546.850,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	639.198.056,00	626.928.500,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	4.652.753.544,00	4.417.818.359,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.639.578.195,00	1.618.891.583,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	28.256.914.772,00	2.483.499.6267,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	209.131.700,00	180.153.600,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	274.505.200,00	259.993.300,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.468.501.717,00	2.468.501.717,00
		Program Pengembangan Perumahan	406.117.360,00	398.360.000,00
		Program Kawasan Permukiman	2.574.343.850,00	2.560.402.300,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	674.564.960,00	667.176.700,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.321.875.090,00	1.217.067.858,00
		Program Penanggulangan Bencana	1.033.765.250,00	372.509.350,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	525.897.300,00	482.959.949,00
6	Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.987.913.588,00	2.941.424.657,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pemberdayaan Sosial	132.461.625,00	119.132.800,00
		Program Rehabilitasi Sosial	431.403.330,00	380.859.032,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	908.106.882,00	803.306.730,00
		Program Penanganan Bencana	70.983.650,00	58.850.400,00
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
7	Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.126.738.746,00	2.035.086.440,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	899.627.534,00	866.012.160,00
		Program Hubungan Industrial	270.364.000,00	270.364.000,00
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	560.269.920,00	551.810.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	298.158.000,00	229.126.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	214.694.800,00	200.135.810,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	253.752.000,00	234.367.400,00
9	Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.898.755.672,00	1.876.192.661,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	406.345.750,00	303.181.400,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	214.302.000,00	207.476.024,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	16.008.600,00	14.251.500,00
10	Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah	674.564.960,00	667.176.700,00
11	Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.509.351.781,00	2.693.629.331,00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	67.083.550,00	59.719.800,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	48.255.800,00	44.291.200,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan	10.150.000,00	10.150.000,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5.800.000,00	5.525.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	42.116.980,00	41.001.300,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.800.000,00	0,00
		Program Pengelolaan Persampahan	2.336.050.080,00	2.322.519.100,00
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.622.820.615,00	2.593.768.257,00
		Program Pendaftaran Penduduk	407.744.000,00	407.120.000,00
		Program Pencatatan Sipil	457.960.162,00	429.630.475,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	429.630.475,00	194.844.200,00
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.482.990.520,00	2.422.474.314,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	177.593.450,00	177.593.450,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.026.434.150,00	947.441.080,00
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.670.021.878,00	3.526.209.328,00
		Program Pengendalian Penduduk	266.698.550,00	230.970.100,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.581.314.183,00	2.191.181.325,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	994.207.500,00	883.118.000,00
15	Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.239.800.662,00	2.085.231.447,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	300.842.350,00	268.632.888,00
16	Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.330.154.073,00	2.237.683.654,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	748.754.950,00	624.466.800,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	624.466.800,00	624.466.800,00
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7.499.950,00	6.250.000,00
		Program Pengembangan UMKM	336.625.035,00	335.286.805,00
18	Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.394.221.499,00	2.309.721.558,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.977.000,00	8.540.200,00
		Program Promosi Penanaman Modal	19.971.000,00	18.641.100,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	315.475.051,00	298.585.150,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	381.739.300,00	361.689.100,00
19	Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.779.574.637,00	1.725.164.679,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	161.6856.850,00	98.6976.780,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.186.717.254,00	2.071.659.662,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	120.929.464,00	120.929.464,00
20	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11.200.000,00	0,00
21	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	78.000,00	0,00
22	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	451.478.600,00	336.745.950,00
		Program Pembinaan Sejarah	251.937.730,00	150.541.080,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	937.564.300,00	857.329.486,00
23	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	825.963.360,00	794.551.264,00
24	Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.899.694.031,00	1.831.651.574,00
		Program Pengelolaan Arsip	25.987.500,00	24.236.000,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
Urusan Pilihan				
25	Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.309.369.701,00	2.167.060.601,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.042.894.200,00	712.770.925,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	614.723.100,00	540.204.782,00
26	Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.302.720.670,00	2.250.649.921,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	39.275.387,00	31.535.980,00
		Program Pemasaran Pariwisata	473.276.400,00	373.497.000,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	63.071.450,00	58.704.100,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	455.019.250,00	413.060.300,00
27	Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.361.212.505,00	11.218.538.293,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.841.787.695,00	3.227.606.560,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.612.379.568,00	5.582.742.950,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	585.187.214,00	563.692.113,00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	161.023.600,00	138.320.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	724.037.262,00	616.719.395,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	531.086.466,00	502.459.987,00
28	Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	840.053.984,00	497.624.983,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	393.883.928,00	389.915.698,00
		Program Standardisasi dan Perlindungan	24.080.050,00	22.035.278,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Konsumen		
29	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	46.918.700,00	45.880.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.999.100,00	9.600.000,00
30	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	50.223.300,00	45.254.200,00
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan				
31	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.181.483.766,00	29.289.327.055,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.337.540.450,00	5.935.701.039,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	547.395.490,00	415.680.345,00
32	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.594.468.924,00	18.911.185.000,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	6.187.695.478,00	6.100.828.945,00
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
33	Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.572.059.837,00	3.409.527.160,00
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	991.416.650,00	803.222.238,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	548.866.050,00	431.598.949,00
34	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.612.698.527,00	13.612.698.527,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.793.720.154,00	1.610.215.739,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	819.002.650,00	633.840.129,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	847.056.300,00	758.080.806,00
35	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	1.810.351.150,00	1.470.109.747,00
36	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	260.779.050,00	226.873.432,00
37	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.919.757.550,00	1.821.212.360,00
38	Pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.249.186.815,00	4.182.231.809,00



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	731.331.300,00	667.422.963,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	370.577.150,00	346.331.808,00
39	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.021.830.287,00	12.809.755.204,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	199.999.364,00	197.952.051,00
Urusan Pemerintahan Umum				
40	Pemerintahan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.021.822.139,00	983.427.261,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	699.926.350,00	698.274.984,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	461.437.400,00	420.818.300,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	28.359.473.820,00	19.103.481.520,00
	Jumlah		682.209.615.880,94	644.087.484.705,00

Sumber: BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk



mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kedepannya. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara waktu beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan



ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Dalam rangka mencapai penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama. Investasi yang tepat dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan merupakan langkah penting dalam memberdayakan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, masyarakat dapat lebih siap menghadapi persaingan dalam dunia kerja dan mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, prevalensi stunting yang masih tinggi di tingkat nasional pada tahun 2024 menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor kesehatan. Program-program gizi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait gizi dan pola hidup sehat menjadi upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi prevalensi stunting.

2. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Pilkada serentak 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi landasan utama. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang efektif menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Dengan memastikan



tata kelola pemerintahan yang baik, proses Pilkada dapat berjalan adil, terbuka, dan bersih dari praktik korupsi, politik uang, dan manipulasi.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga berdampak langsung dalam memecahkan persoalan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, penggunaan anggaran publik yang transparan, serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program inklusif dan akses yang lebih baik terhadap layanan sosial juga dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai antisipasi kondisi global dan nasional

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas dan distribusinya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat penting untuk mengantisipasi kondisi global dan nasional yang tidak stabil. Beberapa alasan mengapa perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif antara lain: mengurangi ketimpangan sosial, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat daya saing nasional dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang



berkelanjutan dan inklusif. Beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting antara lain:

- Peningkatan aksesibilitas: Pembangunan infrastruktur yang merata dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat, seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
- Peningkatan konektivitas: Pembangunan infrastruktur yang merata juga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga memperkuat integrasi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat membuka peluang baru untuk investasi dan bisnis, serta meningkatkan daya saing wilayah.
- Konservasi lingkungan: Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, misalnya dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan pengrusakan habitat satwa liar. Hal ini juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk investasi dan bisnis, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan secara menyeluruh.



Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dilihat dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini;Pelaksanaan pendidikan dasar masih belum optimal;Masih ditemukannya kasus putus sekolah pada anak;Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar;Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;Belum optimalnya akses layanan Pendidikan;Masih kurangnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;Belum tersedianya Perguruan Tinggi.
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Pelayanan Kesehatan bermutu belum sepenuhnya diperoleh masyarakat;Belum optimalnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan penurunan <i>stunting</i> dengan masih tingginya kasus <i>stunting</i>;Masih ditemukannya kasus kematian ibu;Masih tingginya angka kematian bayi;



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none">e. Belum optimalnya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga;f. Masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan;g. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak balita;h. Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;i. Belum Optimalnya kualitas dan aksebilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi;b. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;c. Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah;d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan;e. Pengelolaan bangunan pemerintah masih perlu ditingkatkan;f. Kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkang. Masih perlunya peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya;h. Belum semua wilayah bebas banjir;i. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;j. Belum optimalnya pengembangan Jalan yang menjadi wewenang kabupaten;k. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air;l. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;m. Belum optimalnya Pengelolaan Sistem Air Limbah yang ramah Lingkungan.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">a. Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal;b. Cakupan pelayanan sanitasi yang belum optimal;c. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum;d. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.e. Belum terdataya capaian kinerja standar pelayanan minimal Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya upaya penegakan perundang-undangan daerah;b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 juga belum optimal;c. Rendahnya tingkat sosialisasi kebencanaan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		yang dilakukan terhadap masyarakat; d. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan non alam.
6.	Sosial	a. Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); b. Pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar PMKS/PPKS masih rendah; c. Rendahnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, serta lanjut usia terlantar (LUT) tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial; d. Belum terintegrasi dan terimplementasikannya target-target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. e. Belum optimalnya upaya rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, gelandangan dan pengemis.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja	a. Masih kurangnya peningkatan keahlian Kerja yang berpengaruh pada Produktivitas Tenaga Kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah; b. Belum optimalnya perlindungan Perempuan dan Anak; c. Tingginya angka pernikahan dini; d. Tingginya angka kekerasan dan Perceraian.
3.	Pangan	a. Masih kurangnya penyediaan dan penyaluran kebutuhan pokok di bidang pangan; b. Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan.
4.	Pertanahan	a. Belum optimalnya layanan perizinan membuka lahan; b. Belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah.
5.	Lingkungan Hidup	a. Belum optimalnya upaya pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup.
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	a. Belum optimalnya pelayanan pengadministrasi kependudukan berbasis elektronik; b. Belum optimalnya pengadaan dokumen kependudukan.
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Belum optimalnya administrasi pemerintahan desa; b. Tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa cenderung menurun.



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan program pemerintah dalam pengendalian penduduk.
9.	Perhubungan	a. Belum Optimalnya layanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); b. Belum optimalnya pengembangan fasilitas marka jalan.
10.	Komunikasi dan Informatika	a. Belum Optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik. b. Masih terdapat area <i>blank spot</i> .
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Belum Optimalnya Pengawasan, Pemeriksaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; b. Belum Optimalnya Pengembangan UMKM.
12.	Penanaman Modal	a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara <i>elektronik</i> .
13.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, rendahnya peran aktif pengurus organisasi olah raga, serta terbatasnya sarana prasarana olah raga sesuai standar; b. Masih banyak kelembagaan induk-induk organisasi olah raga tingkat kabupaten yang belum terbentuk c. Minimnya pelaksanaan <i>event</i> olahraga pada tingkatan daerah sebagai sarana penjarangan atlet berprestasi.
14.	Statistik	a. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral; b. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
15.	Persandian	a. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan persandian informasi (sandiman)
16.	Kebudayaan	a. Belum optimalnya Pengelolaan dan pelestarian warisan dan cagar budaya daerah
17.	Perpustakaan	a. Tidak adanya fasilitas perpustakaan yang memadai; b. Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah masih sangat rendah, bahkan tidak bertambah selang waktu 2016-2020;
18.	Kearsipan	a. Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan, dan tidak dilakukan secara terpadu; b. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip serta pelestarian koleksi naskah kuno.
Urusan Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan	a. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya; b. kurangnya pengetahuan dan keterampilan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		pembudidaya ikan mengenai cara budidaya ikan yang baik, pencegahan hama dan penyakit ikan; c. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat perikanan.
2.	Pariwisata	a. Kurangnya minat wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah; c. Kurangnya kompetensi SDM pengelola pariwisata dan kurang optimalnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas).
3.	Pertanian	a. Penurunan Produksi hasil Pertanian b. Belum optimalnya promosi komoditi pertanian dan hortikultura; c. Rendahnya kualitas pasca panen, terlihat dari kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. d. Stabilitas harga panen produksi pertanian yang belum terjaga, hal ini ditandai dengan anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya tiba; e. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi pertanian;
4.	Perdagangan	a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen; b. Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan; c. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata.
5.	Perindustrian	a. Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB; b. Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM; c. Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6.	Transmigrasi	d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan transmigrasi yang tersedia.
<i>Pendukung Urusan Pemerintahan</i>		
1.	Sekretariat Daerah	a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah; b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan aparatur.
2.	Sekretariat DPRD	a. Rendahnya jumlah perda yang di tetapkan setiap tahunnya.
<i>Penunjang Urusan Pemerintahan</i>		
1.	Perencanaan	a. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil pencapaian target perencanaan pembangunan daerah b. Belum optimalnya penjabaran prioritas pembangunan tahunan melalui penjabaran Program RPJMD dalam RKPD.



No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
2.	Keuangan	a. Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terkendala oleh data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi. Dapat dilihat pada rasio PAD.
3.	Kepegawaian	a. Belum Optimalnya Penempatan dan pendayagunaan Pegawai yang sesuai dengan keahlian.
4.	Pendidikan dan Pelatihan	a. Rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; b. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN; c. Belum optimalnya pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV).
5.	Penelitian dan Pengembangan	a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk bahan pengambilan kebijakan; b. Belum adanya tenaga peneliti di Daerah.
Pengawasan Urusan Pemerintahan		
1.	Inspektorat	a. Tingkat maturitas dan kapabilitas SPIP belum sesuai dengan harapan; b. Belum seluruhnya objek pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan.
Urusan Kewilayahan		
1.	Kecamatan	a. Belum optimalnya forum koordinasi antar Desa - Kecamatan.
Urusan Pemerintahan Umum		
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan; b. Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol).

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih mengacu pada visi Kepala Daerah tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah :



***“Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang
Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”***

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

Berkelanjutan : Apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mandiri : Menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Berbudaya : Pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan local yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;



Berdaya Saing : Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan Misi tahun sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
- 2) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
- 3) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
- 4) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Dokumen RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 yang merupakan Penjabaran dari tahapan akhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 yaitu :

“Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan”



Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah ditetapkan diatas, ditetapkan 6 misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 yakni :

- 1) Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata;
- 4) Mewujudkan budaya yang berperadaban;
- 5) Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing;
- 6) Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing, Adapun Korelasi antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tujuan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026	Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
	Mewujudkan budaya yang berperadaban
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 3: Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing
Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata
	Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup

**c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada Visi Misi Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tujuan/ Sasaran Pembangunan		Kondisi Akhir
					RKPD 2024	RPKPD 2024	
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	68,79 Poin	69,33 Poin	69,33 Poin	70,4 Poin
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	69,70 Persen	71,48 Persen	71,48 Persen	73,20 Persen
			Prestasi Pemuda dan Olah Raga	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai
			Rata-rata Lama Sekolah	8,74 Tahun	8,88 Tahun	8,88 Tahun	9,17 Tahun
			Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,97 Tahun	68,10 Tahun	68,10 Tahun
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	44,83 Poin	49,86 Poin	49,86 Poin	60,03 Poin
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Profesionalitas ASN	43,13 Poin	48,13 Poin	48,13 Poin	60,13 Poin



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tujuan/ Sasaran Pembangunan		Kondisi Akhir
					RKPD 2024	RPKPD 2024	
		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,77 Poin	80,5 Poin	80,5 Poin	83,98 Poin
			Angka Kemiskinan	7,25 Persen	6,95 Persen	6,95 Persen	6,35 Persen
3	Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Gini Rasio	0,328 Poin	0,325 Poin	0,325 Poin	0,310 Poin
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,00 Persen	6,18 Persen	6,18 Persen	6,33 Persen
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,98 Persen	3,86 Persen	4,00 Persen	3,07 Persen
4	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	PDRB per Kapita (ADHB)	34.633.314 Rupiah	35.401.16 Rupiah	35.401.16 Rupiah	37.936.873 Rupiah
			Indeks Pembangunan Berkelanjutan	66,29 Poin	68,89 Poin	68,89 Poin	70,44 Poin
			Indeks Pembangunan Infrastruktur	42,60 Poin	43,79 Poin	43,79 Poin	46,18 Poin
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,04 Poin	82,85 Poin	82,85 Poin	83,43 Poin
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,35 Persen	80,89 Persen	80,89 Persen	81,92 Persen
			Persentase Penanggulangan Bencana	67,16 Persen	68,01 Persen	68,01 Persen	70,23 Persen

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu



strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini. Adapun sasaran pokok pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan;
4. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan;
5. Peningkatan pemerataan pembangunan;
6. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan;
7. Peningkatan pemerataan pembangunan;
8. Menjadikan budaya dan kesenian daerah sebagai daya Tarik wisata;
9. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah;
10. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah;
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal;
12. Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan;
13. Peningkatan kualitas lingkungan.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;



3. Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah;
6. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana.

Pada tabel berikut dijelaskan keterkaitan tujuan dan sasaran Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 :

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah pada RPD Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Prestasi Pemuda dan Olah Raga
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)
	Angka Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka
	Gini Rasio		
Terwujudnya Pembangunan	Indeks Pembangunan	Meningkatkan Pelayanan	Indeks Pembangunan Infrastruktur



Kawasan Berkelanjutan	Berkelanjutan	Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	
		Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana

d. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas bersifat strategis yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, program pembangunan daerah merupakan program unggulan (dari masing-masing misi yang terkait secara langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD). Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis sasaran, strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-program pembangunan daerah sebagai instrumen untuk memadukan program perangkat daerah. Program Pemerintah Daerah yang ada pada RPD Tahun 2024-2026 ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kineja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Program Peningkatan Prestasi Generasi Muda dan Olahraga;
3. Program Peningkatan Derajat Kesehatan;
4. Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

5. Program Penguatan Daya Saing Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur;
7. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
9. Program Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana.

Dari 9 (sembilan) Program Pemerintah Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam (112) seratus dua belas program pembangun daerah selengkapya sebagai berikut :

Program Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA					
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	67,49 Persen	73,03 Persen	75,03 Persen	83,69 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase PNF Terakreditasi Dan PAUD Terakreditasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
Persentase SD/MI Terakreditasi A	13,98 Persen	12,90 Persen	12,90 Persen	13,98 Persen	
Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
Persentase SMP/MTs terakreditasi A	5 Persen	30 Persen	30 Persen	10 Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Peresentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100 Persen	84 Persen	84 Persen	84 Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase pemuda berprestasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Persentase Atlet Berprestasi	20 Persen	25 Persen	39,38 Persen	67,65 Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
Presentase organisasi olahraga yang aktif	100 Persen	92,86 Persen	92,86 Persen	92,86 Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
Persentase Anggota Pramuka Berprestasi	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	63,38 Persen	65,14 Persen	65,14 Persen	68,66 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
Persentase Data Sejarah yang Ditata	33,33 Persen	50 Persen	50 Persen	66,67 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	19,81	29,25	35,25	48,11	Dinas Pendidikan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Kebudayaan
		Target	Realisasi		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	18,7 Persen	18,9 Persen	50 Persen	56,7 Persen	Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan rujukan dan pelayanan dasar	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	96,5 Persen	97 Persen	97 Persen	98 Persen	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	55 Persen	57 Persen	57 Persen	59 Persen	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKBM	97 Persen	98 Persen	98 Persen	100 Persen	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender	40 Persen	50 Persen	75 Persen	80 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
Cakupan kualitas Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	30 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
Persentase Pemenuhan Hak Anak	50 Persen	60 Persen	60 Persen	75 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 thn	2,5 Orang	2,5 Orang	2,5 Orang	2,5 Orang	Dinas PP, KB, PP & PA
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	Dinas PP, KB, PP & PA
Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	0 Persen	1,17 Persen	1,17 Persen	1,17 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	70 Persen	30 Persen	50 Persen	60 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	70 Persen	50 Persen	75 Persen	80 Persen	Dinas PP, KB, PP & PA
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI					
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Trantibum	100 Persen	100 Persen	50 Persen	100 Persen	Satua Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Persen	75 Persen	75 Persen	85 Persen	Dinas Kependudukan dan Capil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Persen	75 Persen	75 Persen	85 Persen	Dinas Kependudukan dan Capil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
Persentase Pengelolaan Adminduk dan Capil	0 Persen	80 Persen	90 Persen	95 Persen	Dinas Kependudukan dan Capil
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai regulasi yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Persentase pemberdayaan lembaga	0 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Dinas PMD



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
kemasyarakatan desa					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi	75 Persen	85 Persen	84 Persen	100 Persen	Dinas Kominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
Persentase data sektoral yang dipublikasi	100 Persen	30 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
Persentase ketersediaan infrastruktur persandian	39 Persen	30 Persen	30 Persen	100 Persen	Dinas Kominfo
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	64,29 Persen	71,43 Persen	75 Persen	78,57 Persen	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan dan Penyelesaian Perkara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Persentase fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase Program Pembangunan yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	57,62 Persen	57,62 Persen	57,62 Persen	58,5 Persen	Sekretariat DPRD
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Capaian Target Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	74 Persen	80 Persen	100 Persen	Bapelitbangda
Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Bapelitbangda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Persentase Kinerja OPD Dengan Predikat Sangat Tinggi (91% - 100%)	93,63 Persen	94,58 Persen	95 Persen	97,46 Persen	Bapelitbangda
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Cakupan Pengelolaan Anggaran	85,71 Persen	85,71 Persen	85,71 Persen	90 Persen	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Persen	80 Persen	75 Persen	90 Persen	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
Persentase Penerimaan PAD Daerah	82 persen	82 persen	82 persen	84 persen	BPKPD
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BKPSDM
Persentase Pemenuhan Penataan ASN	57 Persen	60 Persen	60 Persen	70 Persen	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BKPSDM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Persentase Kematangan Inovasi	81,82 Persen	83,33 Persen	85 Persen	92,31 Persen	Bapelitbangda
Persentase Rekomendasi/ Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	0,26 Persen	0,63 Persen	0,63 Persen	1 Persen	Bapelitbangda
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	95 Persen	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	93 Persen	93 Persen	95 Persen	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,76 Persen	1,15 Persen	1,15 Persen	1,87 Persen	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,53 Persen	99,53 Persen	99,53 Persen	99,53 Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas PMPTSP
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,83 Persen	90,41 Persen	100 Persen	93,51 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Ketahanan Pangan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Pinogaluman
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Inspektorat Daerah
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pertanian
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	100 Persen	98 Persen	Kecamatan Bolangitang Timur
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	97,26 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan
Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 Persen	100 persen	Sekretariat DPRD
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	93 Persen	100 Persen	Dinas Perhubungan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Kesehatan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Ketahanan Pangan
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kesatuan Bangsa Dan Politik
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas PP, KB, PP dan PA
Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kecamatan Sangkub
Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase Penataan Peningkatan Kelembagaan PD, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Sekretariat Daerah
TERWUJUDNYA PEMERATAAN DAN PETUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF					
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Persentase Perlindungan Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Persentase Penanganan Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	54,55 Persen	58,33 Persen	60 Persen	64,29 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
Skor Angka Kecukupan Energi	91,88 Poin	91,93 Poin	82,96	92,48 Poin	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
Persentase penanganan daerah rawan pangan	41,67 Persen	50,00 Persen	50,00 Persen	83,33 Persen	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
Persentase keamanan dan mutu pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
Persentase Koperasi Sehat	0 Persen	20 Persen	20 Persen	68 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
Persentase Pengembangan UMKM	0 Persen	40 Persen	50 Persen	60 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
Persentase peningkatan investasi diKabupaten/Kota	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	Dinas PM PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
Persentase peningkatan promosi penanaman modal	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	Dinas PM PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Dinas PM PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
Persentase jumlah proyek penanaman modal yang merealisasikan investasinya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas PM PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas PM PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
Produksi perikanan tangkap	20 TON	85 TON	85 TON	85 Ton	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
Produksi perikanan budaya	200 Ton	203 Ton	205 Ton	208 Ton	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
Capaian peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4,17 Persen	4,17 Persen	5 Persen	1 Persen	Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
Capaian Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
Persentase Fasilitasi Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Persentase Alat Mesin Pertanian yang berfungsi dengan baik	76 Persen	76 Persen	76 Persen	79 Persen	Dinas Pertanian
Produktivitas Perkebunan	1.200 Ku/Ha	1.207,36 Ku/Ha	1.207,36 Ku/Ha	1.207,75 Ku/Ha	Dinas Pertanian
Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	5,50 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	5,61 Ku/Ha	5,70 Ku/Ha	Dinas Pertanian
Produktivitas Tanaman Hortikultura (Tomat)	3,50 Ku/Ha	3,67 Ku/Ha	3,67 Ku/Ha	3,96 Ku/Ha	Dinas Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	55,00 Ku/Ha	55,00 Ku/Ha	55,00 Ku/Ha	55,20 Ku/Ha	Dinas Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	60 Ku/Ha	55 Ku/Ha	55 Ku/Ha	55,20 Ku/Ha	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	70 Persen	72 Persen	72 Persen	75 Persen	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
Persentase Kesehatan Hewan dan Kesmavet	10 Persen	9 Persen	9 Persen	7 Persen	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Persen	30 Persen	28 Persen	26 Persen	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	82 Persen	83 Persen	78 Persen	85 Persen	Dinas Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Persen	30 Persen	30 Persen	90 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0,15 Persen	0,17 Persen	0,17 Persen	0,20 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	21 Persen	28 Persen	30 Persen	50 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
Persentase Sentra Industri Aktif	0 Persen	25 Persen	25 Persen	75 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
Persentase IKM yang memiliki Izin Usaha	0 Persen	20 Persen	20 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
Persentase IKM yang Terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	0 Persen	33 Persen	33 Persen	100 Persen	Dinas Perdagangan
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
Persentase Penyelesaian Temuan Lapangan	0 Persen	60 Persen	60 Persen	80 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
Persentase KK Transmigrasi yang Berhasil Mendapatkan Sertifikat	60,22 Persen	90,32 Persen	90,32 Persen	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KAWASAN BERKELANJUTAN					
MENINGKATKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG Mendukung PERFORMA WILAYAH					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	54,76 Persen	55,72 Persen	50,02 Persen	56,80 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	62,62 Persen	63,66 Persen	76,56 Persen	66,52 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Prasarana Persampahan Dalam Kawasan Pengelolaan Persampahan	30 Persen	30 Persen	15 Persen	36,47 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Aman	11,05 Persen	11,17 Persen	7,00 Persen	21,33 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	63,87 Persen	63,99 Persen	63,99 Persen	71,65 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Presentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah	60 Persen	60 Persen	60 Persen	100 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik Dan Tertib Administrasi	45,18 Persen	45,35 Persen	9,00 Persen	46,66 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	57 Persen	71 Persen	71,43 Persen	86 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	80 Persen	81 Persen	64,11 Persen	81,3 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	53,85 Persen	70 Persen	50,00 Persen	80 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	25 Persen	50 Persen	50 Persen	100 Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	4,36 Persen	2,88 Persen	2,88 Persen	21,13 Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	3 Persen	10 Persen	10 Persen	30 Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	100 Persen	85 Persen	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Indikator	Kondisi Awal Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024		Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target	Realisasi		
Persentase Tertib Lalulintas Jalan	45 Persen	47 Persen	47 Persen	50 Persen	Dinas Perhubungan
Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	40 Persen	40,20 Persen	40,20 Persen	41 Persen	Dinas Perhubungan
MENINGKATKAN PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase Pemenuhan Kajian Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	100 Persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Lingkungan Hidup	40 persen	50 persen	2 Persen	60 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	0 persen	50 persen	0 Persen	60 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil B3 dan LB3	25 persen	30 persen	25 Persen	37 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Menindaklanjuti Arahan dan atau Teguran Hasil Pengawasan	20 persen	23 persen	17,60 Persen	28 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Persentase Penghargaan yang Diraih di Tkt. Prov atau Nasional	0 persen	100 persen	0 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang terkait Dugaan Kasus Lingkungan	10 persen	13 persen	3 Persen	xx persen	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampahan	51,47 persen	53 persen	53 Persen	57 persen	Dinas Lingkungan Hidup
MENINGKATKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten	60 Persen	70 Persen	70 Persen	85 Persen	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	15 Persen	20 Persen	20 Persen	60 Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
MENINGKATKAN KETANGGUHAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	36,03 Persen	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

e. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat



layanan minimal. Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Tabel 1.19 Matriks Kegiatan berdasarkan RKPD Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
DINAS KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PUSKESMAS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
THRAPEUTIC FEEDING CENTRE (TFC)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Kabupaten/Kota
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	Program Pencegahan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
		DINAS SOSIAL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Program Pemberdayaan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
DINAS KETAHANAN PANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pendaftaran Penduduk	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penataan Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
DINAS PERHUBUNGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
DINAS KOMUNIKASI,	Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	Pemerintahan Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)			
DINAS PERDAGANGAN	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah			



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSADIAN	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSADIAN	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
DINAS PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
DINAS PARIWISATA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
DINAS PERTANIAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	
		Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	DINAS PERDAGANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
DINAS PERDAGANGAN	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	SEKRETARIAT DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Layanan Administrasi DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Pengkajian Peraturan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
KEUANGAN		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Uraian Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi
UNSUR KEWILAYAHAN		
KECAMATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

Sumber : RKPD Kab. Bolmut Tahun 2024



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat disebutkan dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang yang sesuai dengan jenis layanan SPM. Pengaturan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan serta merupakan barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Mekanisme penerapan SPM dilaksanakan melalui: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang seluruhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan teknis kementerian terkait. Perubahan paradigma



penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Penetapan prioritas belanja daerah dan diikuti dengan implementasi penerapan layanan SPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, merupakan wujud atas penjaminan hak konstitusional warga negara. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan ketentuan penerapan SPM merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Merujuk pada hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :



1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

b. Dasar Hukum

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan



- Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2028;

c. Kebijakan Umum

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecerendungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu kualitas layanan dan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kita mempunyai tujuan bernegara "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan



sekarang adalah adanya keteringgalan dalam layanan dan mutu pendidikan. Rendahnya layanan dan mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum berkembang optimal, diantaranya: Pendidikan menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Disisi lain yang menjadi permasalahan pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai walaupun telah terpenuhi. Banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung laboratorium komputer dan jaringan internet yang notabene sangat dibutuhkan pada era pembelajaran saat ini. Disisi lain, pemerataan serta kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik juga sangat dibutuhkan di Bolaang Mongondow Utara.

Sedangkan pada bidang kesehatan dapat dilihat juga pada belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, masih banyak ditemukan fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi, kualitas layanan kesehatan rumah sakit masih rendah serta akses dan kualitas lingkungan sehat juga masih dikategorikan rendah. Fasilitas kesehatan masih menjadi isu yang perlu terus diperhatikan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena fasilitas kesehatan primer terakreditasi dan persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan. Akreditasi kesehatan sangat penting mengingat cerminan dari mutu pelayanan dari kesehatan. Sehingga akreditasi perlu tingkatkan dan pemerataan untuk seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan wilayah yang di kelilingi oleh pegunungan dan pantai juga merupakan wilayah rawan bencana longsor, puting beliung maupun bencana kebakaran maka dari itu pemerintah harus memperhatikan hal tersebut dengan melakukan pembangunan sistem dalam penanggulangan bencana alam. Maka demikian dengan adanya sistem manajemen pelayanan penanggulangan bencana dapat mempermudah dalam penanganan korban jiwa bencana alam yang harus di dukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dapat menjadikan sistem yang maksimal.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Adapun Korelasi antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tujuan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026	Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas Mewujudkan budaya yang berperadaban
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 3: Terwujudnya Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing
Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata



d. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tiga tahun kedepan adalah :

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pemantapan ekonomi masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sukses pemilu serentak	Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata	Bolaang Mongondow Utara sebagai penyangga kedaulatan pangan Kawasan IKN

Arah kebijakan pada tahun 2024 yakni “ **Pemantapan ekonomi masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sukses pemilu serentak**”. Dalam memantapkan ekonomi masyarakat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya dengan baik. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2024 meliputi :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
5. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;



6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan.
7. Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum serentak

Untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan prasarana pendidikan
- b. Meningkatkan sarana pendidikan
- c. Meningkatkan keterjangkauan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu
- d. Meningkatkan kualifikasi pendidikan
- e. Meningkatkan dukungan teknologi dalam pembelajaran
- f. Meningkatkan pengelolaan manajemen sekolah
- g. Meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini
- h. Meningkatkan layanan pendidikan nonformal
- i. Meningkatkan nilai rata-rata ujian siswa
- j. Meningkatkan angka kelulusan siswa

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan Prasarana yang berkualitas
- b. Menyediakan sarana yang berkualitas
- c. Penyediaan sistem jaminan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
- d. Penyediaan pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu
- e. Meningkatkan kompetensi pendidik



- f. Meningkatkan pengembangan kompetensi pendidik
- g. Meningkatkan sistem pembelajaran sesuai kualifikasi
- h. Penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan pembelajaran berbasis IT
- i. Mengoptimisasikan pembiayaan operasional sekolah
- j. Meningkatkan sistem tata kelola SPNF
- k. Meningkatkan kompetensi tutor PNF
- l. Pemerataan lembaga pra sekolah

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya pemerataan akses dan pelayanan kesehatan berkualitas
- c. Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan
- d. Meningkatnya ketersediaan tenaga medis yang berkualitas

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Kesehatan berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan
- b. Menyediakan tenaga medis yang berkualitas
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan balita
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar
- h. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat usia produktif
- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat usia lanjut
- j. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi
- k. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus
- l. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan gangguan jiwa



- m. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat penderita TB
- n. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terinfeksi HIV

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaam Umum

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air limbah aman

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Membangun prasarana air minum
- b. Melaksanakan pemeliharaan prasarana air minum
- c. Membangun prasarana air limbah aman
- d. Melaksanakan pemeliharaan air limbah aman

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
- b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh Prasarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendataan masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana
- b. Melaksanakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana
- c. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah



5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Memujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan
- b. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
- c. Menyelenggarakan kerjasama antar pihak dalam penanggulangan bencana
- d. Meningkatkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada
- b. Meningkatkan kapasitas PPNS
- c. Mengoptimalkan penanganan bencana dan daerah rawan bencana
- d. Mengoptimalkan kualitas SDM penanggulangan bencana
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- f. Mengoptimalkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial
- b. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan
- c. Memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat rentan dan tidak beruntung serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pendataan terhadap masyarakat penyandang masala kesejahteraan sosial.
- b. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas.
- c. Mengoptimalkan pendataan terhadap masyarakat penyandang masala kesejahteraan sosial.
- d. Melaksanakan rehabilitasi dasar terhadap masyarakat lanjut usia.
- e. Melaksanakan rehabilitasi dasar terhadap penyandang disabilitas terlantar diluar panti.
- f. Mengoptimalkan penanganan bencana dan daerah rawan bencana sosial.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian Kinerja Makro pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,64	69,32	0,99
2.	Angka Kemiskinan	7,90	6,70	- 15,19
3.	Angka Pengangguran	4,48	4,10	-8,48
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5,43	5,12	-5,70
4.	Pendapatan Per Kapita	37,89	40,46	7,25
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,38	0,37	-2.63

Sumber : BPS Kab. Bolmut

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

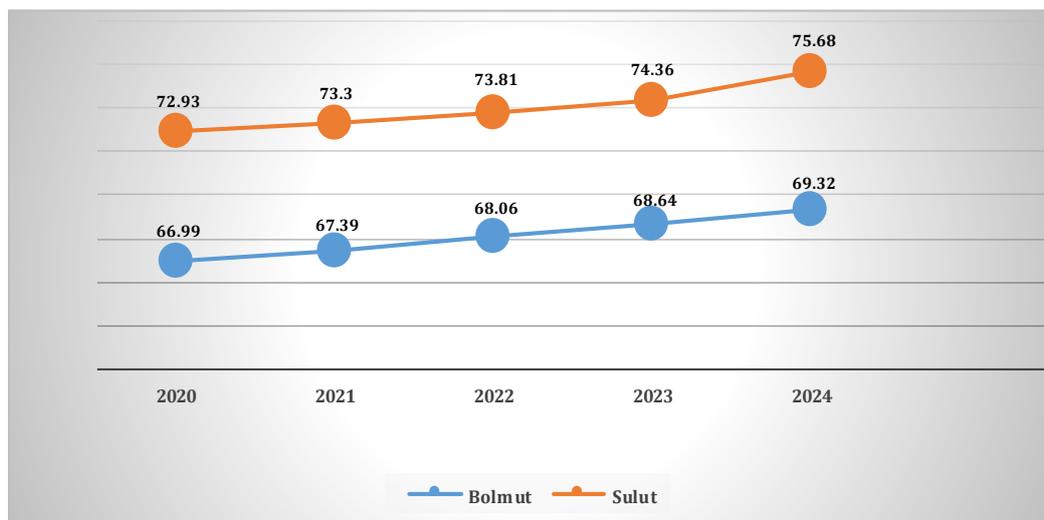
IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living).



Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup, Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS Kab. Bolmut

Nilai capaian IPM Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 berada pada angka 69,32, Nilai capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan



nilai 68,64. Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 66,32 tahun 2018 hingga mencapai 69,32 pada tahun 2024 atau pada kategori "Menengah Atas" (66-79, UNDP).

Tabel 2.2 Indikator Pembentuk IPM

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	66,99	67,39	68,06	68,64	69,33	Persen
2.	Angka Harapan Hidup	67,66	67,73	67,39	68,33	68,56	Tahun
3.	Rata-rata Lama Sekolah	8,40	8,41	8,57	8,58	8,61	Tahun
4.	Harapan Lama Sekolah	11,91	12,17	12,34	12,38	12,39	Tahun
5.	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	9 062	9 143	9 285	9 652	10 170	Ribu Rupiah

Sumber data : www.bps.go.id

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ditargetkan 69,33 terealisasi 69,33. Dengan demikian kualitas hidup manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong kategori sedang.

Keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai oleh:

1. Meningkatnya akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mengurangi angka kemiskinan.
2. Program wajib belajar, peningkatan fasilitas kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Kegagalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai oleh:

1. Kesenjangan pendapatan yang masih tinggi antara kelompok masyarakat.
2. Pengangguran yang masih tinggi, terutama bagi lulusan muda.
3. Inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperlukan solusi yang komprehensif di berbagai sector :

1. Dalam bidang pendidikan, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan, memperluas akses sekolah di daerah terpencil, serta memberikan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.



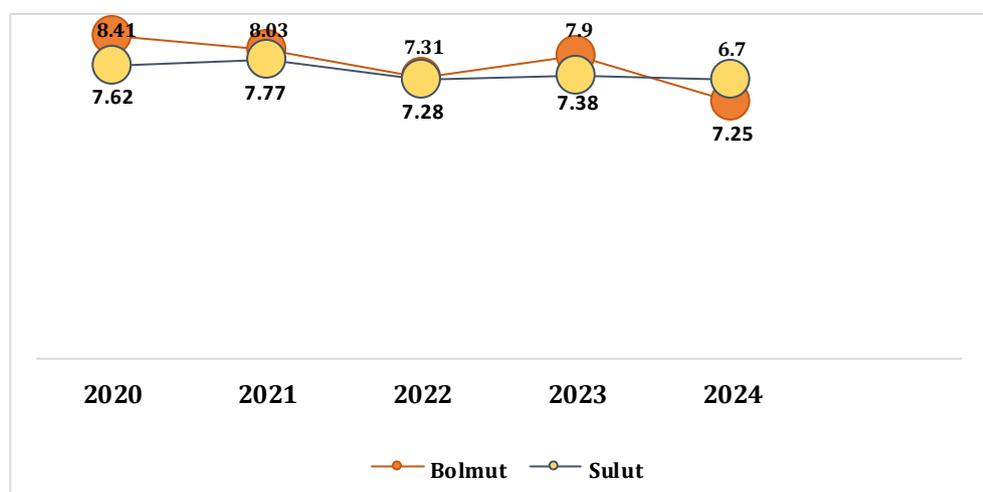
2. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan kesehatan primer, penyediaan tenaga medis di wilayah terpencil, serta program edukasi gizi untuk mencegah stunting menjadi langkah penting.
3. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, perlu dilakukan penguatan UMKM, penyediaan pelatihan keterampilan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selalu menurun yakni pada tahun 2018 mencapai menjadi 8,64% dan terus menurun sampai pada tahun 2024 sebesar 6,70% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,61, hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukkan hasilnya, namun perlu lebih dimaksimalkan terlebih pada masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Grafik 2.2



Sumber data : BPS Kab. Bolmut



Tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 ditargetkan dapat ditekan pada angka 6,95%, terealisasi 4,70% mencapai target yang diberikan dengan tingkat capaian 86,62%.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 sebesar 7,88% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 7,90%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih di atas angka provinsi namun dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 sebesar 7,25% sedangkan nasional sebesar 8,57%.

Pemetaan kemiskinan tidak hanya pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga dilakukan pengukuran. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Makin tinggi angkanya menunjukkan makin parah kemiskinannya. Tabel berikut menggambarkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2024:

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan



seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2018	Rp. 238.645,00	6,84	8,64	0,19
2019	Rp. 254.835,00	6,77	8,45	0,19
2020	Rp. 264.227,00	6,82	8,41	0,04
2021	Rp. 275.369,00	6,53	8,03	0,38
2022	Rp. 283.627,00	6,01	7,31	0,72
2023	Rp. 316.327,00	6,56	7,90	0,59
2024	Rp. 334.448,00	6,60	7,88	-0,02

Sumber data : BPS Kab. Bolmut

Dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024, namun tidak demikian dengan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengalami peningkatan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yakni 0,99% mengalami peningkatan dari 0,81% tahun 2023. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut masih dibawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 yang mencapai 1,10%. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yakni 0,22% mengalami peningkatan dari 0,14% tahun 2023. Tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 masih dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2024 yang mencapai 0,24%. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan. Demikian juga dengan tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran



penduduk termiskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan pada angka kemiskinan ditandai oleh:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat atau Tidak Merata.
2. Inflasi menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat miskin.
3. Daya beli masyarakat menurun karena pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga barang.
4. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor biaya.
5. Sektor pertanian dan UMKM yang rentan terdampak bencana sehingga menambah angka kemiskinan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperlukan solusi yang komprehensif di berbagai sektor.:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
2. Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat.
3. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
4. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Meningkatkan kerja sama dengan dunia industri dalam program pelatihan tenaga kerja

Dengan pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk



memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal. Sebagai permasalahan pembangunan utama, penanggulangan kemiskinan menjadi isu penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.3. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan pengangguran Badan Pusat Statistik merujuk pada konsepsi The Labour Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah chaos politik bagi pemerintahan.

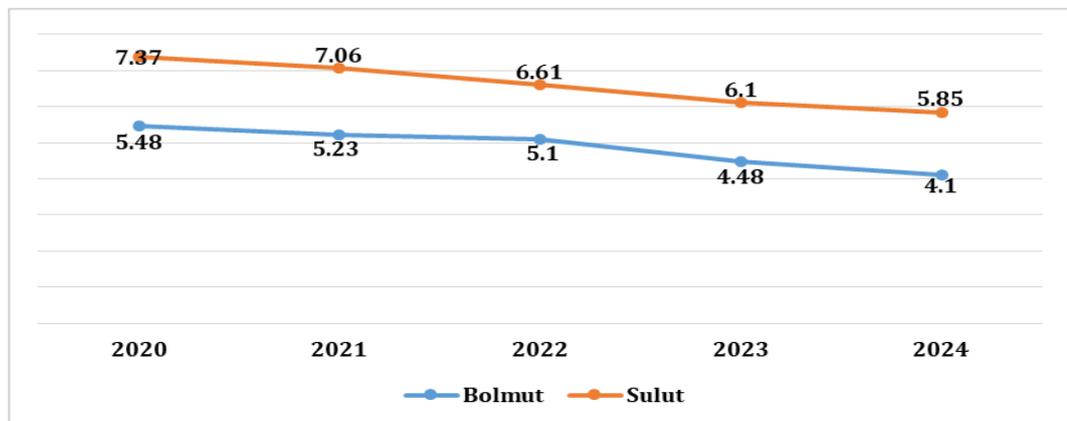
Angka Pengangguran rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bolaang



Mongondow Utara tahun 2018 sebesar 5,08 %, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,48% dan tahun 2024 berada pada angka 4,10.

Grafik 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja sebesar 0,68% atau meningkat dari 94,18% penduduk yang bekerja pada tahun 2023 menjadi 94,48% penduduk yang bekerja pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang menganggur berkurang sebesar 0,68% atau turun dari 5,82% di tahun 2023 menjadi 5,52% pada tahun 2024.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2020-2024

Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja	36.629	40.325	40.409	40.790	41.070
1. Bekerja	34.566	37.575	38.054	38.417	38.803
2. Pengangguran	2.063	2.750	2.355	2.373	2.267
II. Bukan Angkatan Kerja	29.203	22.052	22.322	22.426	22.558
1. Sekolah	6.369	4.318	4.542	4.567	4603
2. Mengurus Rumah Tangga	20.336	15.001	15.200	15.264	15.338
3. Lainnya	2.498	2.733	2.580	2.595	2617
Penduduk Usia Kerja (PUK)	65.832	62.377	62.731	63.216	63.628
TPAK	55,64	64,65	64,42	64,52	64,55
TPT	5,63	6,82	5,83	5,82	5,52

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolmut



Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi menjadi perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pelaku dunia usaha baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

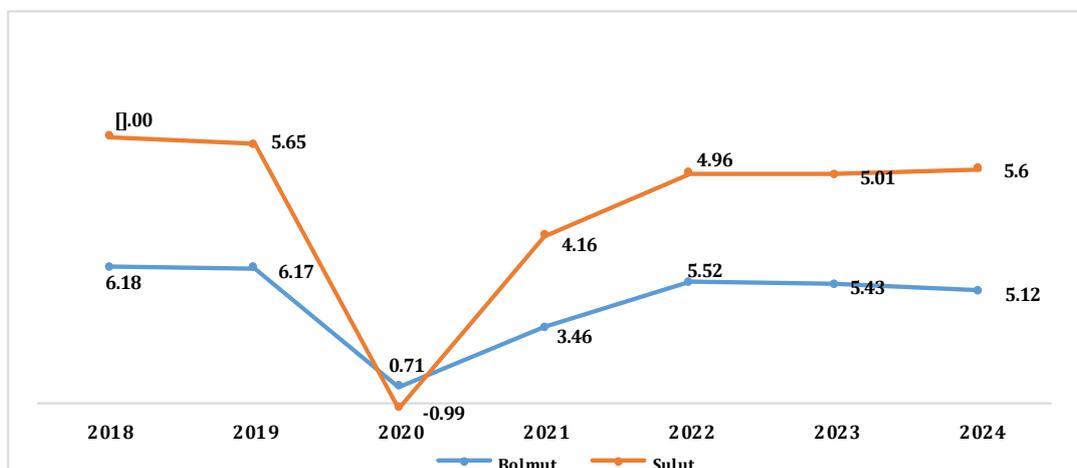
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2023 atau 2024 sesuai ketersediaan data.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 ditetapkan sebesar 6,18% terealisasi 5,12% atau tingkat capaian 82,5%. Pertumbuhan ekonomi diatas dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan dibandingkan ditahun 2023 sebesar 5,43%. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.5

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha tahun 2020-2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Sulawesi Utara





Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga pada angka 0,17% pada awal masa pandemi Covid 19 tahun 2020 kembali mulai membaik. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan pada masa pandemi sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini turut juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan belanja tahun 2021 yakni adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid 19. Sebagian belanja daerah yang dialokasikan untuk faktor-faktor produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus direalokasi untuk penanganan dampak pandemi.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dalam perubahan output nasional. Dalam praktiknya, perubahan output dalam pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai bahan analisis ekonomi jangka pendek suatu negara. Jadi, bahan analisa ekonomi ini akan sangat penting untuk menggagas prinsip ekonomi satu negara.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDRB yaitu : a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang



menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PRDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	804,97	835,45	881,54
Pertambangan dan Penggalian	217,34	221,83	230,55
Industri Pengolahan	64,78	69,62	70,76
Pengadaan Listrik dan Gas	1,11	1,15	1,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	5,15	5,20
Konstruksi	288,02	312,58	325,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	222,65	244,29	257,32
Transportasi dan Pergudangan	19,79	20,64	22,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	5,27	5,60
Informasi dan Komunikasi	11,48	12,00	12,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	17,34	16,83	17,36
Real Estate	59,67	62,54	67,24
Jasa Perusahaan	0,23	0,23	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	52,52	53,52	58,41
Jasa Pendidikan	36,68	43,26	45,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,80	27,17	28,27
Jasa Lainnya	13,78	14,72	16,38
PDRB	1.846,11	1.946,27	2.045,96
PDRB Non Migas	1.846,11	1.946,27	2.045,96

Sumber : www.bolmutkab.bps.go.id

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor dominan dalam perekonomian Bolaang Mongondow Utara. Setelah pertanian yang menyumbang sebesar 43,09 persen pada tahun 2024, lapangan usaha penyumbang share terbesar kedua adalah konstruksi sebesar 15,92 persen, diikuti oleh perdagangan sebesar 12,58 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 11,27 persen. Kemudian, sisanya sebesar 17,14 persen disumbangkan oleh lapangan usaha lainnya. Dengan struktur demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Bolaang Mongondow Utara masih



dominan pada sektor primer, sementara share sektor lainnya belum terlalu besar. Ditopangnya sebagian pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan bisa menjadi masalah yang serius ketika terjadi perubahan iklim di tahun tersebut karena masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha ini masih sangat bergantung pada cuaca. Ketika musim kering/panas misalnya, banyak petani yang tidak dapat menanam tanamannya. Sehingga perlu adanya diversifikasi usaha atau pengembangan sektor sekunder bahkan tersier.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional. Secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 mencapai angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk

Produktivitas per kapita menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Untuk mengukur indikator ini digunakan



pendekatan melalui PDRB per kapita. Besarnya PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 atas dasar harga berlaku sebesar 30,98 juta rupiah dan dilihat atas dasar harga konstan sebesar 20,91 juta rupiah.

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Pendapatan perkapita ADHB	30,977	30,973	32,50	35,08	37,89	Juta Rupiah
2.	Pendapatan perkapita ADHK	19,93	20,91	20,84	21,71	22,60	Juta Rupiah

Sumber data : BPS Kab. Bolmut, 2024

Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan data BPS meningkat sebesar Rp 1.601.022,18/tahun dari Pendapatan perkapita Rp32.574.297,15/tahun pada tahun 2022 menjadi Rp32.574.297,15/tahun pada tahun 2023. Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

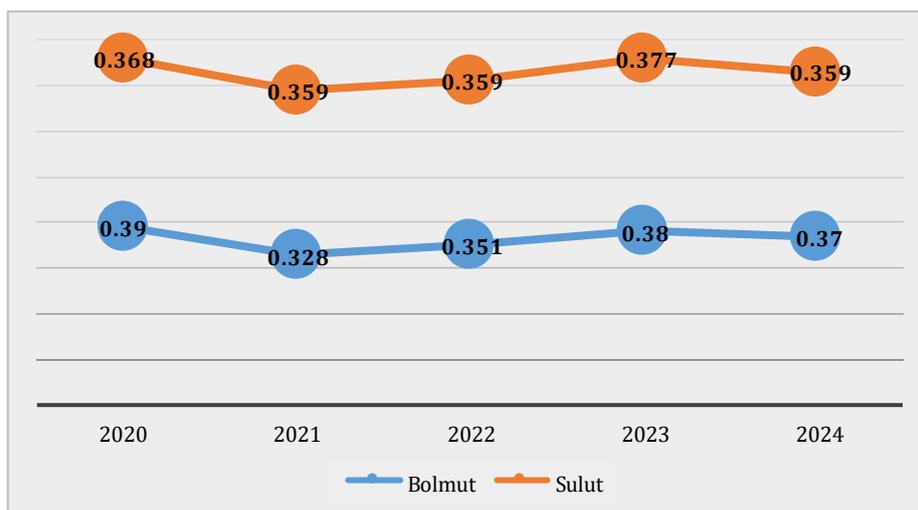
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Bolaang



Mongondow Utara masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara, seperti terlihat dalam diagram berikut :

Grafik 2.6
Indeks Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024



Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Data Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 0,350. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 0,380, dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,374. Walaupun terjadi penurunan, tetapi masih belum mencapai target yang ditentukan pada angka 0,325 di Tahun 2024.



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.			
1.	Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,24 %	- Data Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Data Kependudukan Dinas Admuduk Kab. Bolmut Semester 2 tahun 2024				
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	1718					
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	1823					
		2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,68 %					
			Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar	8037					
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	8488					
		3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,28 %					
			Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	3729					
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	3955					
		4)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	81,04 %					
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1201					
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan	1482					
2.	Kesehatan	1)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,43 %	Dinas Kesehatan				
			Jumlah daya tamping rumah sakit rujukan	380					
			Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota	88.002					
		2)	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50 %					
			Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi	1					
			Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota	2					



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %			
			Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan			1171
			Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten/Kota			1171
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %			
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan			1130
			Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota			1130
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,54 %			
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			1089
			Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota			1128
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	79,32 %			
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			5718
			Jumlah balita di Kabupaten/Kota			7209
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,27 %			
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			10.371
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota			11.119
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,69 %			
			Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			26.906
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota			56.417
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	71,41 %			
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			9279
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			12.994
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,49 %			
			Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan			10.417



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		sesuai standar			
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	13.985		
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		
		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1749		
		Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	1749		
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82,03 %		
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	178		
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	217		
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	58,22 %		
		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	209		
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	359		
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	76,86 %		
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	1176		
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	1530		
3.	Pekerjaan Umum	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,04 %		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	0,1067 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	266,176 Ha		
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,25 %		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang	0,3094 Ha		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha)			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m)	122,748 Ha		
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,73 %		
		Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	835,5 Ha		
		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	3247 Ha		
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65,30 %		
		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	19.348		
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	29.628		
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	98,82 %		
		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	19.323		
		Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	19.554		
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100 %		
		Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	51		
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	51		
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,22 %		
		Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	127,36 Km		
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	156,80 Km		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		8)	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	13,04 %		
			Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	133		
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/ Kota	1020		
		9)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %		
			Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	156		
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	156		
4.	Perumahan Rakyat	1)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
			Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	6		
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	6		
		2)	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-		Tidak adanya relokasi program pemerintah di Kab. Bolmut sampai dengan tahun 2024, untuk penyediaan RLH diberikan kepada masyarakat melalui program BPS
			Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	-		
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	-		
		3)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	100%		Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 452 Tahun 2024
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	214,97		
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	214,97		
		4)	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	19,33 %		
			Jumlah unit rumah tidak layak huni	3772		
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	19.510		
		5)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	0,82 %		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			Utilitas Umum)			
			Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	160		
			Jumlah unit rumah kabupaten/kota	19.510		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah pengaduan yang ditangani	2		
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	2		
		2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	28,57 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	4		
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	14		
		3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolmut	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59.950		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	59.950		
		4)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolmut	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	93		
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	93		
		5)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolmut	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	93		
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	93		
		6)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80 %	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolmut	
			Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan	4		
			Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	5		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		7)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit		Waktu tanggap 15 menit untuk layanan pemadam kebakaran seluruh desa di Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Bolangitang Barat.
			Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15 Menit		
6.	Sosial	1)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	32,69 %	Dinas Sosial Kab. Bolmut	
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	357		
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1092		
		2)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		
			Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	859		
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	859		
7.	Ketenagakerjaan	1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolmut	
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2		
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	2		
		2)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4,47 %		
			Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	45		
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	1007		
		3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,032		



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
					- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lapangan Usaha
			PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	2045,96		
			Jumlah tenaga kerja	1007		
		4)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	31,71 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolmut	
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	26		
			Jumlah perusahaan	82		
		5)	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	79,82 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolmut	
			Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan	348		
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar	436		
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,51 %		
			Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	70.129.638.786,00		
			Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	560.717.962.580,94		
		2)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. Bolmut	
			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	25		
			Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	25		
		3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,02 %		
			Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	8		
			Jumlah penduduk perempuan	42.827		
9.	Pangan	1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	88,67 %	Dinas Ketahanan Pangan	
			Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	21,28 Ton		
			Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	24 Ton		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
10.	Pertanahan	1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Bolmut	
			Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	-		
			seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	-		
		2)	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-		
			Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-		
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-		
		3)	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-		
			Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	-		
			Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	-		
		4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	-		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform	-		
		5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-		
			Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	-		
			Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	-		
		6)	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %		
			Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	14		
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	14		
11.	Lingkungan Hidup	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKA = 60 IKU = 93,21 IKTL = 85,21 IKL = 78,97	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolmut	
		2)	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	93,46 %		



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
			di Wilayah Kab/Kota				
			Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	11.186,50			
			Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	11.968,13			
		3)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	66,67 %		Pengawasan /Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolmut	
			Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	2			
			Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	3			
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1)	Perekaman KTP Elektronik	98,74 %	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolmut		
			Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	64.325			
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	65.148			
		2)	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	49,18 %			
			Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	12.045			
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	24.489			
		3)	Kepemilikan akta kelahiran	97,60 %			
			Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	25.988			
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	26.627			
		4)	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	71,43 %			
			Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	25			
			Jumlah PD	35			
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1)	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Berdasarkan Surat Dinas PMD Kab. Bolmut, di Kab. Bolmut tidak terdapat Desa/Kelurahan dengan status "Desa Tertinggal"	
			Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	-			
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	-			



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2)	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100 %		
			Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	71		
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	71		
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,17	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. Bolmut	
		2)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,92 %		
			Jumlah peserta KB Aktif Modern	10.573		
			Jumlah Pasangan Usia Subur	14.112		
		3)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,28 %		
			Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	1028		
			Jumlah Pasangan Usia Subur	14.112		
15.	Perhubungan	1)	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	112,5	Dinas Perhubungan Kab. Bolmut	
		2)	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,59		
16.	Komunikasi dan Informatika	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,14 %	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bolmut	
			Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	34		
			Jumlah PD	35		
		2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	64,86 %		
			Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	72		
			Jumlah Layanan Publik	111		
		3)	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37,98 %		
			Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	23.576		
			Jumlah Penduduk	62.063		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	16 %	Dinas Perdagangan Kab. Bolmut	
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	4		
			Jumlah seluruh koperasi aktif	25		
		2)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	6,56 %		
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	103		
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	1569		
18.	Penanaman Modal	1)	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	$\frac{1.658.071.922.890 - 1.361.925.590.415}{1.658.071.922.890} \times 100$ $\frac{296.146.332.475}{1.658.071.922.890} \times 100$ <p>= 17.86 %</p>		
			(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota			
			Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota			
			Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, jumlah investasi di Kabupaten dalam satuan Rupiah			
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,59 %	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bolmut	
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	381		
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	23.929		
		2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,65 %		
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	874		
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	23.929		
		3)	Peningkatan Prestasi Olahraga			
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	82 Medali					
20.	Statistik	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bolmut	
			Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	35		
			Jumlah PD	35		
		2)	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan	100 %		



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			evaluasi pembangunan daerah			
			Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	35		
			Jumlah PD	35		
21.	Persandian	1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bolmut	
			Jumlah nilai per area keamanan informasi	-		
			Jumlah area penilaian	-		
22.	Kebudayaan	1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	69,09 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolmut	
			Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	76		
			Jumlah cagar budaya yang terdata	110		
23.	Perpustakaan	1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	54,38	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Bolmut	
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	54,38		
		2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85,89		
24.	Kearsipan	1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	50 %	Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Bolmut	
		2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50 %		
25.	Kelautan dan Perikanan	1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	98,66 %	Dinas Perikanan Kab. Bolmut	
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	5927,766		
			Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	6008 Ton		
26.	Pariwisata	1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11,11 %		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	2	Dinas Pariwisata Kab. Bolmut	
			Jumlah wisatawan tahun n-1	18		
		2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	5,18 %		
			(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	3262		
			Jumlah wisatawan tahun n-1	62.980		
		3)	Tingkat Hunian Akomodasi	10,59 %		
			Jumlah kamar yang terjual	6651		
			Jumlah kamar yang tersedia	62.780		
		4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,26 %		
			Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	9,26		
			Total PDRB Berlaku	3544,12		
		5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,68 %		
			Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	917.106.020,00		
			Total realisasi PAD	11.941.916.303,94		
27.	Pertanian	1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	549,0378	Dinas Pertanian Kab. Bolmut	
			Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	59.631 Ton		
			Luas panen	10.861 ha		
		2)	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	0 %		
			Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	704		
			Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	0		
28.	Kehutanan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA.				
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan.				
30.	Perdagangan	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	93,27 %	Dinas Perdagangan Kab. Bolmut	
			Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	97		



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
			Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	104		
		2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	31,35 %		
			Realisasi	2881,2		
			RDKK	9188		
		3)	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	31,76 %		
			Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	310		
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	976		
31.	Perindustrian	1)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	0,38 % 786 - 783		
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	786		
		2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,3 %		
		3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	Dinas Perdagangan Kab. Bolmut	
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1		
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		4)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %		
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1		
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		5)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100 %		
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1		
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
		6)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Informasi industri : • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi tenaga kerja (10%) • Informasi investasi (10%)	5		
		Kelengkapan informasi industri : • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi bahan bakar/ energy (10%) • Informasi tenaga kerja (10%) • Informasi Investasi (10%)	5		
		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	10		
32.	Transmigrasi	Tidak ada Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Permendagri 19/2024			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.8 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1) Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,95 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolmut	
		Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	99.740.125.919,00		
		Jumlah APBD	625.092.808.931,00		
		2) Rasio PAD	1,93 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolmut	
		Jumlah PAD	11.941.916.303,94		
		Jumlah Pendapatan pada APBD	619.437.602.253,72		
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Inspektorat Daerah Kab. Bolmut	
4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kab. Bolmut	Skor = 3,040		



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		5)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,57 %	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolmut	
			Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures	416.121.713.325,00		
			Jumlah belanja APBD	625.092.808.931,00		
		6)	Opini Laporan Keuangan	8	Inspektorat Daerah Kab. Bolmut	
2.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	Sekretariat Daerah Kab. Bolmut (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Thn 2024 tidak terdapat kontrak infrastruktur senilai 50 M
			Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	-		
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1117		
		2)	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	4,92 %	Sekretariat Daerah Kab. Bolmut (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	
			Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	55 Paket		
			Jumlah seluruh pengadaan	1117		
		3)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	19,97 %	Sekretariat Daerah Kab. Bolmut (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Belanja Operasi : 490.820.470.119,94 Belanja Moda : 69.897.492.461,00
			Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	112.005.086.934,00		
			Total belanja operasi dan modal	560.717.962.580,94		
		4)	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk	-74,65 %		Nilai PBJ Tahun 2024 : 25.833.760.580,00



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			Nilai PBJ Tahun 2023 : 101.905.845.563,00
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	-76.072.084.983,00		
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	101.905.845.563,00		
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,04 %		D1 = 1 D2 = 8 D3 = 82 D4 = 33 S1 = 696 S2 = 89 S3 = 6
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	915	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bolmut	
		Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1005		
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,23 %		
		Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	334		
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1005		



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.	
		3)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,45 %			
			Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	75			
			Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	334			
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	91,63 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolmut		
				Realisasi Belanja			625.092.808.931,00
				Total Belanja APBD			682.209.615.880,94
		2)	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	50,89 %			
				Total PAD dalam realisasi			11.941.916.303,94
				Total PAD dalam APBD			23.465.091.599,00
		3)	Assets Management				
				Apakah ada daftar asset tetap?			Ya
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?			Ya
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?			Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?		Ya				
4)	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,25 %					
		Nilai realisasi SiLPA	29.323.731.950,66				
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	558.803.136.156,10				
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	89,53 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bolmut		
				Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			84.461.650.140,00



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	94.337.438.947,00	Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolmut	
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %		
		Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	1 Dokumen		
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci	1 Dokumen		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk melaksanakan dan mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selengkapnya dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69.33	
		Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.51
			2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.88
			3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	71.48
			4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.13
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.10		
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	49.86	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B
			7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.5			
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.18	
			Angka Kemiskinan	Persen	6.95	
			Gini Rasio	Nilai	0.325	
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	35,401,167
10	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	3.86		
4	Terwujudnya Pertumbuhan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	68.89	



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
	Ekonomi yang Inklusif	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	43.79
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	82.85
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	80.89
		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	68.01

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci dapat dilihat pada tabel berikut in i:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Manusia		Nilai	69.33	69.32	99.99	Data BPS
			1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.51	12.39	99.04	Data BPS
			2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.88	8.61	96.96	Data BPS
			3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	71.48	50	69.95	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
		4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.13	1.2	106.19	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.10	68.56	100.68	Data BPS



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	49.86	73.1	146.61	LHE RB 2024	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	100	LHE AKIP 2024
			7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pemerintahan daerah
			8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.5	82.88	102.96	Laporan SKM Pemda 2024
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.18	5.12	82.85	Data BPS	
			Angka Kemiskinan	Persen	6.95	7.88	86.62	Data BPS	
			Gini Rasio	Nilai	0.325	0.374	84.92	Data BPS	
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	35,401,167	40,643,587.04	114.81	Data BPS
			10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.86	4.10	93.78	Data BPS
4	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Indeks Pembagunan Berkelanjutan	Nilai	68.89	n.a	n.a		
		Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	11	Indeks Pembagunan Infrastruktur	Nilai	43.79	55.95	127.77	Laporan Kinerja Dinas PUPR, Disperkimt an, Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	82.85	78.97	95.32	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	80.89	89.38	110.50	Laporan Kinerja Dinas PUPR
		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	68.01	55.67	81.86	Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Dinas Sosial



2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Disampaikan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	67.83	68.64	101.19	69.33	69.32	99.99	
		Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11.94	12.38	103.69	12.51	12.39	99.04
			2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.55	8.58	100.35	8.88	8.61	96.96
			3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	-	-	-	71.48	50	69.95
			4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	-	-	-	1.13	1.2	106.19
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.34	68.33	99.99	68.10	68.56	100.68		
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	59.99	98.34	49.86	73.1	146.61	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	100	B	B	100
			7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78.5	86.57	110.28	80.5	82.88	102.96
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.92	5.43	91.72	6.18	5.12	82.85	
			Angka Kemiskinan	Persen	8.1	7.9	102.47	6.95	7.88	86.62	
			Gini Rasio	Nilai	0.33	0.38	84.85	0.325	0.374	84.92	
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	-	-	-	35,401,167	40,643,587.04	114.81
			10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.63	4.48	76.58	3.86	4.1	93.78
4	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Indeks Pembaguan Berkelanjutan	Nilai	68.89	n.a	n.a	68.89	n.a	n.a	
		Meningkatkan pelayanan infrastruktur	11	Indeks Pembaguan Infrastruktur	Nilai	-	-	-	43.79	55.95	127.77



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
		yang mendukung performa wilayah									
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	76.9	80.43	104.59	82.85	78.97	95.32
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	-	-	-	80.89	89.38	110.50
		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	-	-	-	68.01	55.67	81.86

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tingkat Kemajuan capaian tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024- 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69.32	70.4	98.47	
		Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.39	12.7	97.56
			2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.61	9.17	93.89
			3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	50	73.2	68.31
			4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.2	1.16	103.45
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.56	68.36	100.29	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73.1	60.03	121.77	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B (64.10)	BB (70.1)	91.44
			7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan	
			8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.88	98.69	
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5.12	6.33	80.88
			Angka Kemiskinan		Persen	7.88	6.35	75.91
			Gini Rasio		Nilai	0.374	0.31	79.35
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	40,643,587.04	37,936,873.00	107.13
			10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.10	3.07	66.45
4	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Indeks Pembangunan Berkelanjutan		Nilai	n.a	70.44	n.a
		Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	55.95	46.18	121.16
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	78.97	83.43	94.65
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	89.38	81.92	109.11
		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	55.67	70.23	79.27

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Perbandingan Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Tingkat Kemajuan	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia		Nilai	69.32	75.02	92.40
		Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.39	13.21	93.79
			2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.61	8.85	97.29
			3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	50	-	-
			4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.2	-	-



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Tingkat Kemajuan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.56	74.15	92.46
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	73.1	B (lebih dari 60)	121.63
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B (lebih dari 60)	100
			7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100
			8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.88	-	-
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5.12	5.03	101.79
			Angka Kemiskinan		Persen	7.88	8.57	108.05
			Gini Rasio		Nilai	0.374	0.381	101.84
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	40,643,587.04	-	-
			10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.1	4.91	116.50
4	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Indeks Pembangunan Berkelanjutan		Nilai	n.a	-	-
		Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	11	Indeks Pembagunan Infrastruktur	Nilai	55.95	-	-
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	78.97	78.84	100.16
		Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	89.38	-	-
		Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	55.67	-	-

2) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan Capaian Kinerja

Di bawah ini kami uraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yang terjadi pada tahun 2024 serta upaya-upaya yang akan dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69.33	69.32	99.99
			1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.51	12.39	99.04
			2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.88	8.61	96.96
			3 Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	71.48	50	69.95
			4 Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.13	1.2	106.19

1) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (LHS)

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2024 adalah 8,61 Tahun, ini maknanya rata-rata penduduk usia 15 tahun keatas dapat menyelesaikan pendidikan hanya sampai pada kelas VIII SMP semester I sehingga tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi antara lain faktor ekonomi, faktor perhatian orangtua, faktor minat anak bersekolah, faktor budaya, dan faktor lokasi sekolah. Kemudian untuk Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024 sebesar 12,39 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,39 tahun atau setara dengan Diploma I atau baru mendaftar pada jenjang D1 (Diploma 1).

Capaian kinerja dalam meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dapat tercapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta didukung dengan program-program pada urusan pendidikan baik



program pada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten. Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partispasi Kasar (APK) merupakan juga factor penting yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kualitas Pendidikan. Angka partisipasi Murni (APM) dan Angka Partispasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk menghitung partisipasi penduduk dalam bersekolah. Pada Tahun 2024 APM tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD/Sederajat. Artinya, jumlah murid SD/Sederajat yang berusia sekolah tepat waktu lebih banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan PT/Sederajat. Semakin tinggi jenjang sekolah yang diikuti maka semakin rendah pula penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Sementara itu, nilai APK yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tersebut menampung penduduk yang usianya belum cukup atau melebihi usia pada jenjang tersebut. Nilai APK terbesar pada tahun 2024 ada pada jenjang sekolah SD/ sederajat sebesar 110,21. Hal ini berarti sebagian murid yang bersekolah SD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara usianya belum cukup ataupun melebihi dari usia wajar untuk sekolah SD/Sederajat.

Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, diperlukan solusi yang komprehensif, yaitu:

6. Meningkatkan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu bisa menyelesaikan sekolah hingga jenjang tinggi.
7. Memperluas Jangkauan Sekolah dan Infrastruktur Pendidikan, terutama di desa-desa terpencil, agar semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
8. Mengembangkan Program Pendidikan Alternatif, seperti sekolah terbuka atau kelas jarak jauh bagi anak-anak yang putus sekolah agar mereka bisa tetap belajar.
9. Meningkatkan Kualitas Guru dan Kurikulum, khususnya di daerah pedesaan, agar kualitas pendidikan lebih merata.



10. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pendidikan Tinggi, dengan memberikan informasi lebih luas tentang peluang beasiswa dan manfaat pendidikan tinggi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat terus meningkat, menciptakan generasi yang lebih berpendidikan dan siap menghadapi tantangan masa depan.

3. Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan

Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2024 yang ditargetkan 71,48% terealisasi hanya mendapatkan 50% dengan Tingkat capaian 65,95%. Walaupun belum sesuai dengan target yang ditentukan, Pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya signifikan dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal. Berikut adalah Upaya dalam pelestarian budaya:

1. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah

Pada Mei 2024, Pemerintah Daerah Bolmut mengadakan Pekan Kebudayaan Daerah yang diisi dengan berbagai kegiatan budaya, termasuk Karnaval Budaya yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kecamatan, dan pelajar. Acara ini dibuka oleh Pejabat Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, yang menekankan pentingnya budaya dalam kemajuan daerah di era globalisasi

2. Kerajinan Tangan dan Kearifan Lokal

Masyarakat Bolmut terus mengembangkan kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Para pengrajin dengan kreatif mengolah material alam menjadi karya seni bernilai estetika dan fungsional tinggi, menunjukkan pelestarian kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Adapun Tantangan dan kegagalan yang dihadapi dalam pelestarian budaya:

1. Degradasi Budaya

Meskipun ada upaya pelestarian, budaya Bolaang Mongondow secara perlahan mengalami degradasi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya



kepedulian dan minat masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda.

2. Kurangnya Dokumentasi dan Promosi

Beberapa objek pemajuan kebudayaan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk dipromosikan dan dilestarikan secara optimal. Kurangnya publikasi mengenai seni pertunjukan etnis Bolaang Mongondow, seperti tari mokuyut, tuitan, mopotobong, kabel, monoduata, dan mosau, mengakibatkan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya ini.

Diperlukan Solusi atau hal-hal yang harus dilakukan dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan, yaitu:

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Mengintegrasikan materi kebudayaan lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya.
2. Pengembangan Infrastruktur Kebudayaan: Mendirikan pusat kebudayaan atau museum lokal yang berfungsi sebagai wadah pelestarian dan komunikasi langsung dengan masyarakat mengenai sejarah dan budaya Bolaang Mongondow Utara.
3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Implementasi Peraturan Daerah yang mendukung pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah perlu diperkuat dan disosialisasikan secara luas.
4. Pemberdayaan Komunitas dan Pelaku Budaya : Mendukung inisiatif lokal dan memberikan pelatihan kepada pelaku budaya untuk memastikan keberlanjutan praktik budaya tradisional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan cakupan pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat ditingkatkan, sehingga warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.



4. Prestasi Pemuda dan Olahraga

Perhitungan indikator Presentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi yang di targetkan 1.13 persen dan terealisasi sebesar 1.20 persen atau capaian sebesar 106 persen, ini adalah jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional 2 orang / Jumlah pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat provinsi atau nasional 2 orang x 100%) + (Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional 63 orang / Jumlah atlet peserta kejuaraan tingkat provinsi atau nasional 160 orang x 100%)/2). Realisasi kinerja Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi melebihi target yang telah ditetapkan. Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepemudaan serta penyelenggaraan multi event dan single event merupakan bagian dari sistem kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan kepemudaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tentang sistem kepemudaan dan keolahragaan nasional disebutkan bahwa untuk menumbuh kembangkan prestasi pemuda dan olahraga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan setiap tahunnya sebagai ajang untuk mengukur minat, bakat dan kemampuan atlet yang telah berlatih.

Keberhasilan pencapaian indikator dikarenakan dukungan dari anak-anak didik dari Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), kerjasama antara Pelatih dan Atlet yang tidak Pernah lelah melatih Atlet dan Keseriusan Atlet Mengikuti Latihan dan Keikutsertaan para atlet untuk mengikuti setiap event-event tournament. Hal hal lain yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja tersebut, yaitu : 1. Kegiatan Kejuaraan/event olahraga tingkat provinsi; 2. Kegiatan Kewirausahaan Pemuda.

Solusi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan Presentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi, yakni:



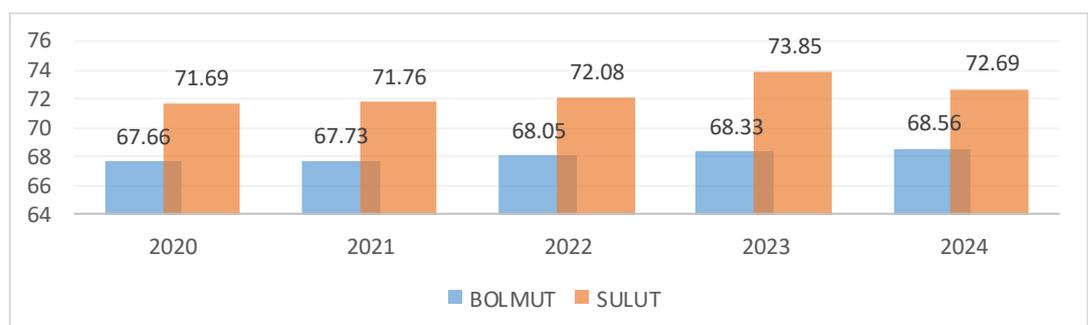
1. Dukungan sumber daya, seperti biaya, fasilitas, dan pelatih, memadai, maka kemungkinan mencapai target persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi dapat meningkat. Kembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemuda, seperti fasilitas olahraga, pusat kegiatan pemuda, dan ruang komunitas.
2. Pengakuan dan penghargaan untuk pemuda berprestasi dan atlet berprestasi memadai, maka kemungkinan mencapai target persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi dapat meningkat.

Berikan pengakuan dan penghargaan kepada pemuda dan atlet yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat mereka.

5. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH, merupakan satu komponen pembentuk IPM dari aspek kesehatan. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 68,56 tahun, itu artinya meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020 - 2024



Sumber : Data BPS Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus meningkat, yaitu dari angka 68,05 tahun pada 2022 menjadi 68,33 tahun pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 68,56. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup mencapai 68,56 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 68-68,9 tahun. Walaupun Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah angka provinsi dan nasional namun selalu menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Grafik 2.8
Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024



Sumber: Data BPS Tahun 2025

Semakin membaiknya angka harapan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya didukung oleh beberapa kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesehatan, seperti: menurunnya angka kematian bayi, prevalensi stunting, persentase penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, akses layanan kesehatan, dan kualitas air dan sanitasi.



Faktor lain yang mendukung adalah adanya fasilitas Kesehatan yang cukup memadai. Fasilitas kesehatan merupakan sarana yang penting pada suatu daerah. Akses warga terhadap fasilitas kesehatan akan meningkatkan kesadaran penduduk akan kesehatan juga meningkatkan kualitas hidup penduduk. Terdapat 12 unit Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada Tahun 2022 sedang dilaksanakan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bintauna dan di tahun 2024 sudah bisa beroperasi, dengan adanya penambahan rumah sakit baru maka Kabupaten Bolmut sudah memiliki dua rumah sakit yang terletak di Kecamatan Bolangitang Barat dan di Kecamatan Bintauna. Penambahan fasilitas kesehatan yang baru diharapkan dapat mengurangi tanggungan tiap-tiap fasilitas kesehatan sehingga kualitas dan waktu pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin ditingkatkan.

Solusi untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :

1. Memperluas Akses Layanan Kesehatan :

- Meningkatkan jumlah tenaga medis dan membangun lebih banyak puskesmas di daerah terpencil.
- Mempermudah layanan ambulans dan transportasi bagi masyarakat di daerah sulit terjangkau.

2. Meningkatkan Program Pencegahan Penyakit :

- Mendorong pola hidup sehat dengan kampanye gizi seimbang dan olahraga rutin.
- Memperkuat program pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

3. Mengatasi Stunting dan Malnutrisi :

- Memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya gizi seimbang.



- Memastikan program bantuan makanan bergizi bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu berjalan optimal.

4. Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik :

- Meningkatkan pengelolaan limbah dan sanitasi agar tidak berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.
- Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian untuk mencegah pencemaran sumber air.

Dengan memperkuat strategi-strategi tersebut, diharapkan angka harapan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat terus meningkat, mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan sehat.

Tabel 2.12
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	49.86	73.1	146.61	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	100
		2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100
		3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.5	82.88	102.96

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang mongondow Utara



ditargetkan 49,86 pada tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan nilai 73,1 atau Predikat “BB”, dengan tingkat capaian dari target adalah 146,61%.

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan Mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai oleh:

1. Terpenuhinya Data Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi RB baik RB General maupun RB Tematik Tahun 2024.
2. Meningkatnya 20 Nilai Indikator RB General sebagai Indikator Pendukung Indeks RB walaupun masih terdapat kekurangan yaitu dari 21 kegiatan utama masih terdapat 2 kegiatan utama yang perlu mendapat perhatian khusus karena belum mendapatkan nilai, kegiatan utama yang dimaksud ialah “Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik” dengan indikator kegiatan “Indeks Kualitas Kebijakan” dan kegiatan utama “Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional” dengan indikator kegiatan “Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.
3. Meningkatnya 5 capaian indikator RB Tematik sebagai Indikator Pendukung Indeks RB Walaupun masih ada kekurangan pada indikator Pengendalian Inflasi karena belum mendapatkan nilai.

Untuk lebih meningkatkan Implementasi Indeks Reformasi Birokrasi, diperlukan solusi yang komprehensif :



1. Menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama dengan target yang jelas dan terukur..
2. Meningkatkan anggaran Diskominfo si agar dapat mendukung pencapaian indikator kegiatan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Melakukan penguatan terhadap pelaksanaa kegiatan utama “Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik” dalam pencapaian indikator kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan dan Pimpinan perlu menetapkan unit kerja penanggung jawab kegiatan.
4. Memperkuat sistem pengaduan masyarakat berbasis digital yang dapat diakses dengan cepat dan transparan.
5. Mengadakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit organisasi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan indeks reformasi birokrasi lebih meningkat dan permasalahan yang ada dapat diatasi.

2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat EKPPD, merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil EKPPD akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah, serta dasar pengambilan kebijakan otonomi daerah.

EKPPD dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD, yang



disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagai sumber informasi utama. LPPD menjadi amanat pelaksanaan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

LPPD dan EPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar EPPD. EPPD dilakukan setiap tahun oleh Tim Nasional dan Tim Nasional melakukan penentuan skor kinerja dan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri selama dua tahun berturut-turut tidak menetapkan secara resmi skor kinerja dan peringkat kinerja atas EKPPD Tahun 2020 berdasarkan LPPD Tahun 2019, serta EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD Tahun 2020.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, maka Penyusunan LPPD dan pelaksanaan EKPPD telah mengalami perubahan yang mencakup perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara jumlah dan substansi dan format penyajian data dukung; proses penilaian LPPD melalui EKPPD;



serta metode penetapan skor kinerja, status kinerja, dan peringkat; dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. LPPD Tahun 2024 mulai mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024. Perbandingan perubahan skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pedoman EKPPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengevaluasi LPPD Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Hasil EKPPD yang telah diraih Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	SKOR	STATUS	KET.
1	2021	3,0500	Sedang	Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023
2	2022	3,3341	Sedang	Keputusan Mendagri No. 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

Hasil EKPPD Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meraih peringkat pertama pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang mongondow Utara ditargetkan dengan predikat B pada tahun 2024. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024



yang disampaikan oleh Kementerian PAN-RB, Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan nilai 64,10 atau Predikat “B”, dengan tingkat capaian dari target adalah 100%.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pencapaian Nilai SAKIP, namun masih terdapat banyak catatan kekurangan ataupun rekomendasi dari Kemenpan RB yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rekomendasi ataupun tindak lanjut dapat dilihat dari Tabel Matriks Tindak Lanjut di bawah ini.

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1.	Melakukan reviu atas dokumen perencanaan kinerja pada seluruh PD guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah menggambarkan kinerja utama PD serta berorientasi hasil (outcome) dan sesuai dengan jenjang levelnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen perencanaan kinerja seluruh PD.2. Membandingkan rumusan tujuan dan sasaran dengan visi, misi, serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.3. Menilai kesesuaian tujuan dan sasaran dengan level kewenangan masing-masing PD.4. Memberikan bimbingan teknis kepada PD dalam menyusun ulang tujuan dan sasaran agar lebih sesuai dengan prinsip perencanaan kinerja berbasis hasil (outcome-based).
2.	Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan agar pohon kinerja yang disusun telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek- aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Dengan demikian, hubungan kinerja, strategi,	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun ulang pohon kinerja berdasarkan hasil analisis dan integrasi CSF.2. Memastikan keterkaitan antara tujuan strategis, sasaran kinerja, indikator kinerja utama (IKU), serta strategi yang digunakan.3. Memperkuat hubungan antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup	dalam struktur pohon kinerja. 4. Mengadakan forum diskusi atau focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait.
3.	Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terutama pada PD, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran	1. Menyusun atau mengganti indikator kinerja yang lebih sesuai dengan kriteria SMART. 2. Memeriksa kesesuaian indikator dengan sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah. 3. Menentukan indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur untuk setiap sasaran strategis yang baru, memastikan indikator tersebut mampu mendorong continuous improvement. 4. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) atau pertemuan dengan perangkat daerah untuk membahas hasil reviu
4.	Meningkatkan kualitas dokumen IKU seluruh PD dengan menyajikan informasi terkait formula perhitungan/definisi operasional pada masing-masing indikator, sumber data dan penanggung jawab	1. Melaksanakan workshop atau pelatihan bagi perangkat daerah terkait implementasi dokumen IKU yang telah diperbaiki. 2. Memberikan format penyusunan dokumen IKU yang sesuai dengan standar. 3. Melakukan evaluasi penerapan dokumen IKU yang telah diperbaiki
5.	Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment	1. Menetapkan Aturan Terkait Reward dan Punishment sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment 2. Menetapkan kriteria dan bobot penilaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), capaian program, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan. 3. Mengintegrasikan penilaian



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
		kinerja PD dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.
6.	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memantau capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) sehingga konsistensi antara perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja dapat terus terpantau	<ol style="list-style-type: none">1. Mendesain sistem berbasis web/aplikasi untuk input, pemantauan, dan analisis kinerja.2. Mengintegrasikan sistem monev dengan platform perencanaan dan evaluasi kinerja yang ada.3. Memastikan setiap PD menggunakan sistem untuk melaporkan dan memantau capaian kinerja secara berkala.
7.	Meningkatkan keandalan, kebaruan data kinerja dan kedalaman analisis capaian kinerja pada laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD serta memastikan laporan kinerja telah direviu dengan baik oleh inspektorat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun format Laporan Kinerja yang sesuai dengan standar untuk digunakan Pemda maupun PD dalam penyusunan LKJIP.2. Melaksanakan workshop atau pelatihan bagi perangkat daerah terkait peningkatan kualitas Laporan Kinerja.3. Memastikan Inspektorat memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada PD untuk menyempurnakan laporan sebelum finalisasi.
8.	Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP OPD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa hasil evaluasi dari LPPD & LAKIP OPD digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya (RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD).2. Menyesuaikan target indikator kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kapasitas yang tersedia.3. Melaksanakan evaluasi triwulanan untuk memastikan strategi yang diterapkan telah



No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
		membawa perbaikan terhadap indikator kinerja yang rendah.
9.	Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi kinerja pada sebagian LAKIP Perangkat Daerah dengan menyajikan analisis mendalam terhadap faktor pendukung keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi ke depan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun format Laporan Kinerja yang sesuai dengan standar untuk digunakan Pemda maupun PD dalam penyusunan LKjIP.2. Melaksanakan workshop atau pelatihan bagi perangkat daerah terkait peningkatan kualitas Laporan Kinerja.3. Melakukan pendampingan teknis / desk evaluasi bagi PD untuk menyempurnakan laporan sebelum finalisasi.
10.	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan instrumen evaluasi dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.2. Memastikan bahwa temuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kelemahan substantif dalam implementasi SAKIP.3. Mengembangkan template rekomendasi agar lebih sistematis dan langsung dapat ditindaklanjuti oleh PD.4. Pemantauan implementasi rekomendasi melalui Laporan tindak lanjut berkala dari PD yang telah diberikan rekomendasi.
11.	Memastikan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang pada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mendorong perbaikan pada	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	manajemen kinerja SAKIP	kualitas implementasikan SAKIP

4) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga penilaian dari hasil audit yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit, antara lain berupa 1). Opini audit atas laporan keuangan, 2). Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, dan 3) Ketaatan pada perundang-undangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Trend positif atas opini BPK menunjukkan bahwa terjadi perbaikan secara berkelanjutan atas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaporan Tahun Anggaran 2024 masih dalam audit.

Keberhasilan dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar tanpa kesalahan material, dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini didukung oleh sistem digitalisasi anggaran (e-



budgeting), peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang efektif oleh Inspektorat Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan opini WTP dikarenakan memiliki manajemen aset yang baik dan tidak ditemukan penyimpangan signifikan dalam penggunaan anggaran.

Untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan solusi yang komprehensif:

1. Memastikan seluruh pegawai memahami prinsip tata kelola keuangan yang baik.
2. Melakukan pendataan aset secara berkala dan memastikan pencatatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi penggunaan anggaran sebelum diaudit oleh BPK.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur berupa Pelatihan berkala bagi pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan, audit, dan perencanaan anggaran diperlukan agar mereka lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.
5. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini adalah untuk mendapatkan pengukuran persepsi dan harapan masyarakat dan atau institusi selaku pengguna jasa dengan melakukan survei, analisis dan pemetaan terhadap kinerja pelayanan publik perangkat daerah.

Nilai IKM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami Tren kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Pada tahun 2020, capaian sebesar 80,35, yang kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 85,38. Terjadi kenaikan 6,26 %.



Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan atau kepuasan masyarakat yang cukup signifikan. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 82,24, (turun 3,67%) yang bisa mengindikasikan adanya kendala atau perubahan dalam pelayanan yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan tertinggi dalam periode ini, mencapai 86,57. (kenaikan 5,27%) Ini bisa menunjukkan adanya upaya perbaikan yang efektif setelah penurunan di tahun sebelumnya. Tahun 2024 kembali menurun ke angka 82,88. (Turun 4,27%). Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa meskipun ada kenaikan yang cukup besar di beberapa tahun, terdapat juga fluktuasi dengan penurunan signifikan di beberapa periode, terutama dari 2023 ke 2024.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai oleh:

1. Terlaksananya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat dari seluruh SKPD/UPPP telah melaporkan hasil SKM dan terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.
2. Perlu adanya Peningkatan Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
3. Rendahnya dukungan dan komitmen pimpinan perangkat Daerah dalam pelaksanaan SKM.
4. Sebanyak 32 SKPD/UPP masih dalam pendampingan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan SKM.

Untuk lebih meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diperlukan solusi yang komprehensif:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.



2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan pendekatan ini, diharapkan indeks reformasi birokrasi lebih meningkat dan permasalahan yang ada dapat diatasi.

Tabel 2.13
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	68.89	n.a	n.a
	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	43.79	55.95	127.77
	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	82.85	78.97	95.32
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	80.89	89.38	110.50
	Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	4 Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	68.01	36.03	52.98

1) Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2024, data spesifik mengenai Indeks Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Adapun informasi atau gambaran umum tentang Indeks Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diuraikan di bawah ini.



Indeks Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs), adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunannya.

1. Integrasi SDGs dalam Perencanaan Daerah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bolmut menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen ini menekankan pentingnya integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rencana kerja setiap perangkat daerah.

2. Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum

Untuk mendukung implementasi SDGs, Bolmut membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024. Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan penilaian mandiri terkait reformasi hukum, yang merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan SDGs, khususnya terkait dengan keadilan dan institusi yang kuat.

3. Publikasi Data dan Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolmut secara rutin menerbitkan publikasi seperti "Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2024" dan "Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023/2024". Publikasi ini menyediakan data komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dengan indikator SDGs.

4. Tantangan dan Peluang

Meskipun langkah-langkah strategis telah diambil, Bolmut menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat dan terkini untuk semua indikator SDGs. Namun, dengan adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

5. Rekomendasi



- Peningkatan Kapasitas Data: Memperkuat sistem pengumpulan dan pengelolaan data untuk memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan dalam pemantauan SDGs.
- Kolaborasi Multi-Pihak: Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam implementasi program terkait SDGs.
- Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SDGs melalui program edukasi dan kampanye publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1) Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan perkembangan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu:

1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU)

Indeks ini mencakup infrastruktur yang dikelola oleh sektor Pekerjaan Umum, seperti jalan, jembatan, sumber daya air, sanitasi, dan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Beberapa indikator yang digunakan dalam indeks ini meliputi:

- Panjang dan kualitas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Ketersediaan jembatan dan kualitasnya.
- Akses terhadap air bersih dan sistem drainase.
- Infrastruktur sanitasi dan pengelolaan limbah.

2. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indeks ini menilai kualitas dan aksesibilitas perumahan serta infrastruktur dasar di kawasan permukiman, seperti:

- Ketersediaan perumahan yang layak huni.
- Akses terhadap listrik, air minum, dan sanitasi.



- Kualitas lingkungan permukiman, termasuk pengelolaan sampah dan drainase.
- Kepadatan hunian dan keterjangkauan harga rumah.

3. Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan

Indeks ini mencerminkan kualitas dan ketersediaan layanan transportasi di suatu wilayah, yang meliputi:

- Panjang dan kondisi jalan serta jembatan yang mendukung mobilitas.
- Kualitas dan cakupan layanan transportasi umum, seperti bus, kereta api, dan angkutan massal lainnya.
- Infrastruktur pelabuhan, bandara, dan terminal.
- Keamanan dan kenyamanan transportasi publik.

Ketiga indeks ini digunakan secara bersama-sama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi infrastruktur di suatu wilayah dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan merata.

Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bolaang mongondow Utara ditargetkan mendapatkan nilai 43,79 dan terealisasi mendapatkan nilai 55,95 pada tahun 2024 dengan tingkat capaian dari target adalah 127,77%. Berdasarkan hal di atas menunjukkan Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pencapaian Indeks Pembangunan Infrastruktur, peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Infrastruktur PU, meningkatnya Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman walaupun pada Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan masih belum mencapai target yang ditentukan. Dapat dilihat pada table dibawah ini.

No.	Indikator	Nilai
1.	Indeks Infrastruktur PU	79.04
2.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	48.8
3.	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	40



Indeks Pembangunan Infrastruktur	55.95
---	--------------

Terdapat faktor kegagalan maupun keberhasilan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Infrastruktur, yakni :

1. Dari segi Indeks layanan infrastruktur perhubungan, Dinas Perhubungan telah menetapkan target mendapatkan nilai 51 untuk indeks layanan infrastruktur perhubungan pada tahun 2024, terealisasi mendapatkan nilai 40 masih di bawah target yang ditentukan. Ini disebabkan oleh Pertama, kurangnya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan, yang menyebabkan banyak perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan penerangan jalan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan mengurangi efisiensi transportasi. Kedua, terbatasnya anggaran dan alokasi dana, terutama di daerah terpencil, menyebabkan keterlambatan dalam perbaikan serta pembangunan perlengkapan jalan dan terminal. Selain itu, dalam penyelenggaraan terminal tipe C, kegagalan dapat terjadi akibat minimnya standar fasilitas, seperti ruang tunggu, area parkir yang memadai, dan aksesibilitas bagi pengguna. Kurangnya pengawasan dalam pembangunan dan pengelolaan terminal juga mengakibatkan terminal yang tidak berfungsi optimal. Ditambah lagi, rendahnya tingkat koordinasi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun pusat, menyebabkan perencanaan dan eksekusi pembangunan fasilitas terminal menjadi tidak efektif. Solusi yang harus dilakukan dalam untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan fasilitas, serta optimalisasi perencanaan pembangunan agar infrastruktur transportasi dapat berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
2. Dari segi Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan target untuk nilai Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada tahun 2024 sudah melampaui target yang ditentukan yakni 33,33 dengan



realisasi mencapai 48,8. Ini dilihat dari meningkatnya jumlah rumah yang direnovasi atau dibangun kembali, serta berkurangnya luas area permukiman kumuh di berbagai daerah. Program rehabilitasi permukiman telah membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan lainnya terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, yang sebelumnya terbatas di kawasan kumuh. Pendekatan berbasis komunitas dalam perbaikan infrastruktur juga terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak huni.

Solusi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman,

1. Untuk menangani rumah tidak layak huni dan mengurangi luas permukiman kumuh, diperlukan solusi yang sistematis dan berkelanjutan.
2. Pemerintah harus memperkuat program renovasi dan pembangunan rumah layak huni melalui skema bantuan sosial.
3. Perbaikan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi yang layak, dan jaringan listrik harus diprioritaskan agar lingkungan permukiman lebih sehat dan nyaman.
4. Menerapkan regulasi tata ruang yang lebih ketat untuk mencegah munculnya kembali kawasan kumuh, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
5. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam program peremajaan kawasan kumuh serta edukasi tentang pentingnya hunian yang sehat dan layak harus diperkuat.
6. Dari segi Indeks Infrastruktur PU, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menetapkan target untuk nilai Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, pada tahun 2024 sudah melampaui target yang ditentukan yakni 58,84 dengan realisasi mencapai 79,04. Ini dilihat dari, Pertama Persentase kondisi mantap Jalan Kabupaten Hasil kegiatan Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Konsultan menyajikan data kondisi jalan kewenangan



Kabupaten sebagaimana SK Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 04 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten, menghasilkan data tingkat kemantapan jalan sebesar 64.11%. Hasil ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan kondisi Rusak Berat Jalan sepanjang 35.84 KM dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sepanjang 2.38 KM. Secara presentase kondisi rusak berat jalan sebesar 22.86% dari total Ruas Jalan Kabupaten. Tahun 2024 Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan kegiatan Rekonstruksi, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang kurang lebih 10 KM dengan anggaran total Rp 24.47 Milyar Rupiah yang tersebar pada beberapa ruas jalan. Namun terdapat 3 Ruas Jalan yang merupakan jalan Desa yang tidak masuk dalam penetapan Ruas Jalan Kabupaten sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja kondisi kemantapan jalan Kabupaten. Kedua, Hasil survey yang dilakukan secara internal oleh Bidang SDA Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan data bahwa 3.012 Ha areal dari Daerah Irigasi terdampak kondisi baik jaringan Irigasi. Tahun 2024 dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi pada 7 Daerah Irigasi yaitu D.I Pontak, D.I Inomunga, D.I Bigo, D.I Soligir, D.I Ollot, D.I Sonuo dan D.I Binjeita dengan total Anggaran mencapai 2.3 Milyar Rupiah dengan tambahan anggaran yang bersumber dari Insentif Fiskal Tahun 2024. Ketiga, dilaksanakannya pekerjaan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan di Kecamatan Bolangitang Barat dan Kaidipang dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Saleo dan Talaga Tomoagu dengan Total Anggaran pada Program Pengembangan Air Minum mencapai 1.77 Milyar Rupiah memberikan kontribusi sehingga menambah jumlah sambungan rumah air minum yang dikelola, meskipun belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan namun capaian telah maksimal. Keempat, hasil survei dan pendataan dari Bidang Cipta Karya menunjukkan data 23.050 Rumah tangga telah mengakses pengolahan air limbah untuk sanitasi layak tahun 2024. Dengan adanya tambahan anggaran Insentif fiskal dalam rangka penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SPM dilakukan



penmbangunan dan penyediaan tangki septic komunal yang tersebar sebanyak 60 Sambungan Rumah dengan Total Anggaran mencapai 861.6 Juta Rupiah. Kelima, Capaian sebesar 72,41% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan BUJK yang ada di Kabupaten mampu meningkatkan kualitas produktivitas, maupun keselamatan kerja. Dari 21 BUJK yang menjalankan usahanya tercatat telah memiliki Tenaga Kerja Konstruksi yang dilatih dan disertifikasi oleh pelatihan yang dilaksanakan Dinas PUTR pada tahun-tahun sebelumnya.

Solusi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan Indeks Infrastruktur PU,

1. Menyusun rencana prioritas penananganan jalan berdasarkan kondisi ruas jalan kewenangan kabupaten, mengoptimalkan Dukungan Anggaran DAK teamatik dan DAU-SG serta dukungan anggaran lainnya dalam penyelenggaraan jalan, serta melakukan Survey dan Pemantauan secara berkala terkaait kondisi Jalan dan Jembatan.
2. Optimalisasi dan pemeliharaan rutin maupun berkala dilakukan untuk mengoptimalkan layanan air pada Daerah Irigasi khususnya pada Daerah Irigasi yang belum tertangani kerusakannya.
3. Menyusun Rencana Penerapan SPM untuk Pemenuhan Air Minum, Mengoptimalkan kinerja pengelolaan UPTD SPAM-Pal dalam mengelola pemeliharaan dan meningkatkan layanan sambungan rumah air minum, meningkatkan kegiatan penyelenggaraan SPAM dalam rencana tahunan mengingat kurangnya dukungan APBD khususnya yang bersumber dari DAU.
4. Menyusun Rencana Penerapan SPM untuk Pemenuhan Pengolahan Air Limbah, Melakukan survey dan pendataan secara berkala.
5. Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja BUJK yang ada di Daerah, Peningkatan Kualitas SDM Konstruksi dengan pelatihan jenjang Analis dan Operator, meningkatkan pengawasan implementasi peraturan jasa konstruksi pada setiap proyek di Daerah



2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup KLH

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 82,85% terealisasi 78,97 % dengan capaian sebesar 95,32% pada Tahun 2024. Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) unsur parameter yang diukur :

- Kualitas Udara : diukur berdasarkan kadar polutan udara seperti SO₂, NO₂, CO, dan PM₁₀.
- Kualitas Air : diukur berdasarkan kadar polutan air seperti BOD, COD, pH, dan lain-lain.
- Tutupan lahan : diukur berdasarkan luas area hijau per kilometer persegi.

Indeks Kualias Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow utara berada dalam kondisi tidak tercemar. Ketercapaian IKLH tahun 2024 ini terdiri dari indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan yang berada di atas batas nilai baku mutu. IKLH memiliki skala yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengukuran, yaitu:

- a. Sangat Baik : 80-100
- b. Baik : 60-79
- c. Sedang : 40-59
- d. Kurang : 20-39
- e. Sangat Kurang : 0-19

Untuk itu, meskipun target IKLH tahun ini meleset dari target namun kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dalam kondisi “baik”. Terdapat faktor kegagalan dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yakni:

1. Terjadi penurunan angka indeks kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).
2. Pengaruh faktor alam, seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim, dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kualitas air, selain itu terjadi banjir di beberapa titik di tahun 2024 hal ini juga dapat memicu menurunnta indeks kualitas air.



3. Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kualitas udara.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara yang baik dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kualitas udara.
5. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan pemantauan kualitas udara, dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kualitas udara.

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, diperlukan solusi yang komprehensif yakni:

1. Melakukan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat terhadap kesadaran lingkungan dan dalam pengelolaan lingkungan.
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi petugas pengelola lingkungan.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.
4. Melakukan kerja sama antar instansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lingkungan.

3) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Rencana tata ruang wilayah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan yang dipandang perlu sangat prioritas dan memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan. Rencana tata ruang memuat rancangan yang bersifat umum dan masih diperlukan rencana tata ruang yang merinci dan mengoperasionalkan rencana tata ruang wilayah seperti rencana dasar tata ruang kawasan perkotaan dan rencana tata ruang kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Adapun tolak ukur indikator ini yaitu dapat dilihat dari tingkat jumlah rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan bagi para pengguna. Data dan informasi yang diperoleh Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bersumber dari aplikasi SiPetarung. Dilihat dari aplikasi tersebut sampai dengan



Tahun 2024 terdapat 292 pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang dan 261 pengajuan atau 89,38% dapat diterima dan sesuai dengan pemanfaatan ruang.

Keberhasilan pencapaian indicator ini tidak lepas dari telah dilakukannya digitalisasi proses rekomendasi kesesuaian ruang sehingga efektivitas penyelenggaraan tata ruang meningkat. Selain itu juga dengan adanya platform aplikasi SiPetarung tersebut masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan regulasi tata ruang daerah.

Solusi dalam mendorong Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yakni sebagai dasar pemberian rekomendasi tata ruang perlu untuk percepatan penyelesaian penyusunan dokumen Perubahan RTRW dan RRTR yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Adapun tahapan yang akan dilakukan adalah pelaksanaan koordinasi persetujuan substansi RTRW dan RRTR.

4) Persentase Penanggulangan Bencana

Persentase Penanggulangan Bencana pada tahun 2024 yang ditargetkan 68,01% terealisasi mendapatkan nilai 55,67% dengan Tingkat capaian 81,86%. Persentase Penanggulangan Bencana dapat diukur dengan Ketangguhan Masyarakat terhadap bencana, bagaimana warga yang terdampak bencana terlayani, Akibat dari kejadian bencana yang direkomendasikan akan direhabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kasus Kebakaran yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit. Hal-hal di atas yang menjadi kuci penting dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD pada Tahun 2024 telah menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menghadapi bencana.

Pada tanggal 1 Maret 2024, Bolmut mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang signifikan. Pemerintah daerah merespons dengan mengaktifkan pos komando tanggap darurat selama 14 hari, dari 1 hingga 14 Maret 2024. Struktur pos komando ini melibatkan berbagai unsur, termasuk Penjabat Bupati sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai komando, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi antara BPBD, pemerintah desa, dan instansi



lainnya dalam kajian cepat dan distribusi bantuan telah membantu mengurangi dampak bencana. Sosialisasi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan telah membantu masyarakat lebih siap menghadapi bencana, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam program penanganan bencana, khususnya dalam aspek respons kemanusiaan, pemulihan sosial ekonomi, dan rehabilitasi pascabencana. Dari Program Tersebut terdapat jumlah laporan kejadian bencana social dan alam yang ditangani dari total korban kejadian bencana yaitu berjumlah 1000 Orang/KK.

Peran Satpol PP pun tidak kalah penting dalam penanggulangan bencana, ini dilihat dari Kasus Kebakaran yang Tertangani di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jumlah Kejadian Kebakaran yang tertangani selang tahun 2024 ada sebanyak 4 kali kejadian dari 5 kasus kebakaran yg terjadi, adapun kejadian kebakaran ditahun 2024 yang tertangan sesuai SOP masing-masing terjadi di Desa Boroko Utara Kecamatan Kaidipang, Desa Bolangitang II kecamatan Bolangitang Barat, Desa Bolangitang I Kecamatan Bolangitang Barat dan Desa Kuala Kecamatan Kaidipang, Selain itu terjadi kebakaran di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman, Dalam kategori kebakaran yang berhasil tertangani, organisasi kami mencatatkan hasil yang signifikan. Berkat koordinasi yang baik antara tim pemadam kebakaran, instansi terkait, serta masyarakat, lebih dari 90% kebakaran yang terjadi di wilayah tanggung jawab Satpol PP dapat diatasi dengan cepat dan efektif. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelatihan rutin yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran, kesiapan armada damkar dengan posisi siap, serta komunikasi yang cepat. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada mitigasi risiko, seperti pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, turut berperan penting dalam menurunkan angka kebakaran yang lebih besar.

Kejadian Kebakaran di satu Desa ini tidak tertangani, karen dalam penanganan kejadian kebakaran ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bidang Damkar hanya melakukan pendinginan dan penyiraman pada lokasi kejadian kebakaran, hal ini di karenakan jarak tempuh pada lokasi kejadian yang



cukup jauh, Namun, dalam beberapa kasus, ada juga kebakaran yang tidak tertangani secara maksimal. Hal ini biasanya terjadi pada kebakaran yang disebabkan adanya kosleting listrik atau lokasi yang sulit dijangkau, seperti luas wilayah dan letak geografis dengan gari pantai yang memanjang dari arah barat ke timur. Satpol PP terus berusaha untuk meningkatkan kapabilitas dalam menangani situasi semacam ini dengan mengadakan simulasi kebakaran di berbagai kondisi serta melibatkan lebih banyak pihak dalam kolaborasi penanggulangan kebakaran. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengidentifikasi daerah rawan kebakaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif. Dapat disimpulkan dalam penanganan kebakaran masih belum 100%, hal ini dikarenakan adanya kebakaran yang terjadi di lokasi yang jarak tempuhnya cukup jauh dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja, namun untuk meningkatkan Kinerja serta siap tanggap penanganan kebakaran ini Satuan Polisi pamong Praja melalui Bidang Damkar selalu berkoordinasi dengan Pihak dan Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pencegahan bahaya kebakaran. Selain itu Bidang Damkar telah melakukan Pembagian Piket untuk penanggulangan kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi, penanggulangan kebakaran ini berjalan sesuai SOP tentang Penanggulangan Kebakaran, di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Damkar melaksanakan Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur bagi anggota Pemadam kebakaran yakni Pelatihan Pemadam kebakaran.

Solusi untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat terhadap bencana, yaitu:

1. Menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan sedini mungkin di sekolah maupun di desa-desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menghadapi bencana.
2. Memanfaatkan Teknologi dalam Informasi Bencana, menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk menyebarkan peringatan dini bencana.
3. Membangun infrastruktur tanggap bencana, infrastruktur seperti jalur evakuasi dan posko tanggap darurat mulai diperbaiki dan dibangun.



4. Perlu adanya peningkatan dana mitigasi bencana baik dari APBD maupun dana bantuan dari pemerintah pusat.
5. Menambah jumlah mobil pemadam kebakaran dan menempatkan posko Damkar di daerah yang rawan kebakaran.

2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017 Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Tabel 2. 15
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	Persen	100	40,532,255,790.00	22,275,668,330.00	99.45
		Persentase SD/ MI terakreditasi A	Persen	24.73	40,532,255,790.00	22,275,668,330.00	97.78
		Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	Persen	30	40,532,255,790.00	22,275,668,330.00	98.17
		Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	Persen	65.65	40,532,255,790.00	22,275,668,330.00	99.16
		Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan	Persen	100	40,532,255,790.00	22,275,668,330.00	99.45



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
		karakter					
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Persen	12.82	825,977,330.00	794,551,264.00	92.50
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	Persen	46.87	451,478,600.00	336,745,950.00	98.41
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Data Sejarah yang Ditata	Persen	50	251,937,730.00	150,541,080.00	98.80
5	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	Persen	25.46	937,564,300.00	857,329,486.00	96.41
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	84	1,616,856,850.00	986,976,780.00	99.27
		Persentase pemuda berprestasi	Persen	100	1,616,856,850.00	986,976,780.00	99.39
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase organisasi olahraga yang aktif	Persen	92.86	2,186,717,254.00	2,071,659,662.00	98.98
		Presentase atlet berprestasi	Persen	39.37	2,186,717,254.00	2,071,659,662.00	97.59
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	67	1.214.039.400	1.189.449.529	#VALUE!
		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	Persen	100	358,335,400.00	334,054,700.00	99.07
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	4,537,971,700.00	4,181,151,430.00	99.08
9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase program pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan perencanaan	Persen	100	61,313,200.00	57,137,600.00	99.07
		Persentase fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat	Persen	100	167,580,590.00	83,907,950.00	99.50
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	318,501,700.00	274,634,795.00	99.14
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	Persen	100	1,401,744,000.00	1,400,401,493.00	99.00



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
		Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	Persen	62	28,866,642,366.00	27,976,343,062.00	98.44
		Persentase Penataan Peningkatan	Persen	100	82,597,400.00	81,417,500.00	99.01
11	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah	Persen	98.18	991,416,650.00	803,222,238.00	99.17
12	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% -100%)	Persen	89.22	548,866,050.00	431,598,949.00	99.12
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi / penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	440.92	1,099,839,600.00	1,068,113,154.00	99.78
		Persentase kematangan inovasi	Persen	72	819,917,950.00	753,099,206.00	98.72
14	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	Persen	201.59	731,331,300.00	667,422,963.00	99.55
15	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persen	96.67	370,577,150.00	344,003,758.00	99.04
16	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN dan Persentase Ketepatan Waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	92.5	1,810,351,150.00	1,470,109,747.00	99.12
17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100	289,099,550.00	252,973,132.00	99.12
18	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	98	6,179,421,978.00	6,063,680,445.00	99.00
19	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	Persen	65.43	25,987,500.00	24,236,000.00	98.57
20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes sesuai regulasi yang berlaku	Persen	92.14	177,593,450.00	163,646,900.00	99.00
21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	92.3	1,026,434,150.00	947,441,080.00	99.00



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
22	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	Persen	85	748,754,950.00	624,466,800.00	99.02
23	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	Persen	100	923,879,850.00	910,372,263.00	99.01
24	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasi	Persen	100	-	-	0.00
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran					#DIV/0!
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan					#DIV/0!
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan					#DIV/0!
26	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah					#DIV/0!
27	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah					#DIV/0!
28	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	75	400,850,000.00	400,850,000.00	98.67
29	Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	75	457,980,161.00	457,980,161.00	98.67
30	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	85	199,275,750.00	199,275,750.00	98.82
31	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	1.15	699,997,150.00	698,274,984.00	13.26
32	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persen	100	27,880,456,228.00	27,880,456,228.00	99.00
33	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	506,399,900.00	420,818,300.00	99.17



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
	Penanganan Konflik Sosial						
34	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tindak lanjut Pengaduan Trantibum	Persen	80	1,321,875,090.00	1,217,067,858.00	98.85
35	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase sentra industri aktif	Persen	3.39	46,918,700.00	45,880,000.00	71.15
36	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persen	20.00	840,053,984.00	497,624,983.00	97.04
37	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	0.48	393,883,928.00	389,915,698.00	-106.23
38	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	Persen	21.00	24,080,050.00	22,035,278.00	95.64
39	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memiliki ijin usaha	Persen	100.00	9,999,100.00	9,600,000.00	99.04
40	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	95.13	8,977,000.00	8,540,200.00	99.00
41	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persen	93.34	19,971,000.00	18,641,100.00	99.00
42	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	Persen	94.65	315,475,051.00	298,585,150.00	99.00
43	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	95.75	381,739,300.00	361,689,100.00	99.01
44	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persen	4.17	39,275,387.00	31,535,980.00	80.74
45	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	Persen	100.00	465,276,400.00	373,497,000.00	99.20



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
46	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif	Persen	100.00	63,071,450.00	58,704,100.00	99.07
47	Program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif	Persen	100.00	455,019,250.00	413,060,300.00	99.09
48	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	3.00	7,499,950.00	6,250,000.00	72.22
49	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	Persen	0.00	336,625,035.00	335,286,805.00	#DIV/0!
50	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan	Persen	228.37	3,841,787,695.00	3,227,606,560.00	99.63
51	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persen	72.00	5,612,379,568.00	5,582,742,950.00	98.62
52	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	Persen	28.00	161,023,600.00	138,320,000.00	96.93
53	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	Persen	78.00	724,037,262.00	616,719,395.00	98.91
54	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	Persen	9.00	585,187,214.00	563,276,900.00	89.30
55	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	5805.00	1,042,894,200.00	712,770,925.00	99.99
56	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	122.00	614,723,100.00	540,204,782.00	99.28
57	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Angka kecukupan energi	Poin	82.96	406,345,750.00	303,181,400.00	99.10



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
58	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan Daerah rawan pangan	Persen	50.00	214,302,000.00	207,476,024.00	98.06
59	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	Persen	100.00	16,008,600.00	14,251,500.00	99.11
60	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	Persen	100.00	899,627,534.00	866,012,160.00	99.04
61	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	28.24	270,364,000.00	270,364,000.00	96.46
62	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian temuan lapangan	Persen	60.00	50,223,300.00	45,254,200.00	98.50
63	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Persen	100.00	132,461,625.00	119,132,800.00	99.10
64	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	Persen	100.00	431,403,330.00	380,859,032.00	99.12
65	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100.00	70,983,650.00	58,850,400.00	99.17
66	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	Persen	0.49	908,106,882.00	803,306,730.00	-80.53
67	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	50.02	4,653,659,460.00	4,295,317,157.00	98.15
68	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Persen	76.56	1,952,640,992.00	1,772,546,850.00	98.81
69	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air limbah aman	Persen	7	990,284,160.00	921,317,134.00	86.71
70	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64.11	28,256,914,772.00	24,834,996,267.00	98.63
71	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	Persen	72.41	209,131,700.00	180,153,600.00	98.81
72	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Persen	8	406,117,360.00	397,830,000.00	87.76



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
73	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Persen	-	2,574,343,850.00	2,560,402,300.00	-
74	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Persen	10	1,337,536,320.00	1,323,931,800.00	90.10
75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	Persen	90	184,959,800.00	164,172,288.00	99.01
		Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	Persen	70	115,952,550.00	104,450,600.00	98.71
76	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	Persen	100	67,083,550.00	59,719,800.00	99.11
77	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	Persen	62.5	48,255,800.00	44,291,200.00	98.53
78	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	Persen	17.6	5,800,000.00	5,525,000.00	94.59
79	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha /kegiatan penghasil B3 dan LB3	Persen	25	10,150,000.00	10,150,000.00	96.00
80	Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat	Persentase penghargaan yang diraih di tingkat provinsi atau nasional	Persen	50	42,116,980.00	41,001,300.00	98.05
81	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	3	5,800,000.00	-	100.00
82	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	Persen	57.15	2,336,050,080.00	2,322,519,100.00	98.26
83	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	Persen	69.79	274,505,200.00	259,993,300.00	98.64



No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
84	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	Persen	9	4,532,729,144.00	4,332,857,059.00	89.38
85	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persen	71.43	1,639,578,195.00	1,623,886,168.00	98.61
86	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	Persen	70	49,461,850.00	48,903,000.00	98.59
87	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	36.03	1,033,765,250.00	372,509,350.00	99.00
88	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	85	525,897,300.00	482,959,949.00	98.92

2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2024 yang mendukung tercapainya target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.39	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	Persen	100	Menunjang
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.61		Persentase SD/MI terakreditasi A	Persen	24.73	Menunjang
						Persentase SMP/MTs terakreditasi A	Persen	30	Menunjang
						Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	Persen	65.65	Menunjang
						Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen	100	Menunjang
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Persen	12.82	Menunjang



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang	
		3	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	50	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikelola	Persen	46.87	Menunjang
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase Data Sejarah yang Ditata	Persen	50	Menunjang
						Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	Persen	25.46	Menunjang
		4	Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persen	1.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	84	Menunjang
							Persentase pemuda berprestasi	Persen	100	Menunjang
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif	Persen	92.86	Menunjang
							Persentase atlet berprestasi	Persen	39.37	Menunjang
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68.56					
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	67	Menunjang
		7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	Persen	100	Menunjang
		8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.88		Persentase Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Menunjang
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase program pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan perencanaan	Persen	100	Menunjang
							Persentase fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan koordinasi peningkatan perekonomian rakyat	Persen	100	Menunjang



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
						Persentase peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	Perse n	100	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan	Perse n	100	Menunjang
						Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Kedinasan	Perse n	62	Menunjang
						Persentase Penataan Peningkatan	Perse n	100	Menunjang
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian target perencanaan pembangunan daerah	Perse n	98.18	Menunjang
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% -100%)	Perse n	89.22	Menunjang
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi / penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah	Perse n	440.92	Menunjang
						Persentase kematangan inovasi	Perse n	72	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	Perse n	201.59	Menunjang
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perse n	96.67	Menunjang
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan ASN dan Persentase Ketepatan Waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian	Perse n	92.5	Menunjang
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Perse n	100	Menunjang
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Perse n	98	Menunjang



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
						DPRD			
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	Perse n	65.43	Menunjang
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes sesuai regulasi yang berlaku	Perse n	92.14	Menunjang
					Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perse n	92.3	Menunjang
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	Perse n	85	Menunjang
					Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	Perse n	100	Menunjang
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasi	Perse n	100	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran			
						Cakupan pengelolaan perbendaharaan			
						Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan			
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah			
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah			
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perse n	75	Menunjang
					Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Perse n	75	Menunjang
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perse n	85	Menunjang



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang	
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perse n	1.15	Menunjang	
					Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Perse n	100	Menunjang	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perse n	100	Menunjang	
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tindak lanjut Pengaduan Trantibum	Perse n	80	Menunjang	
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	9	Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB per Kapita ADHB)	Rupiah	40,643,587.04	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase sentra industri aktif	Perse n	3.39	Menunjang
		10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perse n	20.00	Menunjang
					Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perse n	0.48	Menunjang	
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	Perse n	21.00	Menunjang	
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memiliki ijin usaha	Perse n	100.00	Menunjang	
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perse n	95.13	Menunjang	
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Perse n	93.34	Menunjang	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	Perse n	94.65	Menunjang
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perse n	95.75	Menunjang
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Perse n	4.17	Menunjang
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	Perse n	100.00	Menunjang
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif	Perse n	100.00	Menunjang
					Program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif	Perse n	100.00	Menunjang
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Perse n	3.00	Menunjang
					Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	Perse n	0.00	-
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan	Perse n	228.37	Menunjang
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Perse n	72.00	Menunjang
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	Perse n	28.00	Menunjang
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	Perse n	78.00	Menunjang
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	Perse n	9.00	Menunjang



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang	
					Masyarakat Veteriner					
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	5805.00	Menunjang	
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	122.00	Menunjang	
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Angka kecukupan energi	Poin	82.96	Menunjang	
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan Daerah rawan pangan	Person	50.00	Menunjang	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	Person	100.00	Menunjang	
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	Person	100.00	Menunjang	
					Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	Person	28.24	Menunjang	
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian temuan lapangan	Person	60.00	Menunjang	
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Person	100.00	Menunjang	
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	Person	100.00	Menunjang	
					Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Person	100.00	Menunjang	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Graduasi Mandiri Individu KPM PKH	Person	0.49	Menunjang	
5	Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	11	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	55.95	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	Person	50.02	Menunjang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Person	76.56	Menunjang	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air limbah aman	Person	7	Menunjang	
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Person	64.11	Menunjang	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik	Person	72.41	Menunjang	
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Person	8	Menunjang	
					Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Person	-	-	
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Person	10	Menunjang	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	Person	90	Menunjang	
						Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	Person	70	Menunjang	
6	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	78.97	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	Person	100	Menunjang
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	Person	62.5	Menunjang	
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	Person	17.6	Menunjang	
					Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan penghasil B3	Person	25	Menunjang	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang	
						dan LB3				
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat	Persentase penghargaan yang diraih di tingkat provinsi atau nasional	Perse n	50	Menunjang	
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Perse n	3	Menunjang	
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	Perse n	57.15	Menunjang	
7	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	89.38	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	Perse n	69.79	Menunjang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	Perse n	9	Menunjang	
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Perse n	71.43	Menunjang	
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luasan Bidang Tanah yang bersertifikat	Perse n	70	Menunjang	
8	Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap bencana	14	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	55.67	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Perse n	36.03	Menunjang
					Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perse n	85	Menunjang	

1) Inovasi Daerah

Capaian Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11.4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh predikat sebagai Daerah Inovatif dengan Skor **60,00** dan



menempatkan peringkat kedua terbaik kategori Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.

Inovasi Daerah yang telah memenuhi kualitas dan kuantitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan diikutsertakan dalam penilaian Inovatif Government Award (IGA) Tahun 2024 yang berjumlah 10 Inovasi Daerah pada beberapa OPD :

1. e-VERYGOOD (Evaluasi Renja Governance Bolmut)

Evaluasi Renja Governance Bolmut (e-verygood) merupakan salah satu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana aplikasi ini dirancang untuk memudahkan monitoring serta pengukuran pencapaian target dan hasil kerja OPD secara lebih akurat dan transparan. dengan penyajian fitur yang memudahkan OPD untuk melakukan penginputan renja kapan saja dan dimana saja, sehingga proses evaluasi Renja OPD menjadi lebih terstruktur dan terotomatisasi.

2. TAKTIK CERIA (Strategi Holistik Cegah Perkawinan Usia Anak), Merupakan Inovasi pelayanan public berbasis digital dari dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

TAKTIK CERIA merupakan inovasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikembangkan dari inovasi Antisipasi pernikahan dini (ANDINI). Dimana dalam inovasi ini sudah menggunakan aplikasi sedangkan pada inovasi andini hanya melalui offline, tentunya ini merupakan dasar utama dalam perbaikan layanan khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.

3. GO-DAMKAR, Merupakan Inovasi Pelayanan Publik berbasis digital, dari Satuan Polisi Pamong Praja.



GO-DAMKAR merupakan salah satu Sistem Informasi Berbasis Elektronik yang dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana Penggunaan Aplikasi GO-DAMKAR dalam pelaporan kebakaran dapat menjadi lebih mudah dan cepat melaporkan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

4. Platform Sistem Informasi Penataan Ruang (SiPetarung), Merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

SIPETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang), yang merupakan keluaran Rekayasa Ulang Proses Bisnis (Business Process Reengineering) Layanan Penerbitan PKKPR. Metode Pembaharuan yang dilakukan melalui penyediaan aplikasi berbasis android, untuk memudahkan masyarakat penerima layanan dalam pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

5. SALUT (Sistem Aduan Laporan Unit Terpadu), Merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital, dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

System Aduan dan Laporan Unit Terpadu (SALUT) merupakan salah satu Sistem Pengaduan Berbasis Elektronik yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana para pencari kerja setiap mengurus Kartu Pencari Kerja atau kartu AK 1, diwajibkan untuk melakukan Registrasi pada Aplikasi Sistem Aduan dan Laporan Unit Terpadu untuk memperoleh rekomendasi dari Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Ketenagakerjaan.

6. LanSaD " Layanan Satu Data"

Dengan pelaksanaan Inovasi Pelayanan LANSAD (Layanan Satu Data), masyarakat dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan data Permasalahan data dapat di lihat secara langsung oleh pemohon dan dapat diselesaikan secara tuntas,karena telah di sediakan petugas (Operator dan Admin Data Base Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) secara



tatap muka dan tidak lagi pengaduan data ini melalui Aparat Desa atau di Petugas Kecamatan yang memakan waktu cukup lama untuk sampai ke petugas ADB (Administarsi Data Base) DISDUKCAPIL.

7. KABOS PROTEIN (Kelola Dana BOSP Melalui Transfer On Line)

Transaksi realtime, dengan transaksi realtime, pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan bisa melihat laporan keuangan sekolah. Belanja sesuai dengan Rancangan sekolah, setiap akan melakukan transaksi non tunai, sekolah sudah wajib mempunyai kwitansai atau bukti bayar, sehingga transaksi bisa tepat sasaran Menghemat biaya, dengan adanya transaksi nontunai, pihak sekolah tidak perlu ke bank untuk mengambil dana secara tunai Mempercepat laporan keuangan, dengan transaksi realtime dan non tunai, sekolah tidak mempunyai saldo tunai, sehingga akan memudahkan sekolah dalam membuat laporan Praktis dalam belanja, dengan transaksi non-tunai maka sekolah akan membayar pembelian juga bisa langsung membayar pajak.

8. BURASA (Bergerak Bersama Bunda PAUD Desa)

BURASA ini yang akan nantinya diterapkan pada Bunda PAUD Desa, yang akan melaksanakan Edukasi kepada masyarakat baik pengasuhan, pencegahan stunting, ajakan untuk menyekolahkan anak usia PAUD, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru PAUD dimasing - masing desa untuk mengembangkan PAUD Holistik Integratif (HI), mengadvokasi untuk melakukan kemitraan baik dengan PLKB dalam melakukan program BKB maupun dengan lembaga masyarakat/Dudi yang ada dimasing - masing desa.

9. SPOTLIGHT Rabu Belajar

Spotlight Rabu Belajar dirancang untuk memberikan akses yang terstruktur dan terjadwal kepada ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN melalui bebrbagai kegiatan diantaranya, pelatihan, wokshop, seminar dan kegiatan pengembangan SDM lainnya, yang dilaksanakan pada setiap hari rabu dan peserta akan diberikan sertifikat pada setiap kegiatannya. Sehingga memberikan waktu bagi seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten



Bolaang Mongondow Utara untuk secara konsisten mengikuti program ini dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Spotlight Rabu Belajar tidak hanya menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis kepemimpinan, tetapi juga memperkuat kultur pembelajaran yang berkelanjutan di lingkungan ASN.

10. KARLOTA (Kampanye Antar Kelompok Terbatas), Merupakan Inovasi Pelayanan Publik no digital, dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

KARLOTA, singkatan dari Kampanye Antar kelompok terbatas. Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi kase kehidupan dan andini pada tahun sebelumnya. inovasi yang diselenggarakan dikecamatan sampai didesa/kelurahan kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Inovasi ini adalah jenis inovasi yang menyelenggarakan pada produk advokasi komunikasi informasi dan edukasi langsung kepada sasaran yang ada diwilayah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

Pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan saja, sedangkan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi menjadi kewajiban Gubernur dalam penyampaian pertanggungjawabannya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan



sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); ;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 14 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian;
- d. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SP-DIPA 018.03.4.179103/2024 tanggal 2 Oktober 2024 (Revisi ke-7);
- e. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SP-DIPA 018.08.4.179110/2024 tanggal 24 November 2023;
- f. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA 018.05.1.238830/2024 tanggal 24 November 2023;

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024 merupakan penerapan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen SDM Kementerian Pertanian, Dirjen Hotlikultura Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan dan Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menerima dan melaksanakan Tugas Pembantuan Pusat.



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang ditugaskan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja program dan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen SDM, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perkebunan dan Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : SP-DIPA 018.03.4.179103/2024 tanggal 2 Oktober 2024 (Revisi ke-7); Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bidang Sarana dan Prasarana Nomor : SP-DIPA 018.08.4.179110/2024 tanggal 24 November 2023; dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dirjen Perkebunan Nomor : SP-DIPA 018.05.1.238830/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tanaman Pangan;
2. Perkebunan; dan
3. Sarana dan Prasarana.

3.2.2. Realisasi

1. Tanaman Pangan

Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara.

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Kegiatan pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000,-
- Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanahaman Pangan

**b) Program Dukungan Manajemen**

- Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 8.820.000,-

Bantuan belanja bahan dan pengiriman laporan pemanfaatan alsintan dan konsultasi bantuan alsintan, untuk diserahkan kepada masyarakat yang di berikan di kelompok tani pada kegiatan pasca panen, pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan sudah diserahkan kepada kelompok penerima.

Pengelolaan perbenihan tanaman pangan berupa bantuan benih jagung dengan luasan 2.000 Ha dengan jumlah kelompok sebanyak 128 kelompok tani dengan total benih di terima sebanyak 30.000 kg. Bantuan ini dibagi ke kelompok sesuai dengan titik bagi dan sekaligus penanda tanganan BAST dan penyerahan benih yang dibuktikan dengan dokumentasi foto open kamera. Jumlah benih diberikan sesuai dengan luasan pada kelompok tersebut (15kg/ha) dan kelompok tani penerima bantuan benih jagung tersebar di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana pada awal bantuan untuk kelompok tani dimulai dari Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dan diusulkan kelompok tani tersebut ke masing-masing Penyuluh Lapangan.

Program dukungan manajemen layanan perencanaan dan penganggaran Ditjen Tanaman Pangan diperuntukan berupa perjalanan dinas untuk petugas mantra tani yang berada di 6 kecamatan dan petugas PDPS kabupaten sebanyak 2 orang.

2. Perkebunan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapat Tahun Anggaran 2024 melalui Dana APBN Tugas Pembantuan Dirjen Perkebunan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan :

- Perluasan tanaman pala



Pengembangan tanaman pala pada kegiatan perluasan areal tanaman pala melalui Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah anggaran APBNP Rp. 220.800.000,- yang dimulai dengan melaksanakan CPCL tanaman pala oleh Penyuluh lapangan dan dibantu oleh Bidang Perkebunan.

3. Prasarana dan Sarana Pertanian

DIPA tugas pembantuan Ditjen Prasarana Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara meliputi kegiatan fisik yaitu Irigasi Perpompaan Besar (ABT). Kegiatan irigasi perpompaan besar adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas yang dapat memberikan suplesi air irigasi seluas min 20 Ha untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun lokasi kegiatan yang berada di Kecamatan Bintauna dilaksanakan di Desa Batulintik oleh UPKK Tendeno, Desa Kuhanga UPKK Mekar Indah, Desa Kopi UPKK Mekar Jaya, UPKK Gambuta, UPKK Indah Solo II, UPKK Sinagkia II, UPKK Pinipiho I, Desa Tuntung oleh UPKK Maju Bersama, Desa Bigo Selatan oleh UPKK Mandiri II, serta Desa Langi oleh UPKK Hahea.

**LPPD**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**TAHUN 2024**

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota (Desa)	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%
1.	Tanaman Pangan	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 522/82/SK/DISTAN-BMU/II/2024	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Kegiatan <i>Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan</i> Output : Meningkatnya produksi tanaman padi Bantuan benih padi	Kab. Bolmut	Dinas Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100	40	100
				Kopi	Indah Saleo I	17.500.000,00	17.500.000,00	100	7	100
				Bintauna Pantai	Uherayo	15.000.000,00	15.000.000,00	100	6	100
				Pontak	Hidup Baru	30.000.000,00	30.000.000,00	100	12	100
				Bigo Selatan	Paktan Mandiri II	12.500.000,00	12.500.000,00	100	5	100
				Tontulow Utara	Tote	25.000.000,00	25.000.000,00	100	10	100
2.	Perkebunan	Surat Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 522/12/SK/DISTAN-BMU/IV/2023	Program Pengembangan Tanaman Semusim dan Tahunan - Kegiatan <i>Pengembangan Kawasan Tanaman Pala</i> Output : Meningkatnya produksi tanaman pala Bantuan Benih dan Pupuk Organik Padat	Kab. Bolmut	Dinas Pertanian	Benih Pala : 178.800.000,00 Pupuk Organik : 42.000.000,00	Benih Pala : 178.800.000,00 Pupuk Organik : 42.000.000,00	100	100 Ha	100
				Bolangitang Timur	Tambuala	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Timur	Taruna Muda	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Timur	Baru Terbit	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Timur	Usaha Baru	Benih Pala : 14.304.000,00 Pupuk Organik : 3.360.000,00	Benih Pala : 14.304.000,00 Pupuk Organik : 3.360.000,00	100	8	100
				Bolangitang Barat	Jaya Makmur	Benih Pala : 8.940.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00	100	5	100



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota (Desa)	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%
						Pupuk Organik : 2.100.000,00	Pupuk Organik : 2.100.000,00			
				Bolangitang Barat	Tumuho Bersatu	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Barat	Cahaya Tani	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Barat	Bumiong	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Bolangitang Barat	Fajar Baru	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Kaidipang	Fajar	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	100	6	100
				Kaidipang	Jaya II	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	100	6	100
				Kaidipang	Badalia Tani	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Kaidipang	Sinolok Star	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	Benih Pala : 10.728.000,00 Pupuk Organik : 2.520.000,00	100	6	100
				Pinogaluman	Batu Biluntu	Benih Pala : 16.092.000,00 Pupuk Organik :	Benih Pala : 16.092.000,00 Pupuk Organik :	100	9	100



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/Kota (Desa)	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%
						3.780.000,00	3.780.000,00			
				Pinogaluman	Suka Tani	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Pinogaluman	Cekdam Jaya	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Pinogaluman	Andagile	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
				Pinogaluman	Biluango	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	Benih Pala : 8.940.000,00 Pupuk Organik : 2.100.000,00	100	5	100
3.	Pertanian	Surat Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 522/143/SK/DISTAN-BMU/V/2024	Program Irigasi Perpompaaan Besar <i>Kegiatan Irigasi Perpompaaan Besar</i> Output: Mendukung penambahan areal tanam	Kab. Bolmut	Dinas Pertanian	1.015.200.000	1.015.200.000	100	9	100
				Tuntung	UPKK Maju Bersama	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Bigo Selatan	UPKK Mandiri II	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Batulintik	UPKK Tendeno	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kopi	UPKK Mekar Jaya	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kopi	UPKK Gambuta	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kopi	UPKK Indah Solo II	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kopi	UPKK Sinangkia II	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kopi	UPKK Pinopiho I	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Kuhanga	UPKK Mekar Indah	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
		Surat Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 522/195/SK/DISTAN-BMU/V/2024	Program Irigasi Perpompaaan Besar <i>Kegiatan Irigasi Perpompaaan Besar</i> Output: Mendukung penambahan areal tanam	Kab. Bolmut	Dinas Pertanian	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100
				Langi	UPKK Hahea	112.800.000,00	112.800.000,00	100	1	100

Sumber data : Dinas Pertanian Kab. Bolmut



3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

Permasalahan

1. Adanya revisi penghematan anggaran dari Kementrian Pertanian sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan;
2. Varietas benih yang dibutuhkan petani tidak sesuai dengan ketersediaan benih;
3. Keterlambatan kedatangan benih ke kelompok tani;
4. Belum memadainya ketersediaan data base tentang produksi, produktivitas dan komoditas unggulan;
5. Belum optimalnya penggunaan lahan;
6. Belum optimalnya partisipasi petani, sebagai pelaku utama usaha tani;
7. Masih lemahnya manajemen organisasi petani.

Kendala

1. Adanya refocusing di beberapa kegiatan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan adanya kendala musim yang tidak menentu yang mengakibatkan pola tanam yang berubah.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Tindaklanjut atas kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu:

1. Peningkatan jaringan kemitraan dan kelembagaan yang dimiliki petani;
2. Penyediaan database produksi, produktivitas dan komoditas unggulan;
3. Introduksi teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama pada kegiatan budidaya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 pada masing-masing urusan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar ;
2. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
3. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
4. Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
1.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	Persentase Warga Negara Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100 %



4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2024			
			Target	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi
1.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	9910	9847	99,36 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	1292	1116	86,38 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	3702	3594	97,08 %

4.1.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Pendidikan APBDP 2024	% Belanja Urusan Pendidikan APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	129.280.742.407,00	26,33 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	18.319.855.647,00	26,21 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	147.600.598.054,00	21,63 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025



Dari Tabel 4.3 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar 21,63 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan sejumlah Rp.147.600.598.054,00 dialokasikan sebesar Rp. 40.532.255.790,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan atau sebesar 30% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682,209,615,880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	149,241,578,684,00	21,63
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	40.532.255.790,00	27,15

Tabel 4.5 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
1	Program Pengelolaan Pendidikan					40,532,255,790	33,454,410,452	82,54
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			25,113,582,482	21,549,135,778	85,81	
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,184,771,000	1,114,054,645	94,03	
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	246,800,000	245,367,180	99,42	
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	755,817,500	749,825,492	99,21	
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6,923,939,240	6,338,740,821	91,55	
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	314,347,908	260,854,026	82,98	
		6	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	21,240,000	21,201,000	99,82	
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	88,300,000	55,800,000	63,19	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	400,000,000	399,960,000	99,99	
		9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Diidk	210,524,600	38,762,400	18,41	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2,561,400,000	1,473,400,000	57,52	
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	330,011,800	243,272,865	73,72	
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	229,853,150	197,258,050	85,82	
		13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidik an	7,569,486,359	6,569,489,359	86,79	
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	122,361,100	112,264,680	91,75	
		15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1,244,560,000	1,220,560,063	98,07	
		16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokume n	181,865,100	112,158,437	61,67	
		17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	249,056,125	248,719,000	99,86	
		18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,211,166,000	979,499,302	80,87	
		19	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	216,698,600	134,488,500	62,06	
		20	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,051,384,000	1,033,459,958	98,30	
		JUMLAH INDIKATOR				25,113,582,482	21,549,135,778	85,81
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				8,897,606,958	7,120,388,755	80,03
		1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	223,043,500	204,312,618	91,60	
		2	Pembangunan Laboratorium	Ruang	722,538,000	626,035,292	86,64	
		3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Unit	770,765,500	726,096,267	94,20	
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,103,885,900	1,015,577,592	92,00	
		5	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	21,240,000	21,201,000	99,82	
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	27,000,000	12,000,000	44,44	
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	510,000,000	509,460,000	99,89	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
		8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	705,000,000	399,000,000	56,60
		9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	136,297,500	100,024,803	73,39
		10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	3,529,654,163	2,529,654,163	71,67
		11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	146,993,500	132,972,700	90,46
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	189,864,000	146,529,000	77,18
		13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	695,600,000	581,866,920	83,65
		14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	115,724,895	115,658,400	99,94
JUMLAH INDIKATOR					8,897,606,958	7,120,388,755	80,03
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			4,105,278,600	2,667,929,691	64,99
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	436,784,500	405,002,240	92,72
		2	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	55,640,000	55,280,000	99,35
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	37,500,000	0	0
		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	50,000,000	49,862,000	99,72
		5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	155,610,000	125,010,934	80,34
		6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	759,000,000	504,000,000	66,40
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	184,083,500	150,224,401	81,61
		8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1,980,600,000	1,000,000,000	50,49
		9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	228,471,100	161,261,500	70,58
		10	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/	Ruang	217,589,500	217,288,616	99,86



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
			TU				
	JUMLAH INDIKATOR				4,105,278,600	2,667,929,691	64,99
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2,415,787,750	2,116,956,228	87,63
		1	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Unit	653,670,500	577,392,528	88,33
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	100,000,000	99,490,000	99,49
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	337,500,000	187,500,000	55,56
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	103,292,400	68,413,200	66,23
		5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,079,500,000	1,079,000,000	99,95
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	141,824,850	105,160,500	74,15
	JUMLAH INDIKATOR				2,415,787,750	2,116,956,228	87,63
	JUMLAH PROGRAM				40,532,255,790	33,454,410,452	82,54

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sebanyak 1234 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.6 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pendidikan

No.	SKPD	PNS		PPPK	
		L	P	L	P
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	22	-	1
2.	SKB Kec. Bintauna	1	5	-	-
3.	SKB Kec. Bolangitang	3	2	-	-
4.	SKB Kec. Kaidipang	2	2	-	-
5.	SKB Kec. Pinogaluman	2	1	-	-
6.	Sekolah Se-Kab. Bolmut	225	593	66	296
	Jumlah	246	625	66	297

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Data yang dikumpulkan sering kali tersebar di berbagai unit dan tidak terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses dan dianalisis- Keterbatasan penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data, sehingga masih banyak proses yang dilakukan secara manual dan berpotensi menyebabkan kesalahan.- Penggunaan teknologi modern, seperti GIS (Geographic Information System) atau aplikasi pemetaan digital, masih terbatas <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggunaan data yang tidak akurat atau tidak terperinci dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan SPM- Keterbatasan anggaran untuk	<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things) untuk pemantauan infrastruktur secara otomatis dan mengumpulkan data secara real-time.- Menyediakan panduan teknis dan protokol pengumpulan data yang jelas dan terstandarisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data.- Menerapkan sistem digital yang terintegrasi untuk pengumpulan data, seperti penggunaan perangkat mobile atau aplikasi berbasis GIS untuk memetakan infrastruktur secara real-time <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Menggunakan sumber data yang terpercaya dan melakukan verifikasi untuk



Permasalahan	Solusi
<p>melakukan survei, penelitian, atau pengumpulan data yang diperlukan untuk perhitungan SPM yang akurat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimnya partisipasi dari masyarakat dan stakeholder dalam pengumpulan data dan umpan balik dapat mengurangi akurasi perhitungan <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Banyaknya data yang tidak lengkap atau tidak terintegrasi dari berbagai sumber, sehingga menyulitkan dalam perencanaan yang berbasis data.- Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan minimum, yang menghambat pelaksanaan program dan proyek <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM sering kali tidak mencukupi untuk proyek-proyek yang berkelanjutan.- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki	<p>memastikan konsistensi dalam analisis</p> <ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat dan real-time <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengadakan forum atau diskusi publik untuk melibatkan Pemerintah Desa dalam proses Pengumpulan data dan Penetapan Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap sub kegiatan pelayanan dasar <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan perencanaan yang matang, serta memprioritaskan proyek infrastruktur yang mendesak sesuai dengan kebutuhan



Permasalahan	Solusi
kompetensi teknis, serta keterbatasan alat dan material untuk mendukung pelaksanaan SPM	masyarakat. - Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi dalam pemenuhan proyek teknis

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar, jenis pelayanan dasar Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan



11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :



Tabel 4.9 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1171	1171	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1130	1130	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1128	1089	96,54 %
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7209	5718	79,32 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.119	10.371	93,27 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	56.417	26.906	47,69 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12.994	9279	71,41
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	13.985	10.417	74,49
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1749	1749	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	217	178	82,03 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	359	209	58,22 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1530	1175	76,80 %



4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Kesehatan APBDP 2024	% Belanja Urusan Kesehatan APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	116.344.632.103,00	23,70 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	5.997.763.690,00	8,58 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	122.342.395.793,00	17,93 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025

Dari Tabel 4.10 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan sebesar 17,93 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan sejumlah Rp.122.342.395.793,00 dialokasikan sebesar Rp. 1.225.828.378,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan atau sebesar 1,00 % dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.11 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682.209.615.880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	122.342.395.793,00	17,93
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	1.225.828.378,00	1,00



Tabel 4.12 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				1,225,828,378	605,458,179	49,39
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,225,828,378	605,458,179	49,39
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	162,531,400	79,207,600	48,73
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	284,835,800	89,993,000	31,59
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	349,533,100	231,206,599	66,15
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	52,224,400	18,044,500	34,55
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	51,453,378	12,873,800	25,02
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	31,450,600	14,762,000	46,94
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	72,269,100	45,964,200	63,60
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	54,615,000	30,525,800	55,89
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	54,965,000	12,556,000	22,84
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	29,892,800	19,918,200	66,63
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	54,906,600	30,051,280	54,73
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	27,151,200	20,355,200	74,97
	JUMLAH INDIKATOR				1,225,828,378	605,458,179	49,39
	JUMLAH PROGRAM				1,225,828,378	605,458,179	49,39

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebanyak 689 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.13 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Kesehatan

No.	SKPD	PNS		PPPK	
		L	P	L	P
1.	Dinas Kesehatan	8	8	1	3
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	31	98	8	49
3.	Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna	4	23	-	-



4.	UPTD Theurapety Feeding Center (TFC)	3	8	-	-
5.	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	2	8	-	-
6.	UPTD Puskesmas se Kab. Bolaang Mongondow Utara	54	307	12	61
	Jumlah	102	453	21	113

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendanaan</p> <p>Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM Tahun 2024 bersumber dari dana APBD dan APBN (Bantuan Operasional Kesehatan). Perencanaan penganggaran SPM untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan belum optimal.</p> <p>2. Sarana Prasarana</p> <p>Sarana skrining dan deteksi (BMHP dan Alat KIT pemeriksaan), pedoman pelaksanaan kasus serta media KIE sebagai syarat pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-masing indikator SPM belum maksimal.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia</p> <p>Pemahaman Petugas penanggung</p>	<p>1. Pendanaan</p> <p>Perlu pengkajian Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan pendukung SPM dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan Puskesmas. Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan perencanaan yang matang, serta memprioritaskan program/kegiatan dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>2. Sarana Prasarana</p> <p>Mendorong Puskesmas untuk menganggarkan penyediaan sarana dan prasarana yang belum dianggarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pemenuhan standar Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa masing-</p>



Permasalahan	Solusi
<p>jawab SPM terhadap definisi operasional masing-masing indikator SPM bidang Kesehatan masih menjadi masalah di beberapa Puskemas, sehingga terjadi ketidak tepatan dalam perhitungan capaian. Ketersediaan SDM di puskesmas masih menjadi kendala. Dari segi kuantitas SDM kurang memadai karena banyaknya program yang harus dilaksanakan Puskesmas. Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Puskesmas, menyebabkan petugas puskesmas memegang rangkap program serta sering kali juga terjadi pergantian petugas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan kurang optimal.</p> <p>4. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data yang dikumpulkan tersebar di berbagai unit dan tidak terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses dan dianalisis.</p> <p>5. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kegiatan Pengawasan Internal dari Kepala Puskesmas terhadap administratif sudah dilaksanakan disebagian besar Puskesmas, namun</p>	<p>masing indikator SPM Bidang Kesehatan</p> <p>3. Sumber Daya Manusia Perlu sosialisasi tentang definisi operasional dan cara perhitungan cakupan masing-masing indicator SPM terhadap penanggung jawab SPM di Puskesmas. Perlu kajian ulang tentang pembagian tugas dan analisa beban kerja, agar tercapai pemerataan program. Program dengan beban berat tidak tertumpuk pada satu orang. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung capaian SPM</p> <p>4. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Mengupayakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi sehingga mudah diakses dan dianalisis.</p> <p>5. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Meningkatkan kualitas pengawasan dari Dinas Kesehatan untuk perbaikan</p>



Permasalahan	Solusi
masih perlu ditingkatkan. Pengawasan selanjutnya dilakukan Dinas Kesehatan mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Kegiatan pengawasan terhadap capaian Kinerja Puskesmas masih belum optimal, pelaksanaan pelaporan satu pintu belum optimal.	pelaksanaan pelayanan dan pencatatan pelaporan SPM Bidang Kesehatan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat dan penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui	100 %



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
		SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100 %

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.16 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rumah Tangga yang berhak mendapat pelayanan	Target	Rumah Tangga yang terlayani	Realisasi
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	30	100 %	30	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	49	100 %	49	100%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.17 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum



Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Pekerjaan Umum APBDP 2024	% Belanja Urusan Pekerjaan Umum APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	10.576.451.811,00	2,15 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	38.236.402.050,00	54,70 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	48.812.853.861,00	7,15 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025

Dari Tabel 4.17 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebesar 7,15 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sejumlah Rp.48.812.853.861,00 dialokasikan sebesar Rp. 2.942.925.152,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum atau sebesar 6,02 % dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.18 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682.209.615.880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	48.812.853.861,00	7,15 %
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	2.942.925.152,00	6,02 %

Tabel 4.19 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					1,952,640,992	1,772,546,850	90,78
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1,952,640,992	1,772,546,850	90,78
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM		212,127,600	209,376,350	98,70	
		2	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		319,042,000	317,072,300	99,38	
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		157,397,316	157,030,000	99,77	



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
		4	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		679,232,076	519,917,000	76,54
		5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		584,842,000	569,151,200	97,32
JUMLAH INDIKATOR					1,952,640,992	1,772,546,850	90,78
JUMLAH PROGRAM					1,952,640,992	1,772,546,850	90,78
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				990,284,160	921,317,134	93,04
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			990,284,160	921,317,134	93,04
		1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	880,908,760	861,636,234	97,81
		2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	109,375,400	59,680,900	54,57
JUMLAH INDIKATOR					990,284,160	921,317,134	93,04
JUMLAH PROGRAM					990,284,160	921,317,134	93,04

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebanyak 76 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.20 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Uraian	Jumlah Personil
1.	Aparatur Sipil Negara	45
2.	PPPK	6
3.	Tenaga Administrasi	13
4.	Tenaga Operator	6
5.	Pengawas Air Minum	3
6.	Pengawas Air Limbah dan Sanitasi	3
Jumlah		76

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.21 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Basis data Tingkat kerusakan rumah akibat bencana belum terorganisir.○ Data By Name By Address untuk penanganan SPM belum terupdate.○ Keterbatasan penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Data yang tidak akurat atau tidak terperinci dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan SPM.○ Keterbatasan anggaran untuk melakukan survei, penelitian, atau pengumpulan data yang diperlukan untuk perhitungan SPM yang akurat.○ Minimnya partisipasi dari stakeholder dalam pengumpulan data dan umpan balik dapat mengurangi akurasi perhitungan <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Penyusunan basis data By Name By Address untuk penanganan SPM.	<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Mengidentifikasi dampak kerusakan Kawasan permukiman akibat bencana.○ Mengumpulkan data Tingkat kerusakan rumah akibat bencana.○ Meningkatkan penggunaan teknologi agar dapat mempermudah akses pengumpulan data <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perhitungan untuk keakuratan data.○ Mengoptimalkan anggaran untuk melakukan survei, penelitian, atau pengumpulan data yang diperlukan untuk perhitungan SPM yang akurat.○ Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan stakeholder guna mencapai tujuan Bersama. <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Pengelolaan data By Name By Address untuk pelaksanaan



Permasalahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none">○ Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan minimum, yang menghambat pelaksanaan kegiatan.○ Komitmen dan kesungguhan penanganan korban bencana <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM sering kali tidak mencukupi untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.○ Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, serta keterbatasan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan SPM.	<p>peningkatan SPM.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap kegiatan.○ Meningkatkan integritas kinerja untuk penanganan korban bencana. <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Mengoptimalkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sebagai pemenuhan SPM.○ Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan kapasitas SDM, serta mengakomodir peralatan kantor.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia



Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	-
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-
	Subsidi Uang Sewa	-
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.23 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
Penyediaan dan Rehabilitasi	Bantuan Akses rumah sewa	-	-



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	layak huni bagi korban bencana		
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %	100%
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	-	-
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-
	Subsidi Uang Sewa	-	-
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %	100%

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.24 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Perumahan Rakyat APBDP 2024	% Belanja Urusan Perumahan Rakyat APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	5.345.683.193,00	1,09 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	777.844.694,00	1,11 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	6.123.527.887,00	0,89 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025

Dari Tabel 4.24 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat sebesar 1,09 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat sejumlah Rp.6.123.527.887,00 dialokasikan sebesar Rp. 399.288.310,00 untuk



pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat atau sebesar 6,52 % dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.25 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682.209.615.880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	6.123.527.887,00	0,89 %
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	399.288.310,00	6,52 %

Tabel 4.26 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
1	Program Pengembangan Perumahan							
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0	0	
		1						
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				399,288,310	392,160,000	98,21
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	8,514,700	7,450,000	87,50	
		2	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	390,773,610	384,710,000	98,45	
	JUMLAH INDIKATOR					399,288,310	392,160,000	98,21
	JUMLAH PORGRAM					399,288,310	392,160,000	98,21

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 20 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.27 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	SKPD	PNS		Jumlah	PPPK		
		L	P		L	P	Jumlah
1.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11	7	18	1	1	2
	Jumlah	11	7	18	1	1	2

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Basis data Tingkat kerusakan rumah akibat bencana belum terorganisir.- Data By Name By Address untuk penanganan SPM belum terupdate.- Keterbatasan penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Data yang tidak akurat atau tidak terperinci dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan SPM.- Keterbatasan anggaran untuk melakukan survei, penelitian, atau pengumpulan data yang diperlukan untuk perhitungan SPM yang akurat.- Minimnya partisipasi dari stakeholder dalam pengumpulan data dan umpan balik dapat mengurangi akurasi perhitungan <p>3. Perencanaan</p>	<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi dampak kerusakan Kawasan permukiman akibat bencana.- Mengumpulkan data Tingkat kerusakan rumah akibat bencana.- Meningkatkan penggunaan teknologi agar dapat mempermudah akses pengumpulan data. <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perhitungan untuk keakuratan data.- Mengoptimalkan anggaran untuk melakukan survei, penelitian, atau pengumpulan data yang diperlukan untuk perhitungan SPM yang akurat.- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan stakeholder guna mencapai tujuan Bersama



<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan basis data By Name By Address untuk penanganan SPM.- Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan minimum, yang menghambat pelaksanaan kegiatan.- Komitmen dan kesungguhan penanganan korban bencana <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM sering kali tidak mencukupi untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, serta keterbatasan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan SPM.	<p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan data By Name By Address untuk pelaksanaan peningkatan SPM.- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap kegiatan.- Meningkatkan integritas kinerja untuk penanganan korban bencana. <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sebagai pemenuhan SPM.- Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan kapasitas SDM, serta mengakomodir peralatan kantor
---	--

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow



Utara pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	100 %
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	100 %
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100 %
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan	-



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
		dokumen Kajian Risiko Bencana	
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100 %
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100 %
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100 %
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	-
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	-
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100 %
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	100 %
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	100 %
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100 %
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	100 %



4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.30 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Sasaran	Terlayani	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	43	43	100 %
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	6	6	100 %
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	88	88	100 %
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	0 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100 %
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	350	320	91,43 %
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	113	113	100 %
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	13	13	100 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	4	4	100 %
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2	2	100 %



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Sasaran	Terlayani	Realisasi
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-	0 %
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	-	-	0 %
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	-	-	0 %
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	-	-	0 %
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	-	-	0 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	2	2	100%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	3	3	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100%
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	17	17	100%
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	2	2	100%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	2	2	100%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada



bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.31 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Trantib APBDP 2024	% Belanja Urusan Trantib APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	7.220.844.638,00	1,47 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	319.512.900,00	0,46 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	7.540.357.538,00	1,10 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025

Dari Tabel 4.31 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 1,47 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp. 7.540.357.538,00 dialokasikan sebesar Rp. 2.814.984.740,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau sebesar 37,33 % dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.32 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682.209.615.880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	7.540.357.538,00	1,10
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	2.814.984.740,00	37,33



Tabel 4.33 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				1,321,875,090	1,217,067,858	92,07
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,264,931,840	1,198,267,858	94,73
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1,264,931,840	1,198,267,858	94,73
	JUMLAH INDIKATOR				1,264,931,840	1,198,267,858	94,73
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			56,943,250	18,800,000	33,02
		1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	56,943,250	18,800,000	33,02
	JUMLAH INDIKATOR				56,943,250	18,800,000	33,02
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			0	0	
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	
	JUMLAH PROGRAM				1,321,875,090	1,217,067,858	92,07
2	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)				980,965,250	372,509,350	37,97
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			151,800,000	147,741,000	97,33
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	150,000,000	147,741,000	98,49
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1,800,000	0	
	JUMLAH INDIKATOR						
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			424,824,850	31,194,000	7,34
		1	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	1,500,000	0	
		2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1,800,000	0	



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
		3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,015,600	0		
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	3,540,000	0		
		5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	413,869,250	31,194,000	7,54	
		6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1,100,000	0		
		JUMLAH INDIKATOR				424,824,850	31,194,000	7,34
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				424,824,850	31,194,000	7,34
		1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	37,002,350	12,416,600	33,56	
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	19,414,450	10,886,000	56,07	
		3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	106,924,600	54,133,600	50,63	
		4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	3,046,550	0		
		JUMLAH INDIKATOR				166,387,950	77,436,200	46,54
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				237,952,450	116,138,150	48,81
		1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	237,952,450	116,138,150	48,81	
		JUMLAH INDIKATOR				237,952,450	116,138,150	48,81
	3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)				510,144,400	469,309,949	92,00
		8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		373,573,600	366,515,149	98,11	
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	373,573,600	366,515,149	98,11	
		JUMLAH INDIKATOR				373,573,600	366,515,149	98,11
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0	0	
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0		
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0		
		JUMLAH INDIKATOR				0	0	
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran				0	0	



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	
JUMLAH INDIKATOR							
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			136,570,800	102,794,800	72,27
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	136,570,800	102,794,800	72,27
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	
JUMLAH INDIKATOR					136,570,800	102,794,800	72,27
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	
JUMLAH INDIKATOR					0	0	
JUMLAH PROGRAM					510,144,400	469,309,949	92,00



4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 42 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.34 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	SKPD	PNS			PPPK		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Santpol PP	12	4	16	1	1	2
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	6	20	2	2	4
	Jumlah	26	10	36	3	3	6

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.35 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan data belum optimal karena tidak tersedianya anggaran- Tidak adanya laporan/aduan dari masyarakat tentang pelanggaran Trantibum <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan indikator SPM belum berjalan secara optimal karena tidak tersedianya anggaran- Beberapa indikator disetiap sub kegiatan SPM tahun 2024 belum termuat dalam dokumen renja <p>3. Perencanaan</p>	<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan efesiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap sub kegiatan



<ul style="list-style-type: none">- Beberapa indikator disetiap sub kegiatan SPM tahun 2024 belum termuat dalam dokumen renja SKPD- Minimnya anggaran untuk melaksanakan penyesuaian indikator sub kegiatan SPM <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan indikator SPM belum berjalan secara optimal karena tidak tersedianya anggaran- Masih kurangnya jumlah tenaga ASN Satpol PP yang belum mengikuti Dikla dasar Satpol PP dan PPNS	<p>pelayanan dasar</p> <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap sub kegiatan pelayanan dasar- Menempatkan ASN sesuai kualifikasi pendidikan pada Satpol PP- Meningkatkan kompetensi ASN Satpol PP melalui pelatihan diklat dasar Satpol PP
--	---

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial dilaksanakan di Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial



5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	0 %

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.37 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berhak Mendapatkan Pelayanan Dasar	Jumlah Warga Negara yang Terlayani	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	60	60	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2	2	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	60	60	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	0	0	0



4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2024 pada bidang urusan sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

Tabel 4.38 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2024	Anggaran Belanja Urusan Sosial APBDP 2024	% Belanja Urusan Sosial APBDP 2024
Belanja Operasi	490.820.470.119,94	4.482.507.675,00	0,91 %
Belanja Modal	69.897.492.461,00	48.361.400,00	0,06 %
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0 %
Belanja Transfer	120.491.653.300,00	0,00	0 %
Jumlah	682.209.615.880,94	4.530.869.075,00	0,66 %

Sumber : BPKPD Kab. Bolmut (Unaudited), 2025

Dari Tabel 4.38 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial sebesar 0,66 % dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial sejumlah Rp.3.778.291.582,00 dialokasikan sebesar Rp. 320.976.650,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan sosial atau sebesar 8,49 % dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.39 Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Pendaanaan	Pagu	Persentase (%)
1	APBD Kab. Bolaang Mongondow Utara	682.209.615.880,00	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	3.778.291.582,00	0,55 %
3	Alokasi Penerapan SPM pada Satker PD	320.976.550,00	8,49 %

Tabel 4.40 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
1	Program Rehabilitasi Sosial				320,976,550	235,411,890	73,34



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan	
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				320,976,550	235,411,890	73,34
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	132,840,000	121,740,000	91,64	
		2	Penyediaan alat bantu	Orang	45,400,000	42,134,490	92,81	
		3	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	13,381,000	13,290,000	99,32	
		4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	4,527,900	4,424,000	97,71	
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	64,829,000	0		
	JUMLAH INDIKATOR					64,829,000	181,588,490	69,58
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				59,998,650	53,823,400	89,71
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	34,997,050	34,552,500	98,73	
		2	Penyediaan sandang	Orang	9,941,500	9,805,000	98,63	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5,063,160	5,063,160	100	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	4,999,240	4,402,900	99,07	
		5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	4,997,700	0		
	JUMLAH INDIKATOR					59,998,650	53,823,400	89,71
	JUMLAH PROGRAM					320,976,550	235,411,890	73,34

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sebanyak 24 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.41 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Sosial

No.	SKPD	PNS			PPPK	
		L	P	Jumlah	L	P
1.	Dinas Sosial Daerah	10	14	24	-	-
	Jumlah	10	14	24	-	-

Sumber : BKPSDM Kab. Bolmut, 2025



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target SPM tahun 2024 dan solusinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.42 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
<p>1. Pendataan</p> <p>Manajemen data SPM sesuai klasifikasi layanan dan mutu memerlukan dukungan alokasi anggaran dan SDM yang memadai sementara kendala ini termasuk substansi dari tahun ke tahun dalam pemenuhan SPM urusan sosial</p> <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggunaan data yang tidak akurat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan SPM- Minimnya pendanaan SPM urusan social menyebabkan kurangnya mutu layanan SPM per indikator- Belum tersedianya rumah singga untuk layanan social sehingga belum memungkinkan membuka layanan SPM yang mendukung mutu layanan per indikator <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil dari pendataan SPM masih belum memadai untuk pemenuhan mutu dan layanan,	<p>1. Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi aktif dengan dengan lintas sector dan aparat desa dalam rangka memaksimalkan data SPM- Sinkronisasi data SPM dengan DTKS <p>2. Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Menggunakan sumber daya yang terpercaya dan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan konsistensi dalam analisis.- Membuat Form Analissi oleh bidang yang menangani SPM dalam rangka keberlangsungan dan keterlanjutan layanan SPM dengan memperhatikan mutu layanan serta keadaan yang mendesak. <p>3. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengadakan forum atau diskusi publik untuk



Permasalahan	Solusi
<p>sehingga menyulitkan dalam perencanaan yang berbasis data</p> <ul style="list-style-type: none">- Alokasi pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial dari tahun ke tahun masih sangat minim sehingga mempengaruhi perencanaan antara kebutuhan layanan dan ketersediaan anggaran <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Alokasi anggaran belum memadai untuk pelayanan 5 indikator SPM dan terdapat 2 indikator layanan SPM dimana objek/sasaran PPKS dari indikator tersebut tidak ada (Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis) di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis (pekerja sosial) dan pejabat fungsional/pelaksana untuk mendukung SPM	<p>melibatkan pemerintah desa dalam proses pengumpulan data dan penetapan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan indikator disetiap sub kegiatan pelayanan dasar. <p>4. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran pada proses perencanaan, serta memprioritaskan layanan sosial yang mendesak sesuai dengan kebutuhan PPKS.- Mengikutsertakan aparatur perencana/pejabat yang membidangi SPM dalam diklat SPM pada setiap tahun (salaam anggaran tersedia)

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.43 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		Pengadaan Perlengkapan PAUD
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
		Pengadaan Mebel Sekolah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		



		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Pembangunan Ruang Kelas Baru
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Pembangunan Laboratorium
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengadaan Mebel Sekolah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Pembangunan Ruang Kelas Baru
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

4.7.2. Pogram dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.44 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.45 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
		Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Kabupaten/Kota	Limbah Domestik (SPALD)

4.7.4. Pogram dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.46 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
		Pembangunan rumah bagi korban bencana

4.7.5. Pogram dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.47 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
TRANTIB		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
KEBENCANAAN		
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG-MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana kontijensi
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat darurat bencana Kabupaten /Kota
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
DAMKAR		
Program Pencegahan, Penanggulagn, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

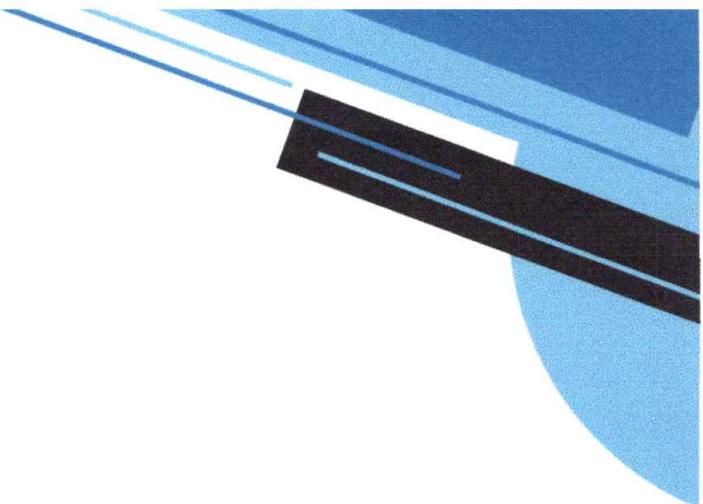
4.7.6. Pogram dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :



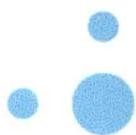
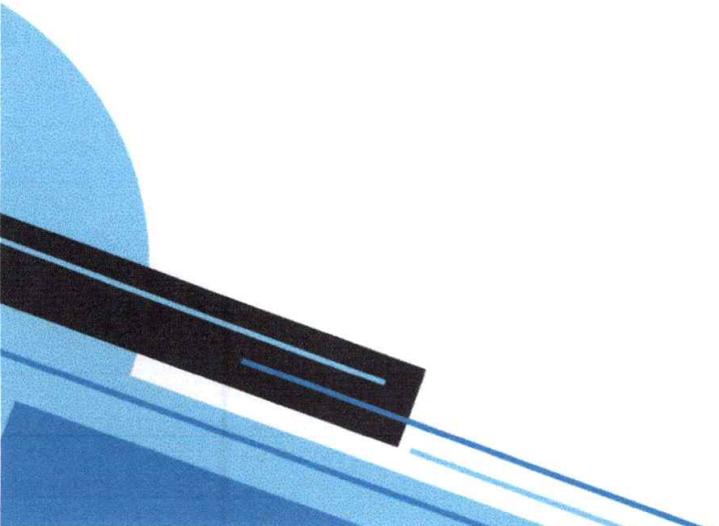
Tabel 4.48 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan
		Pelayanan dukungan psikososial



BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sistematisa penyusunan LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA, tanggal 24 Desember 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya hasil kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetapi yang tak kalah pentingnya adalah peran strategis DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah menunjukkan kepeduliannya dalam pembangunan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2024

penyelenggaraan pemerintahan ditahun-tahun selanjutnya sehingga pencapaian kinerja menjadi lebih optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang **Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing.**

Mopopiana, Mototabiana, Agu Mononantobana

Boroko, 19 Maret 2024



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

SIRAJUDIN LASENA



**BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**